



**Kementerian  
Pemuda dan  
Olahraga**  
Republik Indonesia

# LAPORAN KINERJA 2023

# PEMUDA MAJU





**"REMU  
MATA!"**



**"OLAH RAGA,  
JAYA!"**



# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja yang disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kemenpora tahun 2023 ini merupakan laporan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kemenpora Tahun 2023. Seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2023 merupakan bagian dalam upaya menjalankan mandat yang diemban sejalan dengan kebijakan dan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah.

Laporan Kinerja ini berisi informasi capaian tujuan dan sasaran kinerja, analisis capaian, pengukuran, inovasi, achievement dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan ke depan yang diuraikan dan dijelaskan pada 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2023. Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang telah ditetapkan. Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Di samping itu, saya mengapresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga baik secara langsung maupun tidak langsung yakni Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Pelaku Usaha, dan seluruh masyarakat pemuda dan olahraga, kami berharap agar kedepannya kerjasama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan kami pun dapat melayani dengan lebih baik. Kontribusi kita semua tentu bermanfaat untuk pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang semakin maju dan jaya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan serta mengoptimalkan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023.

Jakarta, Februari 2024  
Menteri Pemuda dan Olahraga  
Republik Indonesia,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo



# RINGKASAN EKSEKUTIF



Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berkewajiban melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 sebagai pemenuhan komponen Pelaporan Kinerja dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjunjung prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kemenpora kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan (stakeholders), sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja Kemenpora di masa mendatang.

1. Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di Tingkat Asia dan Dunia; dan
3. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja bersih, akuntabel, profesional dan melayani.

Pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut diukur dengan 11 (sebelas) indikator kinerja. Tingkat ketercapaian sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja, dapat dilihat pada Tabel Capaian Sasaran Strategis Kemenpora Tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing	1.1	Indeks Pembangunan Pemuda	56,65	55,83	98,55%
		1.2	Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan Kepemudaan	78	83,93	107,60%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat Asia dan Dunia	2.1	Persentase penduduk Usia 10 tahun keatas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	37%	25.4	68.65%
		2.2	Persentase tingkat kebugaran jasmani Masyarakat	28%	17.9	69.93%
		2.3	Peringkat pada Asian Games	12	13	91,67%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
		2.4	Peringkat pada Asian Para Games	8	6	133,3%
		2.5	Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat internasional	80%	74,10%	92,63%
		2.6	Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level internasional	80%	81,92%	102,40%
3	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani.	3.1	Indeks RB	73,1	69.80	95.48%
		3.2	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%
		3.3	Indeks Pelayanan Publik	4,26	3,77	88,50%

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Kemenpora Tahun 2023

Dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur, 4 (empat) IKU memperoleh capaian dengan kriteria "Sangat Baik" ( $\geq 100\%$ ); 4 (empat) IKU memperoleh capaian dengan kriteria "Baik" ( $90\% \leq x < 100\%$ ); 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria "Cukup" ( $80\% \leq x < 90\%$ ); dan 2 (dua) IKU memperoleh capaian dengan kriteria "Kurang" ( $< 80\%$ ). Dalam upaya pencapaian indikator kinerja utama di atas dijumpai beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pada Bidang Kepemudaan, isu koordinasi lintas sektor dengan para stakeholder kepemudaan serta internalisasi terhadap ukuran pembangunan dirasa masih perlu dioptimalkan. Sedangkan di Bidang Keolahragaan lahirnya Desain Besar Olahraga Nasional menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pencapaian prestasi olahraga Nasional.

Pada tahun 2023, pagu anggaran Kemenpora adalah sebesar Rp3.376.466.778.000 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Sampai akhir tahun 2023, telah direalisasikan sebesar Rp3.281.434.076.297 (tiga triliun dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 97,19% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, harapannya seluruh penanggung jawab IKU melakukan evaluasi pencapaian serta pemantauan dan pengawalan pencapaian kinerja terlebih di akhir periode Renstra Kemenpora 2020-2024. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai Kemenpora diharapkan dapat mendukung kinerja Kemenpora yang lebih baik dan melakukan terobosan-terobosan baru agar pelaksanaan kegiatan memperoleh hasil yang maksimal serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat pemuda dan olahraga secara luas.



## PERNYATAAN TELAH DI REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja (LKJ) Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi yang memuat data/informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan data/informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024  
Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga



Agus Widaryanto, Ak., M.M.  
NIP. 196711281988031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN REVIU INSPEKTORAT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	3
C. Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur.....	5
D. Isu Strategis Kepemudaan dan Olahraga.....	9
E. Sistematika Pelaporan.....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
A. Rencana Strategis Kemenpora (Renstra) .....	16
B. Indikator Kinerja Utama .....	20
C. Perjanjian Kinerja Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023 .....	21
D. Postur Anggaran.....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>24</b>
A. Pengukuran Kinerja.....	25
B. Capaian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga .....	25
C. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	26
1. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan .....	27
2. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Keolahragaan.....	60
3. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesekretariatan .....	103
4. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Lainnya .....	125
D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Pemuda dan Olahraga ..	139
E. Akuntabilitas Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.....	141
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>144</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>147</b>

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Satuan Kerja pada PNS dan Honorer	5
1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
1.4	Jumlah ASN Berdasarkan Eselon Setiap Unit Kerja	6
1.5	Jumlah ASN Berdasarkan Eselon Setiap Unit Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi	7
1.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada Setiap Unit Kerja Tahun 2023	7
2.1	Indikator Kinerja Utama Kemenpora 2020 - 2024	20
2.2	Pagu Anggaran Kemenpora TA 2023	22
2.3	Pengalokasian Anggaran TA 2023	23
3.1	Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator	25
3.2	Capaian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023	26
3.3	Capaian Indikator Pembangunan Pemuda Tahun 2023	27
3.4	Domain Pembangunan Pemuda dan Indikator Indeks	28
3.5	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Tahun 2023	33
3.6	Identifikasi Strategi Kewirausahaan	41
3.7	Capaian Indikator Tingkat Koordinasi Lintas Sektor 2023	47
3.8	Survei Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor	49
3.9	Jumlah Provinsi yang melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan setiap tahun	56
3.10	Rekapitulasi Penyusunan RAD dan Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota Pelayanan Kepemudaan	57
3.11	Capaian Indikator Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir Tahun 2020-2023	60
3.12	Indeks Partisipasi Olahraga pada 34 Provinsi di Indonesia	62
3.13	Kegiatan pendukung Indikator Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	67
3.14	Capaian Persentase Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Tahun 2020-2023	69
3.15	Indeks Tingkat Kebugaran Jasmani pada 34 Provinsi di Indonesia	70
3.16	Capaian Indikator Peringkat pada Asian Games Tahun 2010, 2014, 2018, 2023	76
3.17	Klasemen dan Perolehan Medali di Asian Games 2023 Hangzhou	77
3.18	Cabang Olahraga berhasil meraih Medali Emas di Asian Games 2023 Hangzhou	77
3.19	Cabang Olahraga berhasil meraih Medali di Asian Games 2023 Hangzhou	78
3.20	Cabang olahraga dan nomor pertandingan yang ditargetkan meraih medali Emas	78
3.21	Perbandingan capaian prestasi Indonesia berdasarkan cabang olahraga yang dipertandingkan, nomor pertandingan, jumlah atlet, medali dan	81

ranking		
3.22	Capaian Peringkat pada Asian Para Games Tahun 2010, 2014, 2018 dan 2023	83
3.23	Perolehan medali pada Asian Para Games IV Hangzhou Tahun 2023	85
3.24	Rasio Medali	85
3.25	Cabang Olahraga berhasil meraih Medali Emas di Asian Para Games 2022	86
3.26	Cabang Olahraga berhasil meraih Medali di Asian Para Games 2022	87
3.27	Perbandingan capaian prestasi Indonesia pada Asian Para Games 2023, 2018, 2014	89
3.28	Capaian Persentase Atlet Junior yang berprestasi di tingkat internasional	91
3.29	Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	94
3.30	Rata-rata % peringkat di 6 event	95
3.31	Perbandingan Tingkat Prestasi dan Target Indonesia dalam 3 Tahun Terakhir	96
3.32	Enam Atlet lolos Olimpiade 2024, Paris dari 4 Cabang Olahraga	98
3.33	Pencapaian Prestasi Mengikuti Asian Games 2022 Hangzhou, China	98
3.34	Potensi Kelolosan Atlet Berdasarkan sistem Kualifikasi Olimpiade Paris, Prancis	99
3.35	Cabang Olahraga Yang Tidak Berpartisipasi Pada Asian Games 2022 Hangzhou	100
3.36	Sembilan Atlet lolos Paralimpiade 2024, Paris dari 4 Cabang Olahraga	100
3.37	Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Kemenpora	103
3.38	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	103
3.39	Kriteria Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	104
3.40	Rincian Capaian Indeks RB Tahun 2022 Kemenpora	105
3.41	Rincian Capaian Indeks RB Tahun 2023 Kemenpora	107
3.42	Capaian Indikator Opini BPK Kemenpora Tahun 2023	115
3.43	Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenpora dalam 5 tahun terakhir	117
3.44	Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Kemenpora	121
3.45	Nilai dan Kategori Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023	122
3.46	Hasil capaian PEKPPP Kemenpora sesuai Kepmenpan-RB Nomor 795 Tahun 2023	123
3.47	Capaian KIP Kemenpora	126
3.48	Aspek Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	127
3.49	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Kemenpora	140
3.50	Realisasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Program, Jenis Belanja dan Satuan Kerja	142

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Fungsi Kemenpora	3
1.2	Struktur Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga	4
1.3	Peran Kemenpora dalam Agenda Pembangunan Kepemudaan	10
1.4	Sistematika Pelaporan Kinerja	13
2.1	Visi Kemenpora Tahun 2020-2024	16
2.2	Misi Kemenpora Tahun 2020-2024	17
2.3	Tujuan Kemenpora Tahun 2020-2024	18
2.4	Program Prioritas Kemenpora Tahun 2020-2024	19
2.5	Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2023	21
3.1	Domain Pembangunan Pemuda dan Indikator Indeks	29
3.2	Pengumuman Kelulusan Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan	35
3.3	Pelatihan Penguatan Organisasi	43
3.4	Penghargaan Pemuda Tahun 2023	44
3.5	Dokumentasi Rapat Tingkat Menteri terkait Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	52
3.6	Dokumentasi Rapat Pelayanan Kepemudaan antar K/L	53
3.7	Dokumentasi Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Gorontalo	54
3.8	Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kepemudaan Provinsi NTB	55
3.9	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Desain Besar Olahraga Nasional sesuai permohonan dari Kemenpora	55
3.10	Dokumentasi Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	58
3.11	Dokumentasi Pemberian Penghargaan Kemenpora kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Aksi Daerah	59
3.12	Peserta Festival Olahraga Disabilitas Tahun 2023	67
3.13	Olahraga Tradisional Hadang pada POTRADNAS Tahun 2023	67
3.14	Identifikasi Antropometrik, Tes Kemampuan Fisik, dan Tes Kebugaran Pelajar Nasional	73
3.15	<i>Multistage Fitness Test</i> pada pelajar	74
3.16	Identifikasi Antropometrik, Tes Kemampuan Fisik, dan Tes Kebugaran Pelajar Nasional	74
3.17	Pertandingan Zohri pada Asian Games 2022	76

3.18	Pebalap Sifa Amellya Nur Tambah Medali Emas Indonesia di Ajang Asian Games 2022 Hangzhou	80
3.19	Pemberian Penghargaan pada Olahragawan dan Pelatih yang berprestasi pada Ajang Asian Games Hangzhou 2022	82
3.20	Kontingen Indonesia pada pembukaan Asian Para Games Hangzhou	84
3.21	Medali dan klasemen pada Asian Para Games 2022	86
3.22	Karisma Evi Tiarani (T42 - Atletik) memecahkan 2 (dua) Rekor Dunia	87
3.23	Saptoyogo Purnomo (T37 - Atletik) berhasil memecahkan Rekor Asian Para Games	88
3.24	Pengukuhan dan Pelepasan Kontingen Indonesia pada Asian Para Games 2022	89
3.25	Jenjang Ideal Pembinaan Atlet	92
3.26	14 Cabang Olahraga Prioritas dan 5 Cabang Olahraga Prioritas Paralympic dalam DBON	101
3.27	Perubahan Kerangka Reformasi Birokrasi	107
3.28	Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi	108
3.29	Tim RB General Kemenpora	108
3.30	Indikator RB General Kemenpora	109
3.31	PKS bersama Kemenko-PMK	110
3.32	Data Sebaran Daerah P3KE	110
3.33	Dokumentasi Pelatihan Program YES	111
3.34	Dokumentasi Pelatihan Penumbuhan Minat Kewirausahaan	111
3.35	Surat Edaran Himbuan Penggunaan Produk Dalam Negeri	112
3.36	Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal dan Internal	112
3.37	Instansi Meso selaku Tim Evaluator RB Eksternal	113
3.38	Dokumentasi Pelaksanaan RB General dan Tematik Kemenpora	114
3.39	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenpora	116
3.40	Instrumen dan Komponen Indikator Penilaian Indeks Pelayanan Publik	121
3.41	Rapat Evaluasi Pelaksanaan PEKPPP Indeks Pelayanan Publik Kemenpora Tahun 2023	124
3.42	Sesmenpora menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dari Ketua Komisi Infromasi Pusat (KIP) di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia	126
3.43	Sarana dan Prasarana Layanan Informasi	128
3.44	Website PPID Kemenpora	128
3.45	Aplikasi PPID Kemenpora berbasis Android	128
3.46	Aplikasi PPID Kemenpora berbasis Android	129
3.47	Dokumentasi Forum Keterbukaan Informasi Publik	129

3.48	Sesmenpora bersama Kepala Biro Humas dan Umum serta Tim BMN menerima Penghargaan Anugrah Reksa Bandha 2023	131
3.49	Sertifikat Akreditasi Perpustakaan Pungkas Tri Baruno Kemenpora	132
3.50	Penandatanganan BAST Penyerahan Sertifikat Akreditasi Perpustakaan Pungkas Tri Baruno oleh Perpustakaan Nasional	133
3.51	Dokumentasi Perpustakaan Pungkas Tri Baruno Kemenpora setelah dilakukan revitalisasi.	134
3.52	Sosial Media Perpustakaan Kemenpora	134
3.53	Dokumentasi Kegiatan Bedah Buku 1	135
3.54	Dokumentasi Kegiatan Bedah Buku 2	135
3.55	Sekretaris Kemenpora RI Gunawan Suswantoro menerima penghargaan terkait Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas Komisi Informasi (KI) Pusat.	137
3.56	Parkir khusus disabilitas di area parkir Kemenpora	137
3.57	Petugas informasi sedang melayani permohonan informasi dari masyarakat penyandang disabilitas	138
3.58	<i>Responsive Voice</i> pada <i>website</i> kemenpora.go.id	138
3.59	<i>Widget Accessibility</i> pada <i>website</i> PPID.kemenpora.go.id	138

## DAFTAR GRAFIK

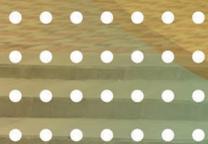
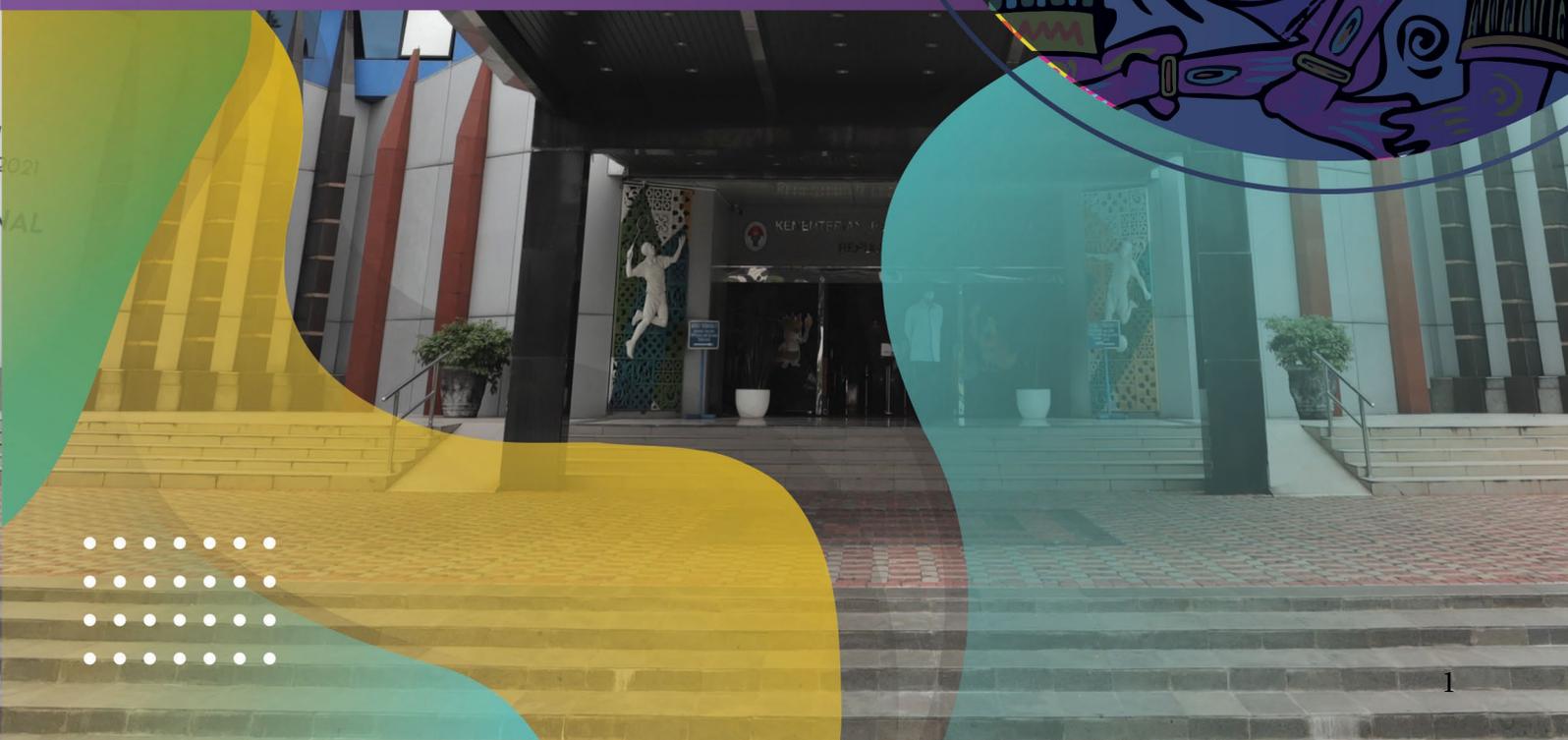
3.1	Capaian IPP 7 tahun terakhir	30
3.2	Capaian IPP per domain	32
3.3	Capaian Domain Pendidikan	34
3.4	Capaian Domain Kesehatan	36
3.5	Persentase Pemuda menurut Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan tahun 2016-2023	37
3.6	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	41
3.7	Capaian Domain Gender dan Diskriminasi	45
3.8	Tingkat Kualitas pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor tahun 2022 dan 2023	50
3.9	Perbandingan Indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir Tahun 2021-2023	62
3.10	Persentase Penduduk Berusia 5 dan 10 tahun ke atas yang berolahraga Tahun 2023	63
3.11	Malaysian Sports Culture Index Tahun 2020-2022	64
3.12	Partisipasi Berolahraga Masyarakat Jepang Tahun 2018-2022	64
3.13	Perbandingan Kebugaran Jasmani Anak Usia 10-15 Tahun dengan Remaja Usia 16-30 Tahun	71
3.14	Kategori Kebugaran Jasmani Berdasarkan Usia	72
3.15	Perbandingan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2021-2023	72
3.16	Perbandingan capaian medali Indonesia pada Asian Games 2010 s.d Asian Games 2022	80





- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur
- D. Potensi Permasalahan Pemuda dan Olahraga
- E. Sistematika Pelaporan

## BAB I PENDAHULUAN



# A. LATAR BELAKANG



Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu Kementerian Negara yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan kelanjutan dari Perpres Nomor 57 Tahun 2015. Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga. Lingkup tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga mencakup Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Terdapat 4 (empat) dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi Prioritas Nasional bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka mendukung pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024, menuju Indonesia berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, antara lain yaitu

1. (PN1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas meliputi (PP2) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui (KP1) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha;
2. PN3) meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing meliputi (PP3) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui (KP4) pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, (PP5) peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui (KP3) peningkatan kualitas pemuda,

- dan (PP7) peningkatan produktivitas dan daya saing melalui (KP4) peningkatan prestasi olahraga;
3. (PN4) membangun kebudayaan dan karakter bangsa meliputi (PP1) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui (KP1) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
4. (PN7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik meliputi (PP5) menjaga stabilitas keamanan nasional melalui (KP4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun yang menjadi Program Prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga, antara lain yaitu:

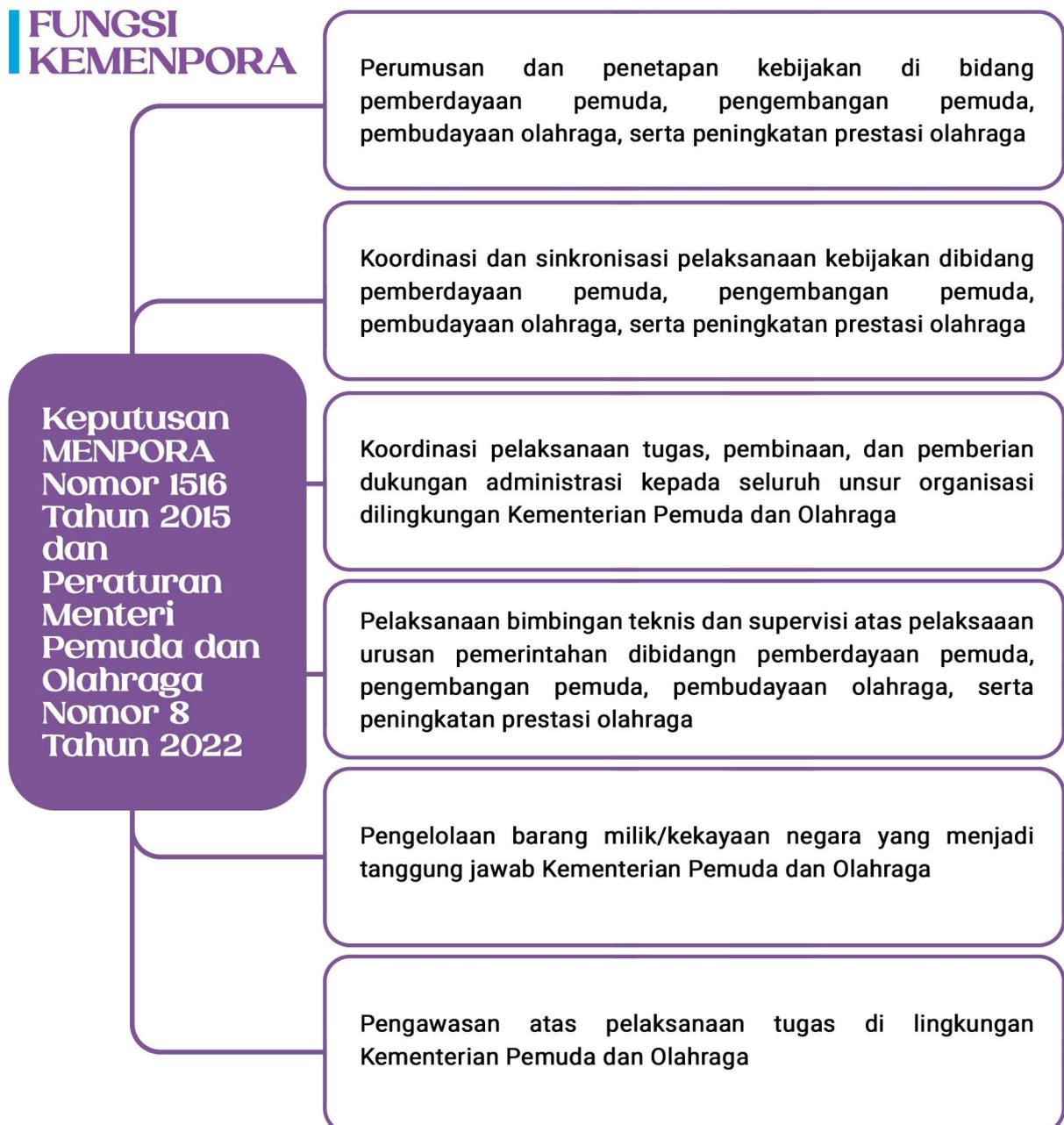
1. Memperbaiki tata Kelola, menyederhanakan regulasi, menyesuaikan birokrasi dan meningkatkan kecepatan pelayanan publik;
2. Memberdayakan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan;
3. Menguatkan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda;
4. Memassalkan dan memasyarakatkan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di masyarakat;
5. Membina usia dini dan meningkatkan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

## B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KEMENPORA

### TUGAS KEMENPORA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

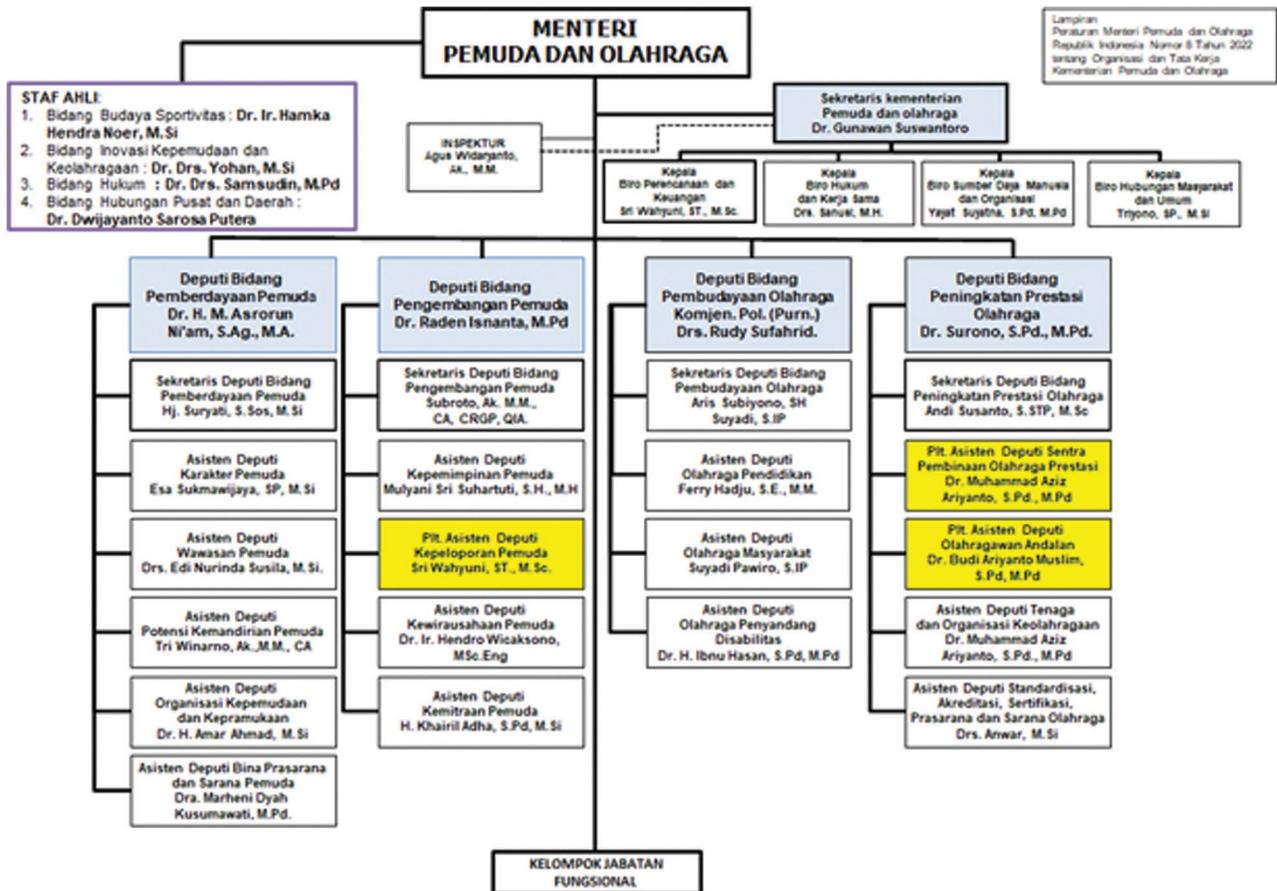
#### FUNGSI KEMENPORA



Gambar 1.1 Fungsi Kemenpora

# STRUKTUR ORGANISASI KEMENPORA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, struktur organisasi dan tata kerja, struktur organisasi Kemenpora tertuang dalam Permenpora Nomor 8 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga disajikan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga



## C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Untuk mengemban tugas menjalankan visi dan misi dalam mendukung capaian hasil diperlukan sumber daya manusia yang kuat dan profesional. Pada Tahun 2023, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki total pegawai sebanyak 1.382 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer (Non-ASN). Di bawah ini kondisi sumber daya manusia Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, sebagai berikut:



UNIT KERJA	PNS		PPPK		HONORER	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Sekretariat Kemenpora	177	146	9	7	143	54
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	40	30	4	-	15	7
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	37	36	5	4	7	3
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	52	33	6	4	10	4
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	317	204	7	2	14	5
<b>TOTAL</b>	<b>623</b>	<b>449</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>189</b>	<b>73</b>

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Satuan Kerja pada PNS dan Honorer

Berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2023, jumlah pegawai di Kemenpora sebanyak 1.382 pegawai dengan rincian berikut: 1.072 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 48 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 262 orang Honorer. ASN (PNS dan PPPK) yang berjumlah 1.120 terdiri dari Laki-laki sebanyak 654 orang (58%) dan Perempuan sebanyak 466 (42%). Sedangkan Honorer terdiri dari Laki-laki sebanyak 189 orang (72%) dan Perempuan sebanyak 73 (28%).

Sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja sebagai berikut (37,78%) Kesekretariatan, (6,95%) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, (6,66%) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, (7,89%) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, (39,73%) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah (2,14%) Doktor, (17,23%) Magister, (35%) Sarjana/Sederajat, (11,79%) Diploma, (33,13%) SMA/Sederajat, dan (0,72%) pendidikan di bawah SMA/Sederajat.



UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana	Magister	Doktor
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	2	2	32	94	123	73	10
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	-	-	6	8	31	24	5
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	-	-	6	8	33	31	3
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	-	-	8	7	51	28	2
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	3	319	15	154	37	4
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>371</b>	<b>132</b>	<b>392</b>	<b>193</b>	<b>24</b>

Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan golongan pegawai, dapat diketahui bahwa pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (0,18%) golongan I, (37,50%) golongan II, (49,55%) golongan III, dan (12,77%) golongan IV.

UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	70	223	44	338
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	-	9	40	25	74
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	-	10	48	24	82
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	-	13	56	26	95
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	318	188	24	531
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>420</b>	<b>555</b>	<b>143</b>	<b>1120</b>

Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Kepangkatan Setiap Unit Kerja

Berdasarkan eselon, dapat diketahui bahwa pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (3,07%) Eselon I, (8,19%) Eselon II, (26,96%) Eselon III, dan (61,77%) Eselon IV. Pada akhir tahun 2023, Kemenpora telah melakukan penyederhanaan birokrasi pejabat administrator (Eselon III) dan pengawas (Eselon IV) yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian penyetaraan jabatan.

UNIT KERJA	ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	5	5	18	48	76
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	1	6	14	30	51
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1	5	14	33	53
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	1	4	17	38	60
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	4	16	32	53
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>79</b>	<b>181</b>	<b>293</b>

Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Eselon Setiap Unit Kerja



Sehingga pada akhir tahun 2023 di Kemenpora hanya tersedia jabatan struktural Eselon I sebanyak 9 orang, Eselon II sebanyak 24 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, dan Eselon IV sebanyak 1 orang



UNIT KERJA	ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	5	5	2	1	13
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	1	7	-	-	8
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1	4	-	-	6
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	1	3	-	-	4
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	5	-	-	5
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>36</b>

Tabel 1.5 Jumlah ASN Berdasarkan Eselon Setiap Unit Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi

Adapun komposisi jabatan pada setiap unit Kementerian Pemuda dan Olahraga (6,79%) Kesekretariatan Struktural, (12,14%) Kesekretariatan Fungsional, (11,34%) Kesekretariatan Pelaksana, (4,55%) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Struktural, (0,54%) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Fungsional, (1,52%) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Pelaksana, (4,64%) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Struktural, (0,89%) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Fungsional, (1,52%) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Pelaksana, (5,36%) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Struktural, (0,80%) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Fungsional, (2,32%) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Pelaksana, (4,64%) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Struktural, (8,57%) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Fungsional, dan (34,11%) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Pelaksana.

UNIT KERJA	JABATAN			JUMLAH
	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	76	136	127	339
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	51	6	17	74
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	52	10	20	82
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	60	9	26	95
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	52	96	382	530
<b>TOTAL</b>	<b>291</b>	<b>257</b>	<b>572</b>	<b>1120</b>

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada Setiap Unit Kerja Tahun 2023

## Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sebagaimana tercantum pada Visi dan Misi Kemenpora berkomitmen untuk mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya manusia menjadi bagian penting dari visi dan misi Kemenpora.

Dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, disebutkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kemenpora melalui penetapan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenpora telah melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusianya. Dalam rangka efisiensi, Kemenpora telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 19 Desember 2003 terhadap 243 (dua ratus empat puluh tiga) pejabat administrator dan pengawas yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian penyetaraan jabatan.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal sehingga dilakukan evaluasi secara berkala oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui strategi sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan. Sehubungan dengan itu pada tahun 2023, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan jumlah lowongan sebanyak 101 formasi jabatan namun hanya terisi sebanyak 85 formasi jabatan atau 84,16% dari formasi yang ada.
2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2024 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi dalam bentuk aplikasi manajemen talenta untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.





## D. ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Indonesia akan menghadapi dua momentum besar pembangunan yang harus dihadapi dengan perencanaan yang matang agar hasilnya optimal. Pertama, Indonesia akan menghadapi periode puncak bonus demografi pada 2028-2031 yang ditandai dengan terus menurunnya angka rasio ketergantungan ke titik terendah pada 2028-2031. Kedua, Visi Indonesia Emas 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur (ditandai dengan berhasilnya Indonesia menjadi negara maju dan salah satu kekuatan ekonomi dunia) saat merayakan peringatan hari kemerdekaan yang ke-100 tahun.

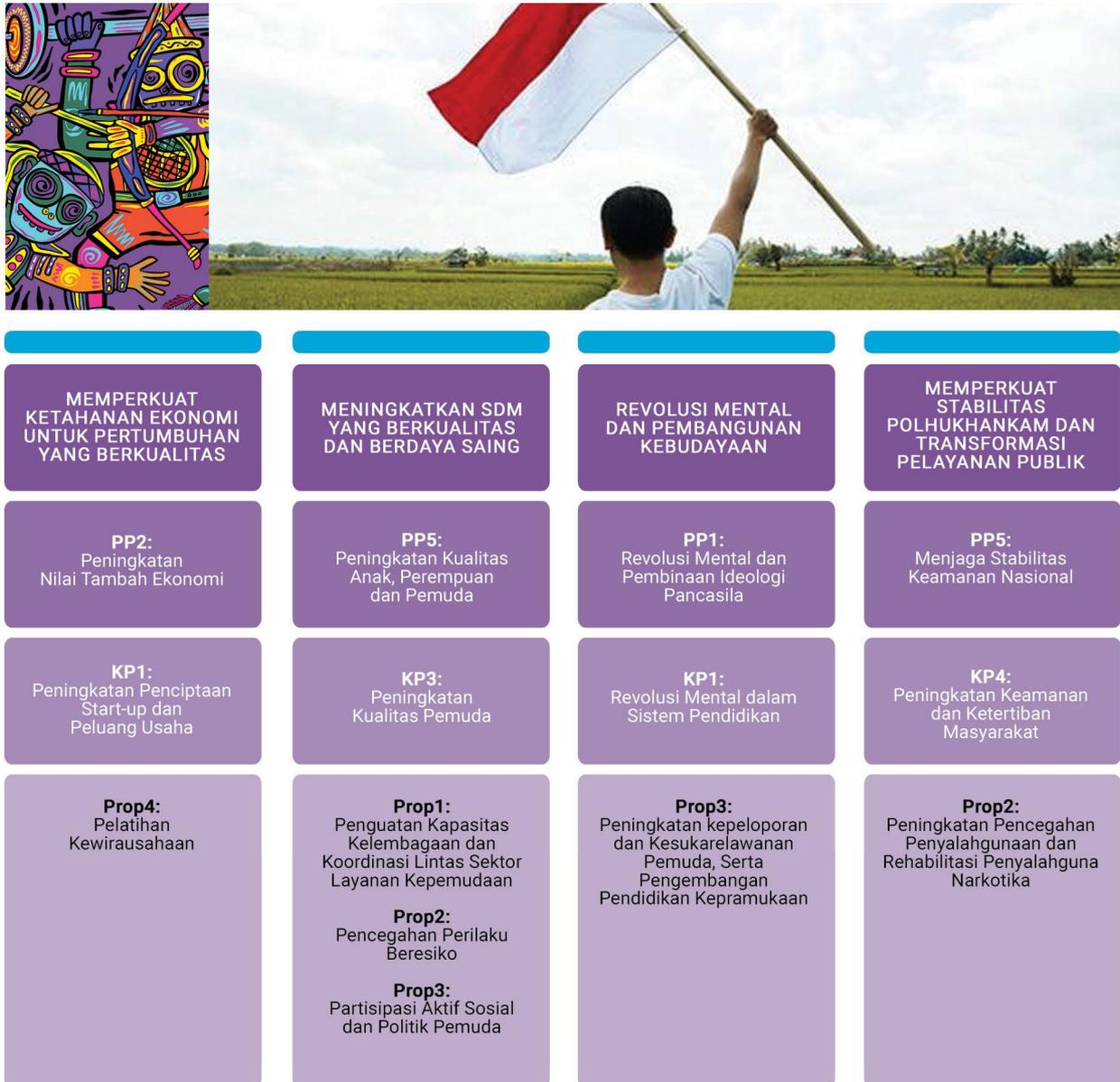
### 1. Pembangunan Kepemudaan

Dua momentum besar pembangunan ini, membutuhkan pemuda yang berkualitas. Upaya pembangunan pemuda juga perlu diarahkan untuk menghadapi tantangan masa depan yang berbeda dari tantangan masa kini. Salah satu tantangan dari pembangunan pemuda adalah pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor (KSLS) penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Hal ini merupakan amanat dari Perpres Nomor 43 Tahun 2022. Beberapa tantangan KSLS penyelenggaraan pelayanan kepemudaan antara lain pelibatan multipihak dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, pelaksanaan pemantauan evaluasi terpadu dan sistematis, komitmen stakeholder, penyusunan RAD sebagai turunan dari RAN di daerah, serta kapasitas SDM dalam internalisasi IPP ke dalam program/kegiatan dan kebijakan pembangunan kepemudaan.

#### Potensi/Kekuatan

- Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan perannya dalam implementasi kebijakan dan program yang mendukung RPJMN 2020-2024 secara khusus mendukung dalam agenda pembangunan kepemudaan yaitu memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan.





Gambar 1.3 Peran Kemenpora dalam Agenda Pembangunan Kepemudaan

- b. Sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai leading sector dalam pelaksanaan koordinasi dan sinergi kepemudaan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, terutama memastikan agar Rencana Aksi Nasional yang memuat program dan kegiatan K/L telah disusun menurut indikator, target capaian, dan dikelompokkan menurut 5 domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Dengan demikian capaian pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam RAN nantinya dapat diukur tingkat capaiannya dan diharapkan dapat mendukung target capaian IPP, serta berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam akselerasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan;
- c. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas kebijakan dan sebagai tools guna membantu memperbaiki kinerja. Dengan mengukur dan menganalisis indikator hasil dari program yang dijalankan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih baik untuk kedepannya.



## Permasalahan

- Penyusunan regulasi yang menjadi amanat dari Perpres Nomor 43 Tahun 2022 diantaranya Rancangan Permenpora terkait RAN Kepemudaan dan Rancangan Permenpora IPP serta penyusunan Desain Besar Pembangunan Kepemudaan yang terintegrasi dan mengacu pada tolok ukur pembangunan kepemudaan;
- Rencana Aksi Nasional Kepemudaan tahun 2020-2024 dalam rangka menjamin keberlanjutan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan masih belum terintegrasi baik dari segi pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan;
- Pelaksanaan program/kegiatan Bidang Kepemudaan belum berbasis data dan informasi, diperlukan ketersediaan suatu sistem database yang mampu memberikan data dan informasi secara lengkap, agar pelaksanaan pembangunan kepemudaan dapat direncanakan secara baik serta didukung oleh penganggaran yang memadai;
- Capaian Indeks Pembangunan Pemuda 2023 masih bersifat sementara karena capaian ketiga indikator pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan masih menggunakan data Susenas MSBP 2021 (menunggu BPS merilis hasil Susenas MSBP 2021 untuk finalisasi capaian IPP 2021);
- Masih perlunya peningkatan pemahaman di internal Kemenpora, utamanya intervensi terhadap indikator pada level Proyek Prioritas terkait kepemudaan.

## 2. Pembangunan Keolahragaan

Pada konteks olahraga, pembangunan Keolahragaan dijalankan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Isu strategis pembangunan olahraga di Indonesia dalam konteks daerah di antaranya adalah pembudayaan olahraga berkelanjutan, prestasi dan pengakuan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan olahraga, sarana prasarana, pendanaan, SDM keolahragaan, pembinaan pembibitan, pemassalan partisipasi aktif masyarakat, dan berbagai permasalahan pembangunan olahraga di daerah lainnya.

### Potensi/Kekuatan

Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh mandat terkait Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Permenpora Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan DBON Periode Tahun 2021-2024, untuk memastikan agar kerangka strategis pengembangan olahraga nasional dalam jangka panjang yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan keolahragaan lainnya secara terintegrasi dan kolaboratif berjalan dengan baik.

- a. DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga ;
- b. Peta Jalan DBON Tahun 2021-2024 merupakan dokumen yang memberi arah dan langkah pelaksanaan DBON tahap pertama periode tahun 2021-2024;

- c. Peta Jalan DBON Tahun 2021-2024 digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/lembaga untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya, dan Pemerintah Daerah untuk menyusun DOD tahun 2021-2024 sesuai dengan kewenangannya.

### Permasalahan

- a. Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah;
- b. Prasarana dan sarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar;
- c. Sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan;
- d. Manajemen kompetisi belum berjenjang, rutin, berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kelompok usia serta karakteristik cabang olahraga;
- e. Tenaga Keolahragaan belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas (lisensi Federasi Internasional);
- f. Sport science belum dijadikan sebagai faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga;
- g. Manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional;
- h. Profesi sebagai Olahragawan belum menjadi pilihan dan tidak ada jaminan masa depan purna prestasi;
- i. Kurikulum Pendidikan Khusus Atlet belum ada;
- j. Database, sistem informasi, dan analisis big data keolahragaan belum dilakukan;
- k. Belum optimalnya peran K/L, BUMN dan Pemerintah Daerah dalam mendukung atlet berprestasi serta masih kurangnya sinergitas dengan organisasi keolahragaan;
- l. Dunia usaha belum dioptimalkan untuk mendukung kegiatan olahraga nasional.

## E. SISTEMATIKA PELAPORAN

### I

#### PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum terkait dengan latar belakang, dasar hukum, tugas dan wewenang, struktur organisasi, kondisi sumber daya manusia aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga, potensi dan permasalahan bidang pemuda dan olahraga, serta sistematika penyajian

### II

#### PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana kerja dan anggaran Kemenpora Tahun 2023, serta perjanjian kinerja Kemenpora Tahun 2023

### III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja Kemenpora beserta pencapaian realisasi anggarannya dalam rangka pencapaian kinerja dan cacapaian kinerja lainnya

### VI

#### PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas Laporan Kinerja Kemenpora Tahun 2023 beserta rekomendasinya sebagai perbaikan di masa yang akan datang

Gambar 1.4 Sistematika Pelaporan Kinerja





- A. Rencana Strategis Kemenpora (Renstra)
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023
- D. Postur Anggaran

## BAB II PERENCANAAN KINERJA



## A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian dalam menjabarkan RPJMN Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda pada berbagai bidang pembangunan, sedangkan pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu Kementerian Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan pengganti dari Perpres Nomor 57 tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. Lingkup tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga mencakup bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 mengacu pada visi misi Presiden yakni :

### VISI

Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong



Gambar 2.1 Visi Kemenpora Tahun 2020-2024



Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan serangkaian aksi dalam rangka melaksanakan prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian dan mendukung prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka mencapai Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020- 2024 yang telah ditetapkan.

**1**

Mengembangkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;

**2**

Mendorong peningkatan pemassalan dan pembudayaan olahraga yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat, dan didukung dengan pengembangan industri olahraga, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan secara berjenjang, sistematis, dan berkesinambungan;

**3**

Meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang akuntabel, efektif dan efisien.



Gambar 2.2 Misi Kemenpora Tahun 2020-2024

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi dimaksud, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam periode lima tahun.

## TUJUAN

1

Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan, serta berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa;

2

Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia;

3

Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintah yang bersih dan bermutu



Gambar 2.3 Tujuan Kemenpora Tahun 2020-2024

## Program Prioritas Kemenpora Tahun 2020-2024

-  **1** Perbaikan Tata Kelola kelembagaan, kompetensi ASN, Penyederhanaan Regulasi, Penyesuaian Birokrasi, dan Peningkatan Kecepatan Pelayanan Publik
-  **2** Pemberdayaan Pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan
-  **3** Penguatan idiologi Pancasila dan karakter serta budaya dikalangan pemuda
-  **4** Permasalahan dan Pemasarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar dikalangan masyarakat
-  **5** Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan

Gambar 2.4 Program Prioritas Kemenpora Tahun 2020-2024



## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pencapaian sasaran strategis atau kinerja organisasi, dapat diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Total keseluruhan IKU Kemenpora pada Tahun 2023 adalah sebanyak 8 (delapan) IKU berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 130 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024. IKU Kemenpora Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing.	Indeks Pembangunan Pemuda	53.56	54.59	55,61	56,65	57,67
		Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan Kepemudaan	N/A	N/A	75 (Baik)	78 (Baik)	81 (Baik)
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	Persentase penduduk Usia 10 tahun keatas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	33.87	35.4	36,39	37	40,00
		Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat internasional	N/A	75%	78%	80%	82%
		Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	N/A	70%	75%	80%	82%
3	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani.	Indeks Reformasi Birokrasi	70,1	71,1	72,1	73,1	75,1
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kemenpora 2020 - 2024



## C. PERJANJIAN KINERJA KEMENPORA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Perjanjian kinerja ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk komitmen pencapaian sasaran strategis yang harus dicapai. Uraian Perjanjian Kerja Kemenpora dapat dilihat berikut ini:

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing	1.1 Indeks Pembangunan Pemuda	56,65
		1.2 Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan Kepemudaan	78
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat Asia dan Dunia	2.1 Persentase penduduk Usia 10 tahun keatas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	37%
		2.2 Persentase tingkat kebugaran jasmani Masyarakat	28%
		2.3 Peringkat pada Asian Games	12
		2.4 Peringkat pada Asian Para Games	8
		2.5 Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat internasional	80%
		2.6 Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	80%
3	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani.	3.1 Indeks RB	73,1
		3.2 Opini BPK	WTP
		3.3 Indeks Pelayanan Publik	4,26

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1. Program Keolahragaan	Rp. 2.668.870.142.000
2. Program Kepemudaan	Rp. 161.238.000.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp. 355.525.215.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.185.633.357.000</b>

Jakarta, April 2023

Menteri Pemuda dan Olahraga  
Republik Indonesia,

Ario Bimo Hananto Ariotedjo, SH

Gambar 2.5 Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2023



## D. POSTUR PENGANGGARAN KEMENPORA

Pagu Kemenpora dalam rentang Januari sampai dengan Desember tahun 2023 tersaji pada tabel dibawah ini:

Kode Program	Pagu Awal	Pagu Akhir
092.WA Dukungan Manajemen	319,284,038,000	355,537,160,000
092.DA Keolahragaan	2,049,571,119,000	2,859,691,618,000
092.DB Kepemudaan	161,238,000,000	161,238,000,000
<b>Total</b>	<b>2,530,093,157,000</b>	<b>3,376,466,778,000</b>

Tabel 2.2 Pagu Anggaran Kemenpora TA 2023

Pagu alokasi awal Kemenpora TA 2023 Rp. 2.530,093,157,000,-, namun terdapat perubahan anggaran yang berasal dari BABUN Kementerian Keuangan dengan penambahan sebesar Rp 871.472.507.000 (34,44% kenaikan dari Pagu Alokasi) pada Program Dukungan Manajemen dan Keolahragaan. Selanjutnya pergeseran anggaran terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp 25.098.886.000,- sehingga total pagu akhir Kemenpora adalah Rp 3.376.466.778.000,-.

Total penambahan pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 44,261,122,000,- berasal dari pergeseran anggaran Rp. 36,163,990,000,- Program Keolahragaan yaitu RSON dan PPITKON dikarenakan adanya perubahan SOTK Kemenpora. Sedangkan pada Program Keolahragaan terdapat tambahan sebesar Rp. 827,211,385,000,- yang digunakan untuk Pemberian Penghargaan Olahraga Peraih Medali pada event keolahragaan Asian Games Hangzhou 2022 dan Asian Para Games Hangzhou 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023, Fasilitas Kejuaraan Multi Event olahraga prestasi di tingkat regional dan Internasional, Bantuan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single Event Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan, dan Pembinaan Olahragawan Nasional dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.



Dalam rangka memastikan ketercapaian indikator kinerja utama Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah disusun rincian program dan kegiatan yang disampaikan melalui rencana kerja anggaran setiap satuan kerja. Secara rinci pengalokasian anggaran per unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dijabarkan melalui tabel sebagai berikut:

NO	UNIT ESELON II	PAGU ANGGARAN
1	Sekretariat Kemenpora	335.537.160.000
2	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	83.990.961.000
3	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	87.247.038.000
4	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	112.327.860.000
5	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	2.644.316.642.000
6	Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	3.000
7	LPDUK	33.047.114.000
8	Dekonsentrasi	80.000.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>3.376.466.778.000</b>

Tabel 2.3 Pengalokasian Anggaran TA 2023

Alokasi anggaran terbesar adalah Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yaitu sebesar Rp. 2.644.316.642.000 atau 78,31% dari total pagu Kementerian Pemuda dan Olahraga, diantaranya dialokasikan untuk Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Peraih Medali Sea Games, Asian Games, Asean Paragames dan Asian Paragames, Fasilitas Penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup, Penyaluran Bantuan dalam rangka Pembinaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial (SLOMPN) Tahap 1 dan Tahap 2, dan Fasilitas Pengiriman Kontingen mengikuti Sea Games, Asean Para Games, Asian Games dan Asean Paragames.





- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Kemenpora 2023
- C. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
- D. Tindak Lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2022
- E. Akuntabilitas Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



## A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban instansi untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan kinerja dengan mengukur pencapaian target. Pengukuran kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dan capaian realisasi pada setiap indikator kinerja utama (IKU). Penilaian atas ketercapaian target indikator kinerja menggunakan skala ordinal berdasarkan data Kemenpora RB dapat terlihat pada tabel berikut:

Rentang Capaian	Kategori Penilaian	Keterangan
Capaian $\geq$ 100	Sangat baik	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
90 s.d capaian < 100	Baik	
80 s.d capaian < 90	Cukup	
Capaian < 80	Kurang	

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator

## B. CAPAIAN KINERJA KEMENPORA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase	Kategori
1	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila	1.1 Indeks Pembangunan Pemuda	56,65	55,33	97,66%	Baik
		1.2 Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	78	86,89	111%	Sangat Baik
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	2.1 Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	37%	25,4%	68,6%	Kurang
		2.2 Persentase tingkat kebugaran jasmani masyarakat	28%	17,9%	63,9%	Kurang
		2.3 Peringkat pada Asian	12	13	92,30%	Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase	Kategori
		Games				
		2.4 Peringkat pada Asian Para Games	8	6	133,3%	Sangat Baik
		2.5 Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat Internasional	80%	81%	101%	Sangat Baik
		2.6 Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada Level Internasional	80%	81,92%	102%	Sangat Baik
3	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, professional dan melayani	3.1 Indeks RB	73,1	69.80	95.48	Baik
3.2 Opini BPK		WTP	WTP	100%	Sangat Baik	
3.3 Indeks Pelayanan Publik		4,26	3,77	88,49%	Cukup	

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

### C. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan rencana kinerja atau target yang telah ditetapkan, kemudian melakukan pengukuran terhadap realisasinya. Adapun pembahasan secara mendalam terkait capaian kinerja Kemenpora pada Tahun 2023 akan diuraikan berdasarkan 3 (tiga) bidang, yaitu Kepemudaan, Keolahragaan dan Kesekretariatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

## 1. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG KEPEMUDAAN

### 1.1 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

SASARAN STRATEGIS : TERWUJUDNYA PEMUDA YANG BERIDEOLOGI PANCASILA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023		
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Indeks Pembangunan Pemuda	52,67	51,00	53,33	55,33	56,65	55,33*	97,67

Tabel 3.3 Capaian Indikator Pembangunan Pemuda Tahun 2023

Indeks Pembangunan Pemuda adalah suatu indeks yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memantau kemajuan pembangunan kepemudaan yang dirumuskan melalui serangkaian proses panjang melibatkan pemangku kepentingan pemuda secara luas dan telah menjadi indikator pembangunan bidang pemuda dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya. Indeks ini dikelola bersama-sama oleh 3 Menteri: Menko PMK, Menpora, dan Men PPN/Kepala Bappenas, dengan hadirnya IPP manfaat yang diperoleh :

1. Membantu memahami situasi pembangunan pemuda Indonesia saat ini dan menilai kemajuan yang telah dicapai. Data IPP membuat pemuda “nampak” secara statistik di seluruh dimensi kehidupannya;
2. Menjadi pintu masuk untuk memahami akar masalah yang mempengaruhi situasi pembangunan pemuda, masing-masing indikator IPP dapat dibedah (dikaji dan dianalisis) akar permasalahannya;
3. Untuk merancang strategi dan intervensi kebijakan yang tepat untuk membangun pemuda.

IPP menjadi amanat Perpres Nomor 43/2022 dan diharapkan menjadi acuan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan dengan *leading sector* Kemenpora. IPP disusun berdasarkan tiga kerangka yakni pertama kerangka pembangunan individu, kerangka pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan kerangka partisipasi dan diskriminasi. Kerangka tersebut mencakup aspek peran pemuda sebagai target (objek) dan pelaku (subjek) pembangunan. Dari kerangka tersebut, aspek pembangunan pemuda dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan total 15 (lima belas) indikator penyusun indeks.

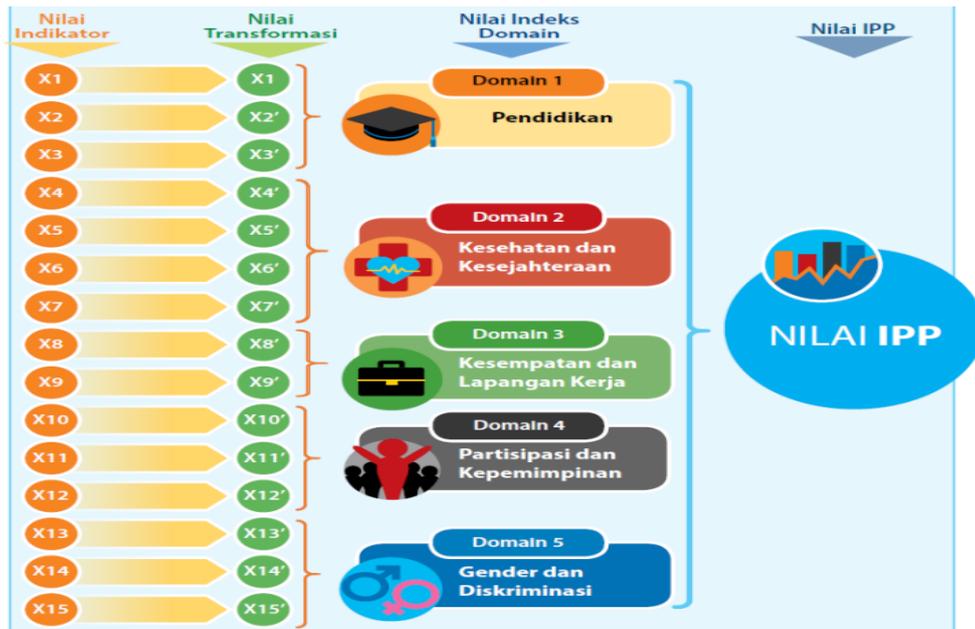
DOMAIN	NO	INDIKATOR	SUMBER DATA
Pendidikan	X1	Rata-rata Lama Sekolah	Susenas BPS, Maret 2022
	X2	APK Sekolah Menengah	Susenas BPS, Maret 2022
	X3	APK Perguruan Tinggi	Susenas BPS, Maret 2022
Kesehatan dan	X4	Angka Kesakitan Pemuda	Susenas BPS, Maret 2022

DOMAIN	NO	INDIKATOR	SUMBER DATA
Kesejahteraan	X5	Persentase Korban Kejahatan	Susenas BPS, Maret 2022
	X6	Persentase Pemuda yang Merokok	Susenas BPS, Maret 2022
	X7	Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil	Susenas BPS, Maret 2022
Lapangan dan Kesempatan Kerja	X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	Sakernas BPS, Agustus 2022
	X9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Sakernas BPS, Agustus 2022
Partisipasi dan Kepemimpinan	X10	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Susenas MSBP BPS 2021
	X11	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi	Susenas MSBP BPS 2021
	X12	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat	Susenas MSBP BPS 2021
Gender dan Diskriminasi	X13	Angka perkawinan usia anak	Susenas BPS, Maret 2022
	X14	Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	Susenas BPS, Maret 2022
	X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	Sakernas BPS, Agustus 2022

Tabel 3.4 Domain Pembangunan Pemuda dan Indikator Indeks

Pengukuran atau perhitungan IPP dilakukan melalui 4 tahapan proses yaitu :

1. Pengumpulan data sekunder
2. *Scoring* indikator/transformasi



Gambar 3.1 Scoring Indikator IPP

3. Perhitungan indeks per domain:

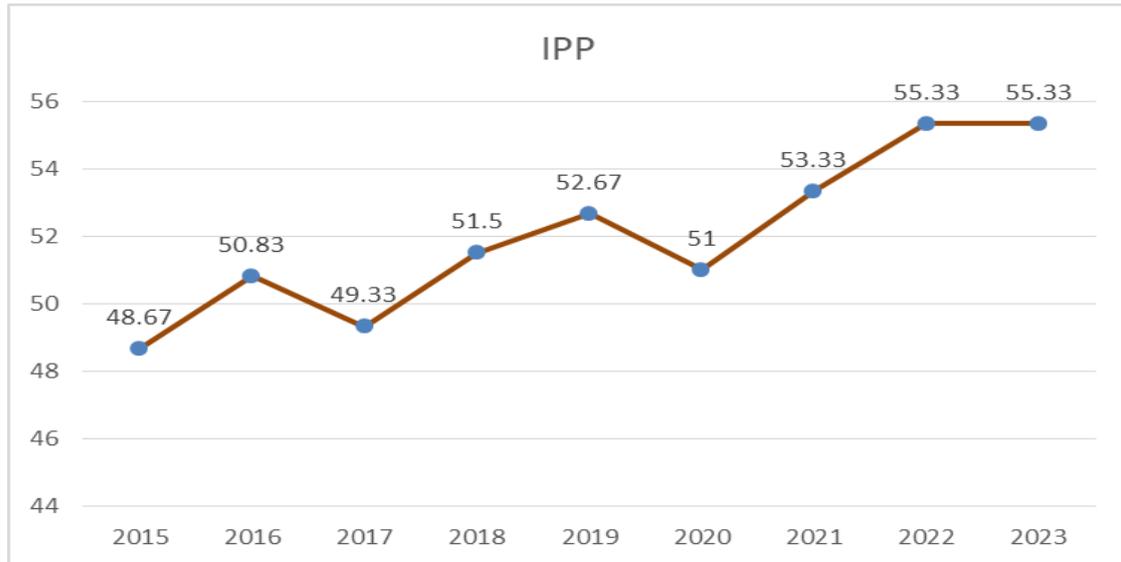
$$Indeks\ Domain_j = \frac{skor\ X1 + skor\ X2 \dots + skor\ Xn}{n} \times 10$$

4. Perhitungan Nilai IPP

Berdasarkan nilai indeks domain di atas, nilai IPP dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$IPP = \frac{Indeks\ Domain\ 1 + Indeks\ domain\ 2 + \dots + Indeks\ Domain\ 5}{5}$$

Berdasarkan tahapan tersebut diperoleh nilai IPP 2022 sebesar 55,33 dan hasil exercise IPP tahun 2023 sebesar 55,83, namun masih terdapat gap 0.82 dari target 2023 sebesar 56,65 maupun target 2024 sebesar 57,67. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2023 masih menunggu validasi hasil penilaian Tim Internal Kemenpora dan BPS.



Grafik 3.1 Capaian IPP 7 tahun terakhir

Secara Nasional capaian Indeks Pembangunan Pemuda dari tahun 2015 s.d 2022 mengalami fluktuasi dalam perolehan nilainya. Berdasarkan Laporan IPP tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran IPP tahun 2022 perolehan nilai IPP adalah 55,33, dengan capaian sebesar 97,66%. Indeks ini mengalami peningkatan dibandingkan IPP Tahun 2020 (51,00) dan Tahun 2021 (53,33), capaian peningkatan IPP Tahun 2023 didorong oleh peningkatan yang cukup tinggi pada Domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja. Tidak ada domain yang mengalami penurunan pada IPP 2022 dibandingkan IPP tahun sebelumnya. Domain pendidikan, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi memiliki nilai yang sama dengan IPP tahun 2021.

Melihat peningkatan IPP sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menjadi tahun saat pandemi Covid-19 dengan berbagai keterbatasan aktivitas menunjukkan jika pembangunan pemuda telah berada di jalur yang positif. Walaupun jika mengacu pada angka yang didapatkan, nilai ini masih jauh dari nilai tertinggi yaitu 100. Analisis dari pencapaian meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda adalah bahwa pengembangan SDM yang berdaya saing dan investasi nyata berkelanjutan di bidang kepemudaan sudah menjadi fokus utama pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 bahwa IPP ditetapkan sebagai tolok ukur pembangunan kualitas pemuda, urgensi dari optimalisasi capaian IPP tersebut adalah :

1. Penetapan IPP sebagai tolok ukur pembangunan pemuda dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2020-2024, RKP, Renstra dan Renja)
2. Indikator IPP menjadi indikator acuan dalam rancangan matrik RAN Pelayanan Kepemudaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan



Pelayanan Kepemudaan dimana target Kementerian/Lembaga (K/L) dan Provinsi telah ditentukan dengan jelas. K/L yang menjadi fokus kapasitas kelembagaan merupakan K/L mitra strategis dan provinsi yang menjadi fokus utama dilihat dari tematik program dan rekomendasi K/L mitra strategis.

3. RAN Pelayanan Kepemudaan akan menjadi rujukan dalam penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan di daerah, dan dalam penyusunan tersebut dilakukan pendampingan oleh Kemenpora dan Kemendagri
4. Telah terdapat Modul IPP terkait *Capacity Building* IPPP untuk pemerintah pusat dan daerah sehingga memberikan pemahaman terhadap IPP baik terkait dengan metode penghitungan, indikator penyusun sampai pada cara menurunkannya dalam program/kegiatan

Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pencapaian indeks pembangunan pemuda, yaitu :

1. Pertama, meningkatkan capaian masing-masing indikator pembangunan pada lima domain yang diukur dalam IPP. Pasca pandemi Covid-19, indikator capaian sudah menunjukkan peningkatan positif. Mayoritas indikator telah kembali ke tren yang sama, sebelum terjadinya pandemi Covid-19; dan
2. Kesenjangan capaian antara daerah dengan capaian tertinggi berbanding daerah dengan capaian terendah harus semakin dikurangi. Berkurangnya kesenjangan ini, menunjukkan semakin meratanya pembangunan pemuda di masing-masing daerah.

Hal ini menunjukkan semakin tingginya komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan generasi muda sebagai pilar penting pembangunan di daerah masing-masing. Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2022 mengalami peningkatan dibandingkan IPP tahun 2020 (51,00) dan tahun 2021 (53,33). Peningkatan IPP dalam dua tahun terakhir secara berturut turut mencapai dua poin.



Grafik 3.2 Capaian IPP per domain

Capaian IPP Indonesia ini tentu saja perlu diimbangi oleh perbaikan nilai IPP di sejumlah provinsi. Jika dibandingkan dengan capaian IPP Nasional, terdapat 10 Provinsi yang capaian IPP-nya lebih tinggi dibandingkan IPP Nasional. Provinsi tersebut yaitu DI Yogyakarta, Bali, Maluku Utara, Aceh, Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, dan Jawa Timur. Jika dilihat dari sebaran lokasi provinsi, hanya provinsi di Pulau Sulawesi yang tidak memiliki angka capaian IPP di atas angka Nasional. Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan capaian IPP tertinggi. Provinsi DI Yogyakarta mendapatkan angka IPP sebesar 67,50. Capaian ini lebih tinggi 12,17 dibandingkan IPP Nasional. Adapun provinsi dengan angka IPP terendah didapatkan oleh Provinsi Kalimantan Utara yaitu 49,67 atau lebih rendah 11,40 persen dibandingkan IPP Nasional.

No	Provinsi	IPP	Selisih dengan IPP Nasional	Persentase
1	DI Yogyakarta	67,50	12,17	18,03
2	Bali	62,17	6,84	11,00
3	Maluku Utara	59,17	3,84	6,48
4	Aceh	57,67	2,34	4,05
5	Papua	57,50	2,17	3,77
6	Kepulauan Riau	56,83	1,50	2,65
7	Kalimantan Timur	56,67	1,34	2,36
8	Maluku	56,67	1,34	2,36
9	Papua Barat	55,83	0,50	0,90
10	Jawa Timur	55,50	0,17	0,31
11	Sumatra Barat	55,17	-0,16	-0,30
12	Bengkulu	54,83	-0,50	-0,91

No	Provinsi	IPP	Selisih dengan IPP Nasional	Persentase
13	Nusa Tenggara Timur	54,33	-1,00	-1,83
14	Gorontalo	53,83	-1,50	-2,78
15	Jawa Tengah	53,83	-1,50	-2,78
16	Sulawesi Selatan	53,67	-1,66	-3,10
17	Sulawesi Utara	53,33	-2,00	-3,74
18	Sulawesi Barat	53,33	-2,00	-3,74
19	Lampung	53,00	-2,33	-4,40
20	Sulawesi Tenggara	53,00	-2,33	-4,40
21	Sulawesi Tengah	53,00	-2,33	-4,40
22	Kepulauan Bangka Belitung	52,67	-2,66	-5,06
23	Sumatera Utara	52,50	-2,83	-5,39
24	Nusa Tenggara Barat	52,50	-2,83	-5,39
25	Banten	52,17	-3,16	-6,06
26	Riau	52,17	-3,16	-6,06
27	Jambi	51,83	-3,50	-6,75
28	DKI Jakarta	51,50	-3,83	-7,44
29	Sumatera Selatan	51,33	-4,00	-7,79
30	Kalimantan Barat	50,33	-5,00	-9,93
31	Kalimantan Selatan	50,17	-5,16	-10,29
32	Kalimantan Tengah	50,00	-5,33	-10,66
33	Jawa Barat	49,67	-5,66	-11,40
34	Kalimantan Utara	49,67	-5,66	-11,40

Tabel 3.5 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Tahun 2023

Selanjutnya dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda, intervensi dan upaya Kemenpora dilakukan melalui:

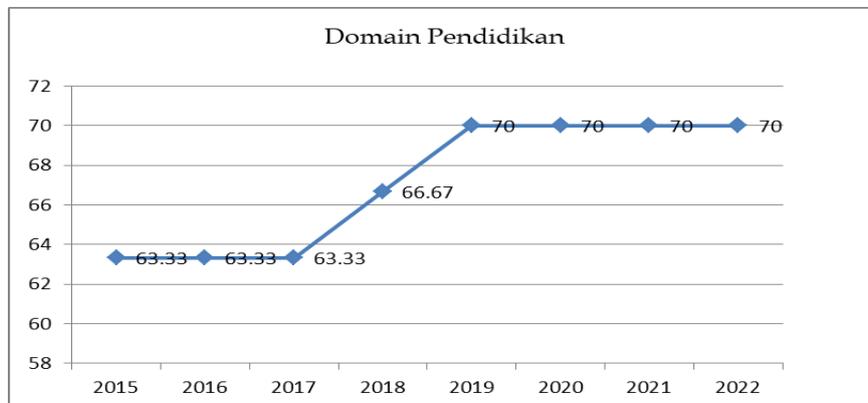
1. Koordinasikan kebijakan internalisasi IPP di lingkungan Kemenpora secara khusus; dan
2. Upaya peningkatan nilai IPP secara umum yang mengarah pada setiap indikator atau komponen pada IPP berupa:
  - a. pelaksanaan *capacity building*;
  - b. penguatan, koordinasi dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola dan *stakeholder* kepemudaan;
  - c. serta fasilitasi program dan kegiatan kepemudaan yang diarahkan sebagai *pilot project* untuk dipedomani daerah seperti Pelatihan Peningkatan Karakter Pemuda dalam era digital berupa pelatihan dengan materi keahlian digital dan materi mengenai pembangunan karakter pemuda yang unggul, program kader pemuda anti narkoba, Penumbuhan Minat Kewirausahaan di Kalangan Pemuda, pemuda mandiri membangun desa, forum organisasi kepemudaan

Upaya-upaya tersebut dijabarkan dalam analisa per domain IPP sebagai berikut :

### **Domain Pendidikan**

Domain pendidikan dalam IPP terdiri dari rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah dan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT). Kinerja domain pendidikan mencatatkan capaian tertinggi dibandingkan capaian domain lain. Walau menjadi tertinggi, capaian ini mengalami stagnasi sejak tahun 2019. Analisis peningkatan pada domain ini kalau kita melihat data statistik pemuda tahun 2023, adalah sebagai berikut:

- Secara umum, rata-rata lama sekolah pemuda Indonesia tahun 2023 sebesar 11,04 tahun, atau mampu menyelesaikan pendidikan sampai kelas XI pada jenjang Sekolah Menengah (SM)/ sederajat. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan rata-rata lama sekolah tahun 2022 yang mencapai 10,94 tahun.
- Tingkat pendidikan pemuda dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Pada tahun 2023, sebanyak 40,01 persen pemuda tamat SMA/ sederajat, 35,96 persen pemuda tamat SMP/ sederajat, dan 11,25 persen pemuda tamat perguruan tinggi. Sementara itu, sebanyak 12,80 persen pemuda menamatkan pendidikan jenjang SD/ sederajat ke bawah.



Grafik 3.3 Capaian Domain Pendidikan

Berdasarkan data statistik pemuda tahun 2023, hanya 11,25 persen pemuda yang menyelesaikan pendidikan hingga Perguruan Tinggi, melihat rendahnya angka tersebut Kementerian Pemuda Olahraga berupaya terus meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian terkait yaitu :

1. Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Perguruan Tinggi, Kemenko PMK;
2. Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud Ristek.

Selain koordinasi dan audiensi, Kemenpora juga mengupayakan program/kegiatan sebagai intervensi agar jumlah pemuda yang menamatkan Perguruan Tinggi meningkat melalui:

1. Diseminasikan informasi bantuan dan meningkatkan partisipasi pemuda terhadap perluasan akses pendidikan formal pemuda dan pencapaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Pemuda melalui Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan;
2. Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal Kepemudaan dalam memperkaya literasi tema kepemudaan di Indonesia yang berkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).



Gambar 3.2 Pengumuman Kelulusan Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan

Melalui sistem pendidikan yang baik diharapkan akan tercipta SDM pemuda yang unggul dan memajukan bangsa. Pengembangan dan pemberian bekal bekerja untuk pemuda tidak semua dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Pemberian bekal bekerja juga perlu difasilitasi melalui pelatihan nonformal dan informal.

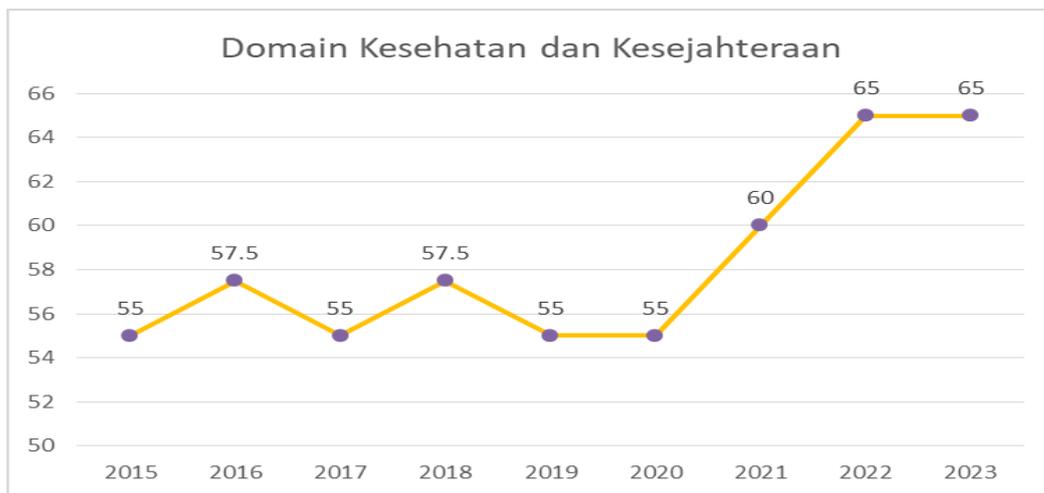
Melalui program *directive* Menteri Tahun 2023, Kementerian Pemuda dan Olahraga terus berupaya memberikan inovasi dan *rebranding* terhadap beberapa program pendidikan dan pelatihan non formal yaitu :

1. Membangun sarana prasarana Prestasi Hub yang dapat diakses Individu/Komunitas/ Organisasi Kepemudaan dengan berbagai kegiatan peningkatan keterampilan dan perluasan jaringan di Aceh, Makassar dan IKN;
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI memperkenalkan program *Sports Management School* (SMASH). Program ini menjadi bagian dari Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), SMASH tidak hanya memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam *sports management*, tapi juga membuka peluang magang untuk merasakan langsung pengalaman profesional di industri olahraga Tanah Air pilihan. Terdapat berbagai posisi untuk magang, seperti *Sports Event Management*, *Marketing in Sports*, dan *Sports Talent Agency*;

3. Komunitas Fest sebagai ajang pertemuan komunitas-komunitas yang berbasis hobi, isu, profesi, minat, bakat dan lainnya dengan format yang mendidik sekaligus menghibur melalui pelaksanaan event iptek dan imtaq dengan memetakan kerjasama antara BUMN maupun Lembaga Negara yang konsen terkait IPTEK seperti BRIN dan LAPAN BAPETEN maupun perusahaan swasta seperti Industri Otomotif, dan juga Kerjasama Universitas.

### **Domain Kesehatan Dan Kesejahteraan**

IPP domain kesehatan dibentuk oleh empat indikator, yaitu indikator angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Apabila dilihat dari status kesehatan, selama tahun 2023 terdapat sekitar 17,21 persen pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dengan angka kesakitan sebesar 6,24 persen. Jika dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya kedua indikator kesehatan ini mengalami penurunan.



Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Domain Kesehatan

Angka kesakitan pemuda terkait erat dengan Tingkat Kesehatan pemuda. Hasil analisis menunjukkan tren menurunnya angka kesakitan pemuda dari tahun 2022 sebesar 9,51 menjadi 6,24 pada tahun 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari situasi Covid-19 yang mereda dan ditetapkannya status Covid-19 semula pandemi menjadi endemic. Kedua kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya perbaikan layanan dan kondisi kesehatan pemuda Indonesia, khususnya setelah 3 tahun berjuang melawan pandemi Covid-19.

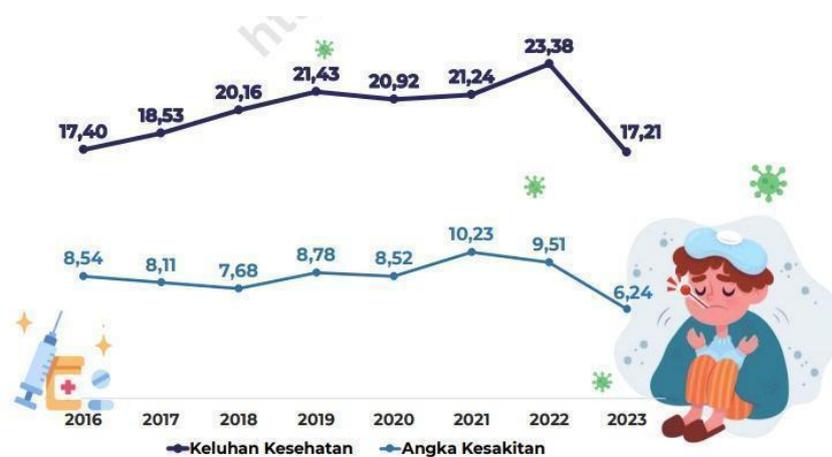
Terdapat tiga tantangan Kesehatan yang dihadapi pemuda Indonesia, yaitu :

1. perilaku seksual tidak sehat yang disebabkan oleh miskinnya kesadaran akan pengetahuan seksual, masalah kesehatan reproduksi, dan HIV/AIDS. Hal ini karena belum optimalnya informasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja

dan rendahnya pengetahuan dan layanan untuk kesehatan reproduksi, di mana sekitar 8,7% kaum muda usia 15-24 tahun di pedesaan belum terpapar informasi mengenai kesehatan reproduksi. Isu penting lainnya terkait hal ini adalah kehamilan yang tidak direncanakan pada usia remaja dan pemuda;

2. Kecanduan alkohol dan obat-obatan;
3. Penyakit mental seperti depresi.

Selanjutnya, potensi peningkatan *sedentary lifestyle* selama pandemi yang dapat meningkatkan beban kesehatan fisik (obesitas) dan kesehatan mental (*burn out*) di kalangan pemuda.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016-2023

Grafik 3.5 Persentase Pemuda menurut Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan tahun 2016-2023

Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan perhatian terhadap tindak lanjut Isu Kesehatan Pemuda dengan melaksanakan beberapa program kegiatan terkait Kesehatan Pemuda yaitu :

1. Sosialisasi Penyadaran Pemuda terhadap Perilaku Destruktif (Seks Beresiko, Pernikahan Dini, HIV/AIDS, Pornografi, Pornoaksi dan *Human Trafficking*)
2. Pelatihan KIPAN dan Mengurangi Prevalensi Merokok di Kalangan Pemuda  
Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan salah satu program prioritas yaitu revolusi mental bidang pencegahan bahaya destruktif anti narkoba dengan membentuk Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN). Sampai Tahun 2023, kepengurusan KIPAN telah ada di 22 provinsi di Indonesia, Kemenpora mendorong agar kepengurusan KIPAN dapat tersebar di seluruh pelosok negeri dan dapat lebih berkontribusi untuk mengajak lingkungan menjauhi narkoba. Kontribusi ini dapat dilakukan lewat sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah sehingga kader KIPAN diharapkan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan penggerak isu parenting

- untuk mendorong penguatan peran keluarga dalam pola pengasuhan yang menanamkan karakter integritas dan anti narkoba
3. Kebijakan *Youth Mental Health Center* (YMHC) sebagai bagian dari konsep Olah Rasa yang digagas oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Kajian ini diharapkan menjadi dokumen pendukung dalam merumuskan strategi yang tepat sasaran dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh pemuda Indonesia, melalui strategi pembentukan YMHC secara kebijakan dapat diturunkan sampai ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. YMHC ini diharapkan menjadi sarana pemuda untuk dapat mencurahkan seluruh permasalahan dan kesulitan dalam menghadapi tantangan dan hambatan hidup agar selalu terhindar dan terjerumus pada faktor yang merusak/destruktif. Konsep besar YMHC yang bisa diimplementasikan juga di daerah serta mendapatkan dukungan dan juga harapan yang besar agar dapat diadvokasi di daerah supaya kebijakan ini dapat secara menyeluruh di daerah.

### **Domain Lapangan Dan Kesempatan Kerja**

Domain lapangan dan kesempatan kerja pada Indeks Pembangunan Pemuda merupakan cerminan kondisi aktivitas transaksi ekonomi pemuda yang diwakilkan oleh wirausaha kerah putih pemuda dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda.

Indikator wirausaha kerah putih (*white collar*), meningkat dari 0,41% pada tahun 2021 menjadi 0,48% pada tahun 2022. Saat ini, penumbuhan kewirausahaan pemuda adalah salah satu strategi dalam mendorong pertumbuhan transaksi ekonomi karena saat ini jumlah wirausahawan Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain. Rasio kewirausahaan Indonesia hanya 3,47%, lebih rendah dari Singapura (8,76%) dari total penduduk. Sedangkan Malaysia dan Thailand sudah di atas 4,5%. Bahkan di negara maju rata-rata sudah 10-12%. Demikian pula TPT Pemuda yang mengalami penurunan dari 14,42% pada tahun 2021 menjadi 13,93% pada tahun 2022. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,9 juta orang pada Februari 2023. Angka tersebut mencakup 5,45% dari total angkatan kerja dalam negeri yang tidak terserap di pasar kerja. Pada Februari 2023 mayoritas pengangguran terbuka berusia 20-24 tahun, yakni 2,39 juta orang, maka perlu program yang berkelanjutan dalam penciptaan lapangan dan kesempatan kerja melalui berbagai cara salah satunya adalah kewirausahaan pemuda.

Tantangan yang saat ini dihadapi terkait kebijakan kewirausahaan pemuda adalah belum adanya data spesifik mengenai kewirausahaan pemuda, walaupun

program-program relevan kewirausahaan pemuda sudah dijalankan. Pemerintah sudah berupaya membangun pola pikir kewirausahaan disertai bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha. Untuk itu Kemenpora juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga pelatihan kewirausahaan, dan komunitas kewirausahaan, untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda. Kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Kerja sama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kewirausahaan.
- b. Kerja sama dalam penyediaan materi dan metode pelatihan kewirausahaan.
- c. Kerja sama dalam diseminasi informasi tentang kewirausahaan.

Selain itu juga untuk meningkatkan rasio kewirausahaan Indonesia yang hanya 3,47%, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan branding program kewirausahaan pemuda, hal ini dikarenakan setelah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan, ditemukan :

1. Program WMP pada dasarnya cukup bagus dan sangat relevan dalam mendorong kaum muda terdidik untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan melalui kegiatan usaha produktif. Bukan saja bermanfaat bagi peserta sendiri dalam meningkatkan sumber mata pencahariannya, melainkan juga dapat bermanfaat dan berdampak dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan ternyata program WMP belum cukup maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Hal ini dikarenakan: (a) banyaknya proposal masuk tetapi tidak diimbangi dari segi kualitas isi proposal akibat kurangnya sosialisasi, (b) simpul- simpul seleksi peserta selama ini terbatas pada lingkungan tertentu dan belum menjangkau yang lebih luas.
2. Hasil dan manfaat dari program WMP terutama yang telah mendapat fasilitasi dari Kementerian secara kuantitas belum banyak yang berhasil hal ini ditandai dengan gagalnya unit-unit usaha pemula untuk mandiri sebagai basis sumber pendapatannya.
3. Sebagai program prioritas Kementerian dan sekaligus program nasional dalam meningkatkan produktivitas kaum muda di bidang kewirausahaan sebaiknya:
  - (a) Kementerian memperluas lokasi sosialisasi program WMP baik di Universitas, Perguruan Tinggi Vokasi dan Lembaga Training serta komunitas,
  - (b) meningkatkan pendampingan dan memperluas akses kepada peserta WMP yang mendapat fasilitas program,
  - (c) memperluas program-program inkubator bisnis di beberapa tempat yang memiliki kelayakan teknis dan bisnis

Urgensi dari *branding* program kewirausahaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran kewirausahaan melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku wirausaha.
2. Meningkatkan kemampuan membangun model dan strategi usaha yang baik.
3. Memfasilitasi pemuda dalam memulai usaha
4. Membangun ekosistem Kewirausahaan Pemuda.

Capaian ini didukung oleh program Kementerian Pemuda dan Olahraga yang digambarkan dalam identifikasi strategi dan dampaknya ke dalam tabel dibawah:

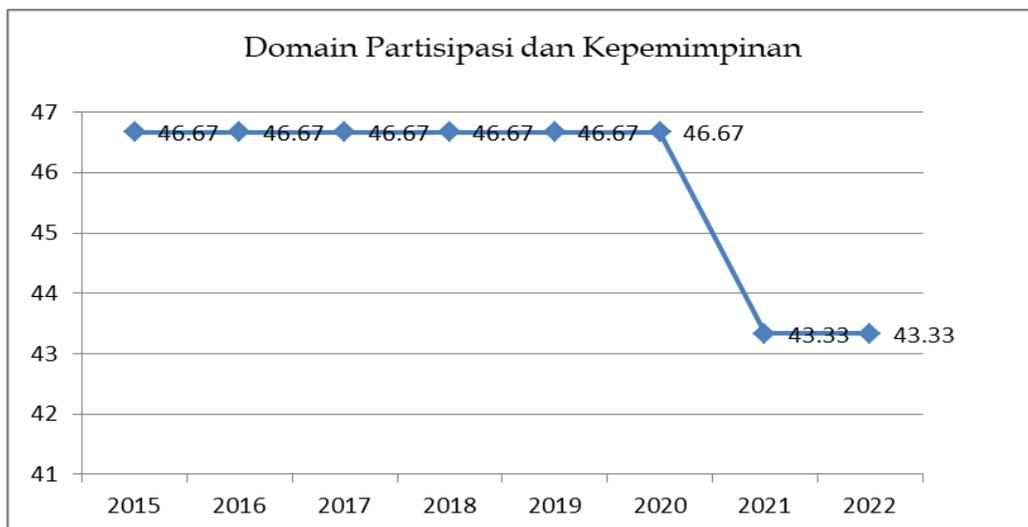
NO	STRATEGI KEBIJAKAN /PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	DAMPAK
1	Program dukungan Akses permodalan bagi wirausaha muda	Fasilitasi akses permodalan untuk wiramuda pemula.	Meningkatkan produktivitas dan omzet wirausaha muda
2	Program fasilitasi <i>pitch deck</i> bagi wirausaha muda berprestasi.	1. Koordinasi dengan Kemen Investasi/BKPM 2. Bimtek <i>pitch deck</i> 3. Temu dengan calon investor	5 Wiramuda berprestasi mendapatkan modal usaha ( <i>Venture Capital</i> ) dari Investor senilai lebih dari 6 Miliar.
3	Program pendampingan ekosistem kewirausahaan pemuda di daerah	1. Penguatan koordinasi dan interaksi untuk pembentukan Tim kolaborasi antar OPD/SKPD 2. <i>Knowledge sharing</i> dan FGD tentang ekosistem kewirausahaan pemuda	Meningkatnya program kolaborasi antar OPD untuk meningkatkan nilai indeks Pembangunan Pemuda di daerah tahun 2023 di 4 kab/kota sebagai pilot projects yang ada di provinsi Papua, Jawa Timur, NTT dan Kalimantan Selatan
4	Peningkatan kompetensi melalui pemagangan <i>e-commerce /live-commerce</i>	Fasilitasi magang untuk <i>e-commerce/live-commerce</i>	1. Meningkatkan akses pasar dan pemasaran secara maksimal melalui dunia digital ( <i>digital environment</i> ) 2. Meningkatkan 60 pemuda yang dilatih magang sebagai <i>Host, Store management, IT Management, Advertising</i>
5	Peningkatan Minat Kewirausahaan Pemuda di Daerah	Kuliah Kewirausahaan Pemuda Penumbuhan Minat Kewirausahaan Pemuda. Fasilitasi NIB	Bertambahnya pemuda yang berminat berwirausaha ( <i>job creator</i> ) daripada mencari kerja ( <i>job seeker</i> ) dengan sosialisasi di 38 PTN/PTS 13Prop/Kab/Kota
6	Peningkatan pembinaan komunitas kewirausahaan pemuda	Fasilitasi Sentra Kewirausahaan Pemuda. Fasilitasi Pesantren Preneur	Penguatan kompetensi pemuda binaan komunitas dan santri dalam berwirausaha

NO	STRATEGI KEBIJAKAN /PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	DAMPAK
7	Program Booth Camp / Gelar produk	Pameran / gelar produk wiramuda pemuda	Memastikan semua mahasiswa yang mendapat akses permodalan untuk dapat menggelar produknya
8	Program Apresiasi Wiramuda Berprestasi	Apresiasi untuk 5 kategori ( <i>teknopreneur, industri kreatif, sociopreneur, religion preneur, penggerak</i> )	Meningkatnya semangat dan motivasi wiramuda berprestasi. Menjadi Inspirasi bagi wirausaha di kalangan pemuda
9	Perumusan kebijakan untuk mendukung penguatan kewirausahaan pemuda	Perumusan kebijakan untuk mendukung kewirausahaan pemuda	Mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan pemuda

Tabel 3.6 Identifikasi Strategi Kewirausahaan

### **Domain Partisipasi Dan Kepemimpinan**

Domain partisipasi dan kepemimpinan terdiri dari tiga indikator yang bersumber dari Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan tiga tahun sekali, yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Sehingga, data yang tersedia untuk ketiga indikator pada domain ini adalah data tiga tahunan.



Grafik 3.6 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Dari ketiga indikator tersebut, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan memberikan kontribusi paling besar bagi nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan, dengan nilai transformasi 9, Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan pada tahun 2022 mencapai 81,36.

Komponen penting dalam meningkatkan partisipasi pemuda dapat dilakukan melalui pendekatan bahwa Pembangunan harus bermanfaat bagi pemuda melalui 3 cara, yakni: melibatkan pemuda sebagai penerima manfaat, sebagai mitra dan pemuda sebagai pemimpin sehingga harapannya keterlibatan pemuda menjadi bermanfaat dan bermakna.

Untuk meningkatkan pencapaian indikator pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan :

- 1) Menjalinkan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana khususnya Badan Diklat BNPB sebagai mitra strategis dalam kaitannya dengan program sukarelawan yaitu inisiasi program *Collab rangers* sebagai program pelatihan bersertifikasi yang melibatkan berbagai elemen kepemudaan (Pramuka, Karang Taruna, OKP dan komunitas lainnya) ;
- 2) Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berinisiasi suatu hub, yang berisi seluruh data base seluruh anak muda yang menyukai sukarelawan dan juga menyambungkan dengan even-even yang bersifat sosial, seni budaya, serta tanggap bencana
- 3) Pengembangan partisipasi pemuda melalui berbagai fasilitasi pelatihan dan juga pengembangan komunitas pemuda melalui program :
  - a) Pepelelingasih
  - b) Pelatihan Pemuda Maritim, Pelatihan Petani Millennial, Pelatihan Pemuda Pariwisata, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)
  - c) Forum Pengembangan Kemitraan Pemuda dan Bantuan Event-Event dan Pengiriman Delegasi Meeting Kepemudaan Tingkat Nasional

Selain itu juga peningkatan partisipasi pemuda pada forum internasional dan pertukaran pemuda antar negara diantaranya melalui :

- a) Fasilitasi Pengiriman Delegasi pada Event-Event : *14th China ASEAN Youth Campus, ECOSOC Youth Forum 2023, Global Youth Summit, ASEAN Youth Dialogue, ASEAN Youth Interface with ASEAN Leader, MIKTA Young Leaders Camp, the 4th Asean-India Youth Summit "Strengthening Asean India Partnership In The Indo-Pacific"*
  - b) Fasilitasi pemuda kader dalam pertukaran pemuda antar negara yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun 2023 ini dilaksanakan Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia, Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea, Pertukaran Pemuda Indonesia-Singapura, Kapal Pemuda Asean-Jepang (SSEAYP)
- 4) Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga juga dijadikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan partisipasi pemuda dan juga ajang pemuda dalam menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Hal ini karena Kemenpora ingin

menjadi rumah yang ramah bagi para pemudanya serta menularkan semangat sinergitas antara sesama pemuda. Hal ini diwujudkan dengan beberapa kegiatan yang rutin diadakan Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti :

- a) Festival Pemuda Indonesia;
  - b) Program Muda Memilih yaitu program pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan partisipasi politik pemuda di berbagai komunitas melalui kegiatan Wakai Fest, Festival Muda Memilih, *Warga in Progress : Your Voices Matter*. Program-program tersebut sukses membangkitkan animo pemuda untuk peduli politik;
  - c) Pesta Prestasi.
- 5) Menguatkan peran pemuda dengan berupaya melakukan pembinaan organisasi kepemudaan dengan mengadakan forum organisasi kepemudaan, fasilitasi kegiatan Organisasi Kepemudaan dan bantuan lembaga kepramukaan sebagai bentuk penguatan organisasi kepemudaan.



Gambar 3.3 Pelatihan Penguatan Organisasi

- 6) Kementerian Pemuda dan Olahraga juga rutin memberikan apresiasi penghargaan kepada pemuda berprestasi maupun yang sudah berkontribusi dan mengambil peran dalam pembangunan baik melalui pemberian penghargaan maupun melalui publikasi di IG Kemenpora terkait kisah

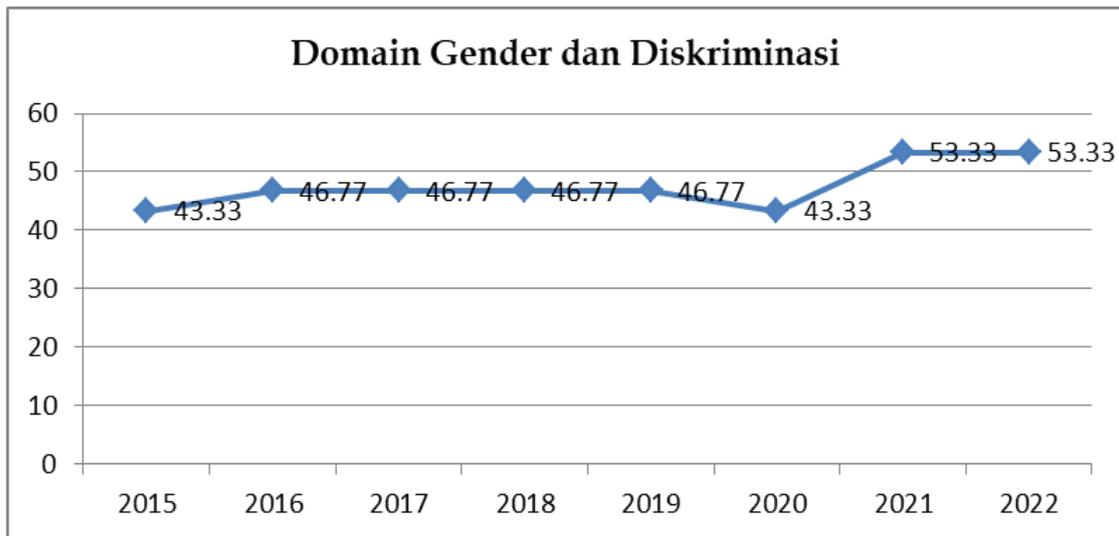
inspirasi dari para pemuda yang berani memimpin perubahan sebagai bentuk ajakan motivasi bagi pemuda lainnya



Gambar 3.4 Penghargaan Pemuda Tahun 2023

### Domain Gender Dan Diskriminasi

Domain gender dan diskriminasi menggunakan indikator angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi, serta persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Dari perhitungan ketiga indikator ini didapati jika domain gender dan diskriminasi memiliki nilai yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu, 53,33%.



Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Domain Gender dan Diskriminasi

Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan capaian tertinggi pada Domain Gender dan Diskriminasi. DI Yogyakarta mendapatkan angka 76,67, di mana angka ini lebih tinggi 23,34 poin atau setara 43,76% dibandingkan capaian Nasional. Di peringkat kedua dan ketiga terdapat DKI Jakarta dan Bali yang mengumpulkan angka sama yaitu 66,67. Angka ini lebih tinggi 13,34 poin atau setara 25,01% dari capaian Nasional. Adapun Provinsi Papua mendapat nilai terendah yaitu 36,67. Angka ini lebih rendah 16,66 poin (-31,25%) dari nilai Nasional. Di atas Papua terdapat provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah yang mendapatkan angka 40,00 atau lebih rendah 13,33 poin (-25%) dari capaian Nasional.

Untuk meningkatkan pencapaian indikator pada domain Gender dan Diskriminasi Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan intervensi melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN), dimana Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) bertujuan untuk memastikan partisipasi yang luas, mendengar berbagai perspektif dan mencapai kesepakatan yang memadai untuk kemajuan kepemudaan nasional. Adapun K/L yang berkoordinasi, responsif maupun yang terlibat dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) salah satunya ialah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan karena Anak, Perempuan dan Pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka.

### **Strategi Peningkatan Nilai IPP**

Strategi dan upaya yang perlu dilakukan agar pencapaian nilai IPP yang menggambarkan pembangunan kepemudaan terus meningkat adalah melalui sinergi Pusat dan Daerah dapat didukung dengan metode kolaborasi Penta Helix yang melibatkan multisektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi/praktisi, dunia usaha, komunitas, dan media, diantaranya :

- 1) Penguatan Peran dan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
  - a) Penguatan sinergitas Tim Koordinasi di tingkat pusat untuk integrasi program/kegiatan sesuai tugas dan kewenangan.
  - b) Advokasi yang berkelanjutan di tingkat pusat-daerah dengan memperhatikan perspektif pemuda serta situasi khusus dan darurat lainnya untuk memperkuat komitmen.
  - c) Penguatan peran pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyusun:
    - i) Perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional, termasuk RAD.
    - ii) Pemantauan dan evaluasi serta menjangkau praktik baik implementasi program kepemudaan
- 2) Keberlanjutan Pendampingan dan Fasilitasi yang Efektif;
  - a) Peningkatan kompetensi dan kapasitas pemangku kepentingan.
  - b) Kolaborasi dengan perguruan tinggi setempat dan lembaga non pemerintah, termasuk dalam mengembangkan pelatihan tematik kepemudaan berdasarkan kebutuhan daerah, pendampingan, dan pengelolaan pengetahuan.
- 3) Pengembangan Kapasitas
  - a) Peningkatan kapasitas SDM pelaksana di daerah, termasuk kapasitas teknis dan pengelolaan program kepemudaan.
  - b) Penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu menyusun perencanaan berbasis data, mulai dari analisa situasi, sampai dengan tersusun dan terintegrasinya dokumen perencanaan dan penganggaran terintegrasi untuk kepemudaan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).
  - c) Penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Kab/Kota, dan mendorong keterlibatan pemuda, organisasi & komunitas pemuda, termasuk kelompok pemuda yang rentan dalam perencanaan serta pemantauan program.
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Inovasi Daerah
  - a) Identifikasi kebutuhan data daerah & data yang telah tersedia sehingga dapat disusun prioritas kegiatan dan potensi intervensi yang harus dilakukan di masing-masing daerah.

- b) Pada saat melakukan proses perencanaan terintegrasi, perlu memberdayakan sarana integrasi yang sudah ada di daerah, seperti inisiatif penghitungan IPP Desa oleh IPB, inkubator bisnis untuk wirausaha, dsb.
- 5) Memastikan keberlanjutan penghitungan dan penyediaan Indeks Pembangunan Pemuda di masa mendatang:
  - a) Mekanisme kerjasama dan tindak lanjut atas penghitungan maupun proyeksi untuk IPP
  - b) Menyepakati pihak pelaksana, serta pembagian kewenangan dan pengelola anggaran IPP
  - c) Penyempurnaan metodologi dan proyeksi IPP
- 6) Penyelesaian NSPK Kepemudaan dan Permenpora terkait IPP.

## 1.2 TINGKAT KUALITAS PELAKSANAAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR PELAYANAN KEPEMUDAAN

SASARAN STRATEGIS : TERWUJUDNYA PEMUDA YANG BERIDEOLOGI PANCASILA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING						
INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan Kepemudaan	n.a	n.a	82	78	86,89	111,39

Tabel 3.7 Capaian Indikator Tingkat Koordinasi Lintas Sektor 2023

Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan adalah penggambaran kualitas koordinasi lintas sektor yang diselenggarakan oleh Kemenpora sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan pelayananan kepemudaan yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek substansi, aspek teknis, dan aspek efektivitas. Aspek Substansi mengacu pada kebijakan, program dan manfaat. Aspek Teknis mengacu pada Persiapan, Fasilitas dan Pelaksanaan. Aspek Efektivitas mengacu pada upaya dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil pengolahan Evaluasi Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi yang diselenggarakan telah mencapai nilai **86,89**. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh unit kerja pada lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mencerminkan bahwa dari struktur kualitas (kebijakan, program dan manfaat), teknis pelaksanaan koordinasi maupun tindak lanjut koordinasi tergolong dalam kategori **Sangat Baik**.

Indikator Kinerja Program Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan diukur dengan menghitung hasil pengolahan

kuesioner Tingkat Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor. Survei ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Memetakan dan mengetahui kualitas koordinasi antara Kemenpora dengan K/L dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan
2. Menyusun strategi penguatan dan percepatan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan berdasarkan hasil identifikasi agar menghasilkan kinerja dan kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Survei berupa pengisian kuesioner ini berlangsung di bulan Oktober - Desember dengan jumlah responden sebanyak 34 yang terdiri dari 17 K/L dan 17 Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun komponen yang menjadi penilaian dalam survei kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan nilai total dari 34 responden dengan angka maksimal 170, adalah sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN SURVEY	NILAI TOTAL
<b>A</b>	<b>Kebijakan Program dan Manfaat</b>	
1.	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan strategis	151
2.	Pelaksanaan koordinasi dirasakan manfaatnya oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	146
3.	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor mendukung pencapaian target output dan outcome bidang kepemudaan dalam RPJMN/RPJMD	151
4.	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang terumus dalam matriks RAN/RAD pelayanan kepemudaan	148
5.	Kebijakan dan/atau program/ kegiatan yang dihasilkan melalui koordinasi lintas sektor dapat menjawab permasalahan atau isu kepemudaan di tingkat pusat dan daerah	146
6.	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor menciptakan sinergitas program dan kegiatan kepemudaan	149
7.	Kebijakan hasil pelaksanaan koordinasi dirasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat khususnya pemuda	147
<b>B</b>	<b>Teknis Pelaksanaan Koordinasi</b>	
1.	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan dilaksanakan secara berkala dan terjadwal	150
2.	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan selalu dilaksanakan dengan baik, jelas, terencana dan menghasilkan output kegiatan	150
3.	Prosedur/alur dalam koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan mudah dilakukan	145
4.	Kebijakan teknis penyelenggaraan koordinasi jelas, dipahami dan	146

NO.	KOMPONEN SURVEY	NILAI TOTAL
	dapat dilaksanakan oleh stakeholder kepemudaan	
5.	Pelaksana koordinasi lintas sektor merespon setiap permohonan koordinasi terkait isu-isu strategis yang diajukan oleh K/L/D	144
6.	Pelaksana koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan memahami substansi dan mampu menyampaikan materi dengan baik	147
7.	Sarana dan Prasarana pelayanan memadai, lengkap dan layak digunakan	147
8.	Tugas dan fungsi Sekretariat tim koordinasi Nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan berjalan baik dan optimal	147
9.	Pelaksana koordinasi lintas sektor bertanggung jawab dan berintegritas dalam pelayanan koordinasi	147
10.	Pelaksana koordinasi lintas sektor memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh stakeholder dalam pelayanan koordinasi	148
11.	Pelaksana koordinasi lintas sektor tidak pernah menerima pemberian imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku	148
<b>C</b>	<b>Tindak Lanjut Pelaksanaan Koordinasi</b>	
1.	Hasil pelaksanaan koordinasi lintas sektor dirumuskan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pimpinan K/L/D	149
2.	Hasil rapat koordinasi lintas sektor ditindaklanjuti oleh K/L/D	148
3.	Hasil kesepakatan bersama koordinasi lintas sektor dilaksanakan secara konsisten oleh K/L/D	148

Tabel 3.8 Survei Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor

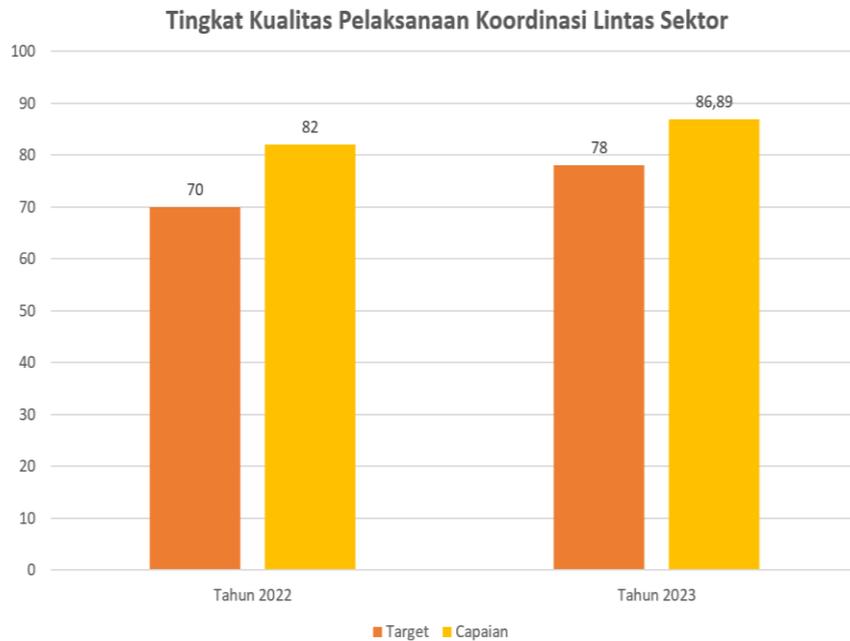
Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, nilai total per komponen yang ada di dalam tabel akan menjadi inti dalam rumus perhitungan Nilai Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

$$\text{Nilai Kualitas Koordinasi Lintas Sektor} = \frac{\text{Rata-rata Nilai Per Komponen Survei}}{\text{Jumlah Komponen Survei}} \times 20$$

Metode Pengukuran dalam menghitung tingkat kualitas koordinasi lintas sektor menggunakan instrument (kuesioner) yang dikumpulkan dari *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan koordinasi dengan nilai indeks skala ukur 1-5 yang dirata-ratakan dan dikonversi rentang interval sebagai berikut:

20 - 36	Sangat Tidak Baik
36,1 - 52	Tidak Baik
52,1 - 68	Cukup Baik
68,1 - 84	Baik
84,1 - 100	Sangat Baik

Target Kinerja indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 78 (Kategori Baik) dengan realisasi nilai 86,89 (Kategori Baik) atau mencapai 111% dari target tahun 2023. Berikut perbandingan dari Indikator kinerja Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor dalam dua tahun pelaksanaannya dalam Grafik dibawah.



Grafik 3.8. Tingkat Kualitas pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan grafik di atas, capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Kemenpora berupa kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan dan Pendampingan RAN/RAD Tingkat Provinsi Tahun 2023 dalam program Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Kepemudaan Pusat dengan Daerah. Jika ditilik lebih lanjut, pencapaian keberhasilan ini berasal dari upaya Kemenpora dalam melaksanakan amanah Perpres 43 tahun 2022 yang diwujudkan melalui :

### 1. Rapat Tingkat Menteri

Rapat Tingkat Menteri (RTM) telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 30 Mei 2023 dan 25 Januari 2024. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kepemudaan dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kepemudaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan.



Arahan strategis Wakil Presiden yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Indonesia mencapai 13,93% pada 2022, artinya sekitar 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. Fokus mengatasi kendala di dalam penyelenggaraan kepemudaan, salah satunya kendala dalam rencana aksi Pelayanan Kepemudaan. Rencana aksi ini harus disusun dari tingkat nasional, hingga di tiap provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- c. Perlu ada langkah-langkah strategis dan ini diperlukan keterlibatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk akselerasi penyusunan Rencana Aksi Daerah di semua Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Koordinasi strategis lintas sektor diharapkan dapat berjalan efektif terutama dalam meningkatkan pelayanan kepemudaan, Wakil Presiden mengingatkan bahwa pascapandemi harus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan target IPP dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 57,67 di tahun 2024;
- e. Pada tahun 2021, IPP Indonesia mencapai 53,33, dengan adanya peningkatan nilai indeks pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan dan domain Gender dan Diskriminasi. Sementara pada domain Pendidikan dan Lapangan Kerja nilai indeksnya tetap dan terjadi penurunan pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Trend kenaikan nilai indeks IPP merupakan hal yang positif dan sebagai acuan untuk terus meningkatkan sesuai target 2024. Salah satu strategi untuk mencapai target IPP adalah keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pencapaian pembangunan pemuda di daerah. Target IPP secara nasional tidak akan tercapai tanpa pencapaian pembangunan pemuda di semua daerah;
- f. Komitmen kementerian dan lembaga sebagai Tim Pelaksana pada Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kepemudaan (TKNPK);
- g. Wakil Presiden memberi mandat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengawal pelaksanaan program kepemudaan ini agar berjalan sesuai dengan target. Pemantauan dan evaluasi juga perlu terus dilakukan secara terpadu dan berkala sehingga dapat diukur kualitas, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya;



Gambar 3.5 Dokumentasi Rapat Tingkat Menteri terkait Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan

## 2. Pembentukan Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan

Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi lintas K/L telah dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang terdiri dari 28 K/L dan 4 Kementerian Koordinator. Selanjutnya anggota Tim Koordinasi Nasional (TKN) dibagi ke dalam kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yaitu domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Masing-masing anggota pokja bertugas untuk memastikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui Matriks RAN Pelayanan Kepemudaan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 2 (dua) kali rapat kelompok kerja yaitu:

- a. Rapat kelompok kerja tanggal 17 Mei 2023, bertempat di Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Ancol Jakarta. Tujuan rapat untuk membahas persiapan Rapat Tingkat Menteri (RTM);
- b. Rapat kelompok kerja tanggal 26 - 28 Oktober 2023, bertempat di Hotel Shalva Tanah Abang Jakarta. Tujuan rapat untuk koordinasi, sinkronisasi,

dan optimalisasi dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antar Kementerian/Lembaga berdasarkan domain yang telah ditetapkan.



Gambar 3.6 Dokumentasi Rapat Pelayanan Kepemudaan antar K/L

Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan melaksanakan tugas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas tim pelaksana koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, telah dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Koordinasi berdasarkan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 124 Tahun 2023 tentang pembentukan sekretariat tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 4 (Empat) kali rapat sekretariat tim koordinasi, sebagai berikut:

- a. Rapat sekretariat tim koordinasi tanggal 24 Maret 2023, bertempat di ruang rapat lt.3, Gedung Graha Kemenpora, tujuan rapat untuk membahas tugas dan fungsi tim sekretariat serta persiapan Rapat Tingkat Menteri (RTM);
- b. Rapat sekretariat tim koordinasi tanggal 21 Juni 2023 melalui Zoom Meeting, tujuan rapat untuk membahas tugas pokok dan rencana kerja tim sekretariat dan tim kelompok kerja penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- c. Rapat sekretariat tim koordinasi tanggal 29 September 2023 melalui Zoom Meeting, tujuan rapat untuk membahas teknis persiapan rapat kelompok

- kerja tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan target penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) K/L;
- d. Rapat sekretariat tim koordinasi tanggal 25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting, tujuan rapat untuk membahas teknis persiapan rapat kelompok kerja tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

## 2. Pembentukan Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota Pelayanan Kepemudaan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Berikut adalah pembagian tugas tim koordinasi daerah. Tim koordinasi daerah provinsi/kabupaten/kota terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, tim sekretariat, dan tim kelompok kerja. Gubernur/bupati/wali kota sebagai penanggungjawab koordinasi strategis daerah melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan kepemudaan kepada ketua pelaksana tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, yang dalam hal ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga.



Gambar 3.7 Dokumentasi Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Gorontalo

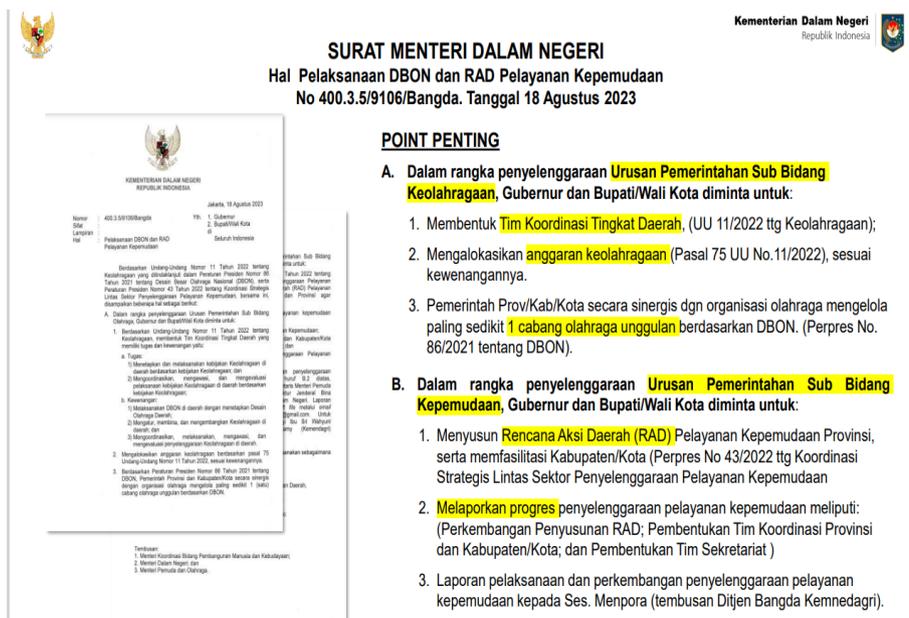
## 3. Melakukan akselerasi penyusunan RAD melalui Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RAD pelayanan kepemudaan

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan sebagai panduan atau arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan berupa dokumen yang memuat indikator sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas kepemudaan.

Selain itu RAD juga menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan.



Gambar 3.8 Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kepemudaan Provinsi NTB



Gambar 3.9 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Desain Besar Olahraga Nasional sesuai permohonan dari Kemenpora

Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RAD adalah salah satu upaya agar koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan ini benar-benar dapat diimplementasikan hingga Tingkat Kabupaten/Kota melalui:

- Melaksanakan Sosialisasi penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan pada beberapa event kepemudaan;

2. Memberikan konsultasi kebijakan kepemudaan, implementasi koordinasi lintas sektor penyusunan RAD;
3. Pendampingan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Aceh, Lampung dan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pemberian insentif program untuk mendorong agenda pelayanan kepemudaan di daerah oleh unit-unit kerja di Kemenpora;
5. Pemberian apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah selesai menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan;
6. Pemberian apresiasi terhadap pemerintah daerah dengan capaian IPP tertinggi.

Pada tahun 2023 tercatat ada 28 provinsi dan 3 kabupaten/kota yang telah melakukan penyusunan RAD Kepemudaan. Berikut perbandingan jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan tahun 2021 - 2023.

Jumlah Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan	
2023	28 Provinsi, 3 Kab/Kota
2022	18 Provinsi
2021	8 Provinsi

Tabel 3.9 Jumlah Provinsi yang melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan setiap tahun

No	Provinsi	Status Penyusunan RAD	Tim Koordinasi
1	Sumatera Utara	Selesai	√
2	Sumatera Barat	Selesai	√
3	Riau	Selesai	√
4	Bangka Belitung	Selesai	√
5	Banten	Selesai	√
6	Jawa Barat	Selesai	√
7	Jawa Timur	Selesai	√
8	Kalimantan Selatan	Selesai	√
9	Kalimantan Timur	Selesai	√
10	Kalimantan Utara	Selesai	√
11	Sulawesi Tengah	Selesai	√



No	Provinsi	Status Penyusunan RAD	Tim Koordinasi
12	Kota Baru	Selesai	√
13	Kabupaten Bengkulu	Selesai	√
14	Kota Malang	Selesai	√
15	Aceh	Proses Penyusunan	√
16	Sumatera Selatan	Proses Penyusunan	√
17	Kepulauan Riau	Proses Penyusunan	√
18	Jambi	Proses Penyusunan	√
19	Bengkulu	Proses Penyusunan	√
20	Lampung	Proses Penyusunan	√
21	Jawa Tengah	Proses Penyusunan	√
22	DIY	Proses Penyusunan	√
23	Kalimantan Barat	Proses Penyusunan	√
24	Kalimantan Tengah	Proses Penyusunan	√
25	Bali	Proses Penyusunan	√
26	Nusa Tenggara Barat	Proses Penyusunan	√
27	Sulawesi Selatan	Proses Penyusunan	√
28	Papua Barat	Proses Penyusunan	√
29	Gorontalo	Proses Penyusunan	√
30	Maluku	Proses Penyusunan	√
31	Maluku Utara	Proses Penyusunan	√
32	DKI	Belum Menyusun	-
33	Nusa Tenggara Timur	Belum Menyusun	-
34	Sulawesi Utara	Belum Menyusun	-
35	Sulawesi Barat	Belum Menyusun	-
36	Sulawesi Tenggara	Belum Menyusun	-
37	Papua	Belum Menyusun	-

Tabel 3.10 Rekapitulasi Penyusunan RAD dan Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota Pelayanan Kepemudaan

Berdasarkan data diatas, diperoleh rekapitulasi sebagai berikut :

1. Sebanyak 11 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota telah selesai menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan, 17 Provinsi sedang dalam proses penyusunan dan 6 provinsi belum menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan;
2. Sebanyak 28 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota telah membentuk Tim Koordinasi Provinsi Pelayanan Kepemudaan, sedangkan 6 provinsi belum membentuk Tim Koordinasi Provinsi Pelayanan Kepemudaan.



Gambar 3.10 Dokumentasi Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

Dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut barulah dilakukan survei dan juga *self assessment* bagi Pemda di provinsi dan kabupaten/kota, dan sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas sektor Kemenpora memberi penghargaan bagi Pemda yang dinilai berhasil menyusun dan melaksanakan RAD. Diharapkan dengan penghargaan ini daerah lainnya mampu ikut memberikan perhatian terhadap pengembangan kepemudaan. Berikut daftar penerima penghargaan:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor
3. Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil
4. Gubernur Provinsi Riau Syamsuar
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura
7. Bupati Bengkalis Kasmarni
8. Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif.



Gambar 3.11 Dokumentasi Pemberian Penghargaan Kemenpora kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Namun tentunya dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor juga ditemui beberapa hambatan yang terjadi sepanjang tahun 2023 diantaranya:

1. Sekretariat dan kelompok kerja tim koordinasi nasional pelayanan kepemudaan masih belum optimal;
2. Area koordinasi lintas sektoral yang luas belum didukung oleh fungsi koordinasi yang efektif;
3. Kesamaan persepsi antar K/L tentang berbagai isu kepemudaan belum sepenuhnya terbangun.

Langkah perbaikan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

- 1) Arah Kebijakan Pembangunan Kepemudaan diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Bidang Kepemudaan.
  - a) Pelaksanaan program/kegiatan Bidang Kepemudaan diharapkan menerapkan pendekatan yang digunakan dalam RKP, yaitu *Money Follow Program* dan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS);
  - b) Pelaksanaan Arah Kebijakan Kepemudaan perlu didasarkan pada tolok ukur (situasi kepemudaan, IPP, SDGs *baseline* untuk pemuda) dan diterjemahkan ke dalam strategi intervensi maupun program/kegiatan.
- 2) Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menjadi landasan penting dalam pelaksanaan arah kebijakan pembangunan kepemudaan.
  - a) Penyusunan regulasi yang menjadi amanat dari Perpres Nomor 43 Tahun 2022 (diantaranya Rancangan Permenpora terkait RAN Kepemudaan dan Rancangan Permenpora IPP/YDI);
  - b) Menyusun Desain Besar Pembangunan Kepemudaan yang terintegrasi dan mengacu pada tolok ukur pembangunan kepemudaan;
  - c) Mulai mempersiapkan penyusunan Rancangan RAN Kepemudaan tahun 2020-2024 dalam rangka menjamin keberlanjutan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

- 3) Pelaksanaan program/kegiatan Bidang Kepemudaan perlu berbasis data dan informasi.
  - a) Perlu didasari pada sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kepemudaan untuk menyelesaikan permasalahan substansial kepemudaan;
  - b) Diperlukan ketersediaan suatu sistem database yang mampu memberikan data dan informasi secara lengkap, agar pelaksanaan pembangunan kepemudaan dapat direncanakan secara baik serta didukung oleh penganggaran yang memadai;
  - c) Data dan informasi yang valid dapat menjadi dasar perencanaan dan penganggaran suatu program/kegiatan dalam rangka efektivitas pelayanan kepemudaan.

## 2. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG KEOLAHRAGAAN

### 2.1 PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG BEROLAHRAGA DALAM SEMINGGU TERAKHIR

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DITINGKAT ASIA DAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase penduduk Usia 10 tahun keatas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	36,25*	28,6	28,4	37	25,4	68,65

\*Keterangan : berdasarkan metode perhitungan Laporan IPO Tahun 2020

Tabel 3.11 Capaian Indikator Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir Tahun 2020-2023

Berdasarkan Laporan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2023, Partisipasi olahraga adalah keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir. Indikator partisipasi aktif ini merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10-60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga minimal tiga kali per minggu. Sehingga persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir didefinisikan sebagai angka partisipasi masyarakat berusia 10-60 tahun yang melakukan olahraga/aktivitas fisik minimal tiga kali per minggu dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam berolahraga merupakan gaya hidup sehat yang harus dikembangkan. Prinsip partisipasi masyarakat dalam berolahraga mengacu pada

konsep *Sport for All*, yaitu olahraga bagi seluruh masyarakat dimana aktivitas olahraga dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal batas usia, perbedaan jenis kelamin, maupun perbedaan kondisi sosial ekonomi.

Realisasi persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir Tahun 2023 sebesar 25,4%, angka ini menunjukkan bahwa dari 1.000 orang masyarakat Indonesia hanya 254 orang yang melakukan olahraga 3 kali atau lebih dalam 1 minggu sedangkan sisanya sebanyak 746 orang melakukan olahraga kurang dari 3 kali atau bahkan tidak sama sekali. Berdasarkan norma kategorisasi IPO maka persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir Tahun 2023 dikategorikan rendah.

Pengukuran indikator ini diperoleh berdasarkan Rata-rata Indeks Partisipasi Olahraga di 34 Provinsi pada Laporan IPO yang dikonversikan dalam persentase melalui pengisian angket berbasis aplikasi kepada 11.880 responden yaitu penduduk yang berusia 10 tahun ke atas pada 34 Provinsi, 130 Kabupaten/Kota, dan 400 Desa/Kelurahan. Dari keseluruhan responden tersebut, 50,5% terdiri dari laki-laki dan 49,5% perempuan.

Metode dalam mengumpulkan Indeks Partisipasi Olahraga adalah pengisian angket. Penentuan indeks untuk masing-masing dimensi dilakukan dengan menggunakan skala. Nilai aktual adalah skor nyata yang diperoleh berdasarkan angka partisipasi olahraga dengan nilai minimum nol dan nilai maksimum 100.

$$\text{Indeks Partisipasi Olahraga} = \frac{\text{Nilai Aktual}}{\text{Total Responden}} = \frac{3.020}{11.880} = 0,254$$

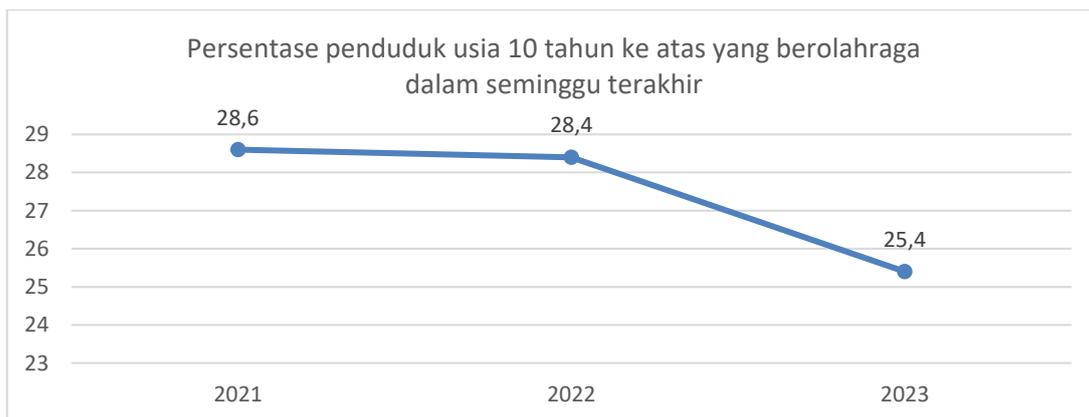
Nilai Aktual merupakan merupakan jumlah responden yang berusia 10-60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga minimal tiga kali per minggu dibagi dengan Total responden berusia 10-60 tahun. Adapun total responden secara nasional sebanyak 11.880 orang dimana pada masing-masing provinsi memiliki total responden yang berbeda-beda. Contoh perhitungan pada provinsi Aceh dengan total Responden pada provinsi Aceh sebanyak 240 sebagai berikut :

$$\text{Indeks Partisipasi Olahraga Aceh} = \frac{\text{Nilai Aktual}}{\text{Total Responden}} = \frac{72}{240} = 0,300$$

Adapun pada provinsi DKI Jakarta total respondennya hanya 630 orang, sehingga indeks Partisipasi olahraga sebesar 0,248.

NO	PROVINSI	AKTIVITAS ≥3 KALI PER MINGGU			NILAI AKTUAL	INDEKS
		10-19	20-44	45-60		
1	Aceh	0,415	0,279	0,241	72	0,300
2	Bali	0,432	0,316	0,229	57	0,317
3	Banten	0,179	0,127	0,047	60	0,118
4	Bengkulu	0,333	0,313	0,292	28	0,311
5	DI Yogyakarta	0,194	0,258	0,231	35	0,233
6	DKI Jakarta	0,239	0,237	0,274	156	0,248
7	Gorontalo	0,200	0,278	0,143	14	0,233
8	Jambi	0,333	0,276	0,063	37	0,247
9	Jawa Barat	0,320	0,244	0,229	537	0,256
10	Jawa Tengah	0,232	0,199	0,225	338	0,213
11	Jawa Timur	0,305	0,210	0,186	416	0,224
12	Kalimantan Barat	0,438	0,500	0,242	101	0,421
13	Kalimantan Selatan	0,444	0,278	0,468	65	0,361
14	Kalimantan Tengah	0,177	0,340	0,304	27	0,300
15	Kalimantan Timur	0,387	0,395	0,290	55	0,367
16	Kalimantan Utara	0,333	0,094	0,063	8	0,133
17	Kep Bangka Belitung	0,417	0,125	0,125	11	0,183
18	Kep Riau	0,611	0,438	0,417	42	0,467
19	Lampung	0,284	0,208	0,260	94	0,241
20	Maluku	0,444	0,353	0,583	37	0,411
21	Maluku Utara	0,091	0,214	0,200	10	0,167
22	Nusa Tenggara Barat	0,607	0,530	0,558	133	0,554
23	Nusa Tenggara Timur	0,409	0,343	0,258	80	0,333
24	Papua	0,539	0,242	0,219	36	0,300
25	Papua Barat	0,333	0,227	0,375	18	0,300
26	Riau	0,400	0,231	0,153	66	0,244
27	Sulawesi Barat	0,000	0,188	0,188	9	0,150
28	Sulawesi Selatan	0,300	0,347	0,264	124	0,318
29	Sulawesi Tengah	0,480	0,344	0,323	44	0,367
30	Sulawesi Tenggara	0,417	0,277	0,161	33	0,275
31	Sulawesi Utara	0,542	0,313	0,344	44	0,367
32	Sumatera Barat	0,367	0,260	0,141	60	0,250
33	Sumatera Selatan	0,361	0,224	0,125	81	0,225
34	Sumatera Utara	0,147	0,185	0,126	92	0,161

Tabel 3.12 Indeks Partisipasi Olahraga pada 34 Provinsi di Indonesia



Grafik 3.9 Perbandingan Indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir Tahun 2021-2023

Angka partisipasi olahraga semakin menurun angkanya dari tahun 2021 dengan tingkat partisipasi olahraga masyarakat adalah 28,6% dan pada tahun 2022 menurun ke angka 28,4%. Penurunan angka partisipasi diakibatkan karena

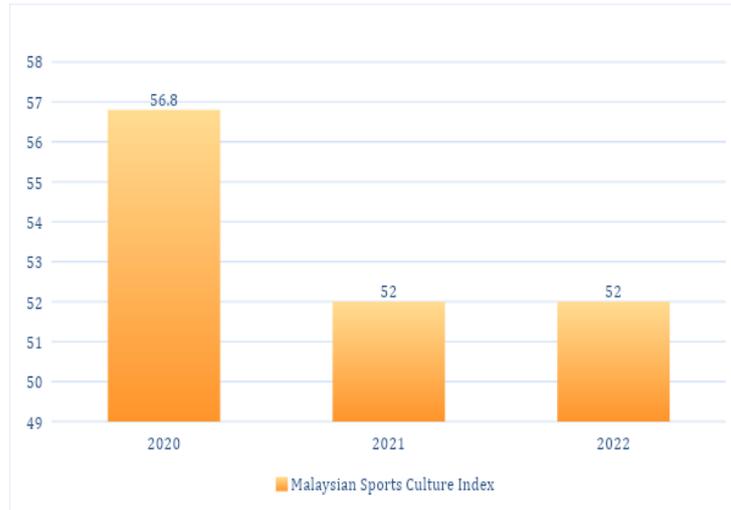
semakin rendahnya minat dan intensitas masyarakat dalam berolahraga dalam kurun waktu seminggu terakhir ketika survei dilaksanakan.

Jika dibandingkan dengan target pada periode akhir RPJMN 2020-2024 sebesar 40% dan target Desain Besar Olahraga Nasional Tahun 2024 sebesar 70%, capaian persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir memiliki gap yang cukup tinggi sehingga diperlukan upaya sangat keras dan strategi yang jitu untuk mencapai target tersebut. Berikut ini merupakan perbandingan Persentase Penduduk 5 Tahun dan 10 Tahun ke atas yang berolahraga berdasarkan data Susenas dan data pada Laporan IPO serta target pada Desain Besar Olahraga Nasional.



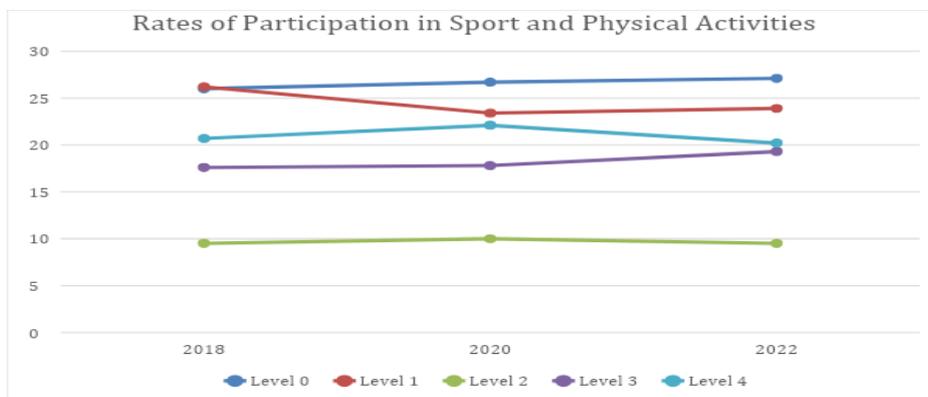
Grafik 3.10. Persentase Penduduk Berusia 5 dan 10 tahun ke atas yang berolahraga Tahun 2023

Sedangkan jika dibandingkan dengan negara lainnya, Indonesia masih berada di bawah Malaysia, hal ini dapat dilihat melalui pengukuran partisipasi berolahraga yang dilakukan oleh negara Malaysia melalui *Malaysian Sports Culture Index* (MSCI) sebagai upaya pemerintah dalam menumbuhkan sportivitas dan gaya hidup aktif pada semua lapisan masyarakat yang selaras dengan Visi Olahraga 2030, Dimana capaian partisipasi olahraga Malaysia tahun 2022 yaitu 52 dengan kategori moderate. Berdasarkan hasil pengukuran MSCI tahun 2020-2022 tersebut, tiga faktor teratas yang mendorong partisipasi masyarakat Malaysia dalam berolahraga adalah menjaga kebugaran, kesehatan, dan mengurangi stres. Sementara itu tiga hambatan terbesar dalam berolahraga adalah kondisi cuaca, waktu, dan keterbatasan informasi fasilitas olahraga.



Grafik 3.11 Malaysian Sports Culture Index Tahun 2020-2022

Begitu pula Indonesia masih di bawah partisipasi berolahraga Masyarakat Jepang yang diukur melalui *SSF National Sports-Life Survey* yang bertujuan untuk memahami situasi terkini partisipasi berolahraga dalam hal frekuensi, durasi, dan intensitas di antara orang dewasa, dimana jika di lihat pada Grafik 3.12 partisipasi berolahraga Masyarakat Jepang tahun 2022 di level 3 ke atas sekitar 40%. Berdasarkan hasil pengukuran pada 3 periode survei terakhir, yaitu tahun 2018 dan 2020 menjadi perbandingan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Masyarakat Jepang yang sebelumnya tidak berpartisipasi dalam berolahraga meningkat 0.7 poin. Selain itu, persentase level 2 ke level 4 juga meningkat, dari 9,5% menjadi 10,0% di level 2, dari 17,6% menjadi 17,8% di level 3, dan dari 20,7% menjadi 22,1% di level 4, namun perbedaannya dapat diabaikan. Secara umum terjadi peningkatan partisipasi berolahraga masyarakat Jepang.



Grafik 3.12 Partisipasi Berolahraga Masyarakat Jepang Tahun 2018-2022

Selain itu jika dibandingkan dengan kedua negara di atas, pengukuran partisipasi masyarakat berolahraga baik di Indonesia, Malaysia dan Jepang apabila dicermati dari ketiga data tersebut, ketiganya menunjukkan data yang sama bahwa di masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan, namun di Jepang meningkat setelah pandemi Covid-19 berakhir, sebaliknya data menunjukkan di Indonesia dan Malaysia terjadi penurunan.

Untuk itu Kemenpora mengimplementasikan sebuah kebijakan AYO OLAHRAGA untuk mengajak masyarakat semua lapisan menjalankan pola hidup aktif. Pelaksanaannya harus berprinsip pada 5M (Mudah, Murah, Massal, Manfaat, dan Menarik). Olahraga yang dilakukan beragam disesuaikan dengan minat dan kondisi serta situasi masing-masing seperti: Olahraga Senam, Gerakan Bersepeda, Olahraga Ekstrim, Olahraga Lansia, Olahraga Tradisional, Olahraga Ruang Publik, Olahraga Disabilitas dan Olahraga Usia Dini. Pada tahun 2023, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan kegiatan yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Lokus	Tujuan
1	Liga Kejuaraan Antar Kampung (TARKAM) 2023	102.712 Orang	Tangerang Selatan, Jembrana, Kupang, Kota Lubuk Linggau, Kendal Linggau, Gunung Kidul, Gorontalo Utara, Nganjuk, Lampung, Belitung Timur, Malang, Pacitan, Pasangkayu, Gowa, Langkat, Musi Banyuasin, Sorong, Konawe, Kebumen, Limapuluh Kota, Parigi Moutong, Mempawah, Pangandaran, Pekalongan, Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembudayaan olahraga pada seluruh lapisan masyarakat kabupaten/kota</li><li>• Menggali potensi atau bakat olahragawan masyarakat dan pelajar dari tingkat kabupaten/kota untuk dipersiapkan menuju tingkat nasional dan internasional</li><li>• Membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tingkat kabupaten/kota melalui olahraga</li></ul>
2	Festival Anak Usia Dini	2.250 Orang	DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan pengalaman ragam gerak pada anak-anak usia dini sebagai pondasi dalam aktivitas olahraga di usia selanjutnya</li><li>• Memberikan edukasi kebugaran sejak usia dini dan kepada orang tua serta guru di TK/RA se-</li></ul>

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Lokus	Tujuan
				Jabodetabek
3	Pekan Olahraga Tradisional (POTRADNAS) 2023	5.640 Orang	Kuningan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melestarikan tradisi permainan tradisional dengan mengembangkannya menjadi olahraga tradisional sehingga dapat dimainkan oleh generasi saat ini</li><li>• Meningkatkan minat masyarakat berolahraga dengan mengemas olahraga yang diturunkan dari permainan tradisional</li></ul>
4	Hari Olahraga Nasional 2023	4.500 Orang	DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kualitas ekosistem olahraga di Indonesia</li><li>• Bentuk seremonial atas komitmen Indonesia agar terus memajukan olahraga di Indonesia</li></ul>
5	Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) X Tahun 2023	2.500 Orang	Palembang	Meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas dalam berolahraga
6	Festival Olahraga Disabilitas	4.600 Orang	Palangkaraya, Medan, Bukit Tinggi, Lampung, Yogyakarta, Mataram	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas dalam berolahraga</li><li>• Mengenalkan cabang olahraga yang dapat diikuti oleh siswa/siswi dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yaitu atletik, badminton, tenis meja, para powerlifting, renang</li></ul>
7	Festival Senam Tahun 2023	2.116 Orang	Konawe dan Kebumen	Meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga dengan melakukan senam SKJ, aerobik, dan senam daerah
8	Jumat Krida 2023	± 300 Orang per minggu	Kementerian Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan minat pegawai dan masyarakat Induk Olahraga untuk melakukan olahraga bersama setiap minggunya</li></ul>

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Lokus	Tujuan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu pertumbuhan industri olahraga dengan adanya stand-stand yang menjual produk olahraga</li> </ul>
9	Bantuan Prasarana dan Sarana	449 Lembaga	Tersebar di 34 Provinsi	Menjamin dan mempermudah akses <i>stakeholder</i> terhadap fasilitas olahraga pendidikan dan masyarakat sehingga diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga
10	Pelatihan Industri dan Promosi Olahraga	653 Orang	Bandung, Konawe, Gunung Kidul, Yogyakarta, Limapuluh Kota, Parigi Moutong, Pangandaran, Pekalongan, Mempawah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu peningkatan pertumbuhan industri olahraga</li> <li>Meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga</li> </ul>
11	Penyelenggaraan Paragliding Trip of Indonesia (Trol) 2023	524 Orang	Singkawang, Alor, Gunung Kidul	Mempromosikan olahraga ekstrim berupa olahraga paragliding kepada masyarakat

Tabel 3.13 Kegiatan pendukung Indikator Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir



Gambar 3.12 Peserta Festival Olahraga Disabilitas Tahun 2023



Gambar 3.13 Olahraga Tradisional Hadang pada POTRADNAS Tahun 2023

Hambatan dalam usaha peningkatan tingkat partisipasi olahraga adalah monitoring dan evaluasi atas program kegiatan yang belum maksimal dan

berdampak untuk menunjang tujuan utama. Selain itu penyusunan program kegiatan yang masih bersifat seremonial, sporadik, dan hanya menganggap semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut semakin bagus program kegiatan tersebut tanpa mempertimbangkan *outcome* lebih lanjut secara jangka panjang.

Tantangan yang dihadapi oleh usaha peningkatan tingkat partisipasi olahraga adalah budaya pemikiran penyusunan program yang masih berbasis pada *money follow function* bukan *function follow money* sehingga ruang gerak inovasi masih terbatas. Selain itu terdapat pergeseran kebiasaan pasca pandemi di mana gaya hidup masyarakat luas yang lebih berfokus pada kegiatan yang berbasis digital.

Strategi perbaikan untuk usaha peningkatan partisipasi masyarakat olahraga adalah sebagai berikut:

1. Inovasi kebijakan/kegiatan yang tidak berfokus pada kegiatan yang bersifat seremonial, sporadik, dan pengumpulan jumlah massa saja, namun harus berfokus pada dampak/*outcome* yang dihasilkan contohnya peningkatan intensitas masyarakat berolahraga agar dampak yang dihasilkan sifatnya tidak sementara, terutama hanya saat kegiatan tersebut diselenggarakan;
2. Adanya kegiatan yang berfokus pada 1 lokus tertentu dan dimonitor secara berkala bagaimana dampak dari kebijakan/kegiatan tersebut terhadap tingkat partisipasi masyarakatnya dalam berolahraga (aspek pembangunan berkelanjutan);
3. Inovasi kegiatan yang berusaha untuk merangkul semua kalangan masyarakat, bukan hanya kelompok/kalangan olahraga tertentu saja yang menghadiri kegiatan tersebut;
4. Memanfaatkan sosial media sebagai jembatan untuk mempengaruhi (*influence*) masyarakat untuk berolahraga;
5. Mempromosikan dan merekrut *volunteer* dalam olahraga/aktivitas fisik di tengah keterbatasan jumlah ketenagaan di bidang olahraga;
6. Bekerja sama dengan satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk membuat turunan peraturan/kebijakan terkait dengan usaha peningkatan tingkat partisipasi dan kebugaran masyarakat secara sinergis dan berkelanjutan.

## 2.2. PERSENTASE TINGKAT KEBUGARAN JASMANI MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DITINGKAT ASIA DAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase tingkat kebugaran jasmani Masyarakat	n.a	20,3	18,5	28	17,9	63,93

Tabel 3.14 Capaian Persentase Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Tahun 2020-2023

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang produktif untuk dipersiapkan sebagai generasi emas menuju 2045, masalah kebugaran jasmani menjadi persoalan yang sangat krusial. Seperti halnya kapasitas kognitif dan intelektual, kebugaran jasmani pada hakikatnya merupakan *intangible asset* yang ada pada individu dan merupakan modal yang paling mendasar dari manusia.

Dalam Laporan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Tahun 2023, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk dapat melakukan tugas secara produktif dengan efisien dan berkontribusi terhadap kualitas hidup serta memiliki cukup energi untuk mengatasi tugas yang mendadak.

Metode dalam mengumpulkan data tingkat kebugaran jasmani adalah dengan metode tes performa. Instrumen yang digunakan adalah MFT (*Multistage Fitness Test* atau *Beep Test*), sebuah tes lapangan untuk menaksir kapasitas aerobik maksimal ( $vo_{2max}$ ) seseorang, baik pada usia anak, remaja, maupun dewasa, termasuk pada atlet dimana responden melakukan lari bolak-balik 20 m terus menerus dan individu harus mencapai garis 20 m sebelum berbunyi *beep* berikutnya.

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kebugaran} \\ &= \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Nilai Aktual adalah skor nyata yang diperoleh berdasarkan patokan yang telah ditetapkan (rata-rata hasil pengukuran tes MFT pada 34 provinsi). Nilai Minimum Tingkat Kebugaran Jasmani Nasional setiap tahunnya adalah 20,1. Nilai Maksimum Tingkat Kebugaran Jasmani Nasional setiap tahunnya adalah 52,1.

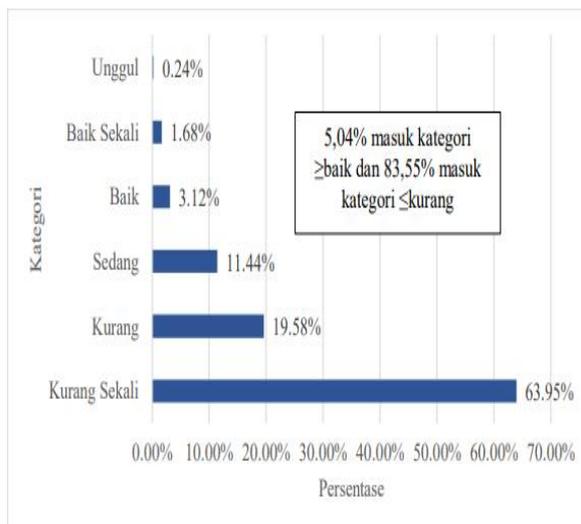
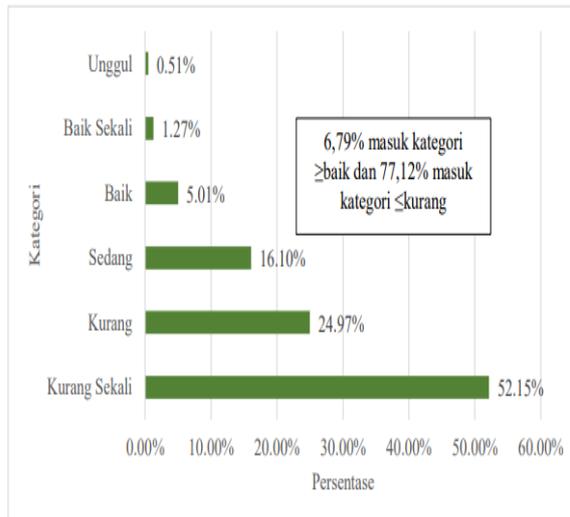
NO	PROVINSI	VO2MAX KELOMPOK USIA			NILAI AKTUAL	INDEKS
		10-19	20-44	45-60		
1	Aceh	29,558	25,762	21,774	25,714	0,175
2	Bali	27,581	25,935	23,489	25,735	0,176
3	Banten	25,196	23,965	21,563	23,672	0,112
4	Bengkulu	28,356	26,427	23,267	26,119	0,188
5	DI Yogyakarta	27,708	25,468	23,337	25,495	0,169
6	DKI Jakarta	25,607	23,754	21,627	23,685	0,112
7	Gorontalo	23,280	22,864	22,100	22,777	0,084
8	Jambi	31,395	29,384	23,894	28,514	0,263
9	Jawa Barat	30,089	27,460	24,159	27,292	0,225
10	Jawa Tengah	26,575	25,749	23,652	25,431	0,167
11	Jawa Timur	27,030	24,671	22,580	24,738	0,145
12	Kalimantan Barat	30,310	27,535	23,666	27,261	0,224
13	Kalimantan Selatan	24,967	23,728	22,360	23,695	0,112
14	Kalimantan Tengah	25,824	24,432	23,878	24,641	0,142
15	Kalimantan Timur	26,255	24,360	21,997	24,243	0,129
16	Kalimantan Utara	30,683	31,472	24,619	29,561	0,296
17	Kep Bangka Belitung	29,158	23,791	22,750	24,872	0,149
18	Kep Riau	29,339	29,729	23,021	27,955	0,245
19	Lampung	25,582	24,790	22,499	24,415	0,135
20	Maluku	30,314	29,123	25,358	28,480	0,262
21	Maluku Utara	30,564	26,707	28,170	28,037	0,248
22	Nusa Tenggara Barat	30,296	27,952	24,571	27,693	0,237
23	Nusa Tenggara Timur	31,493	28,175	25,342	28,296	0,256
24	Papua	31,238	29,187	23,194	28,202	0,253
25	Papua Barat	26,010	23,900	20,463	23,568	0,108
26	Riau	28,187	25,834	22,515	25,593	0,172
27	Sulawesi Barat	21,500	25,044	23,656	23,811	0,116
28	Sulawesi Selatan	26,981	25,714	22,781	25,298	0,162
29	Sulawesi Tengah	28,360	26,773	22,148	26,014	0,185
30	Sulawesi Tenggara	28,679	26,957	22,242	26,209	0,191
31	Sulawesi Utara	26,696	26,700	23,594	25,922	0,182
32	Sumatera Barat	29,682	31,137	25,759	29,429	0,292
33	Sumatera Selatan	30,296	28,319	24,494	27,857	0,242
34	Sumatera Utara	27,858	25,465	22,409	25,299	0,162

Tabel 3.15 Indeks Tingkat Kebugaran Jasmani pada 34 Provinsi di Indonesia

Contoh Perhitungan Tingkat Kebugaran Jasmani Tahun 2023 Daerah Aceh:

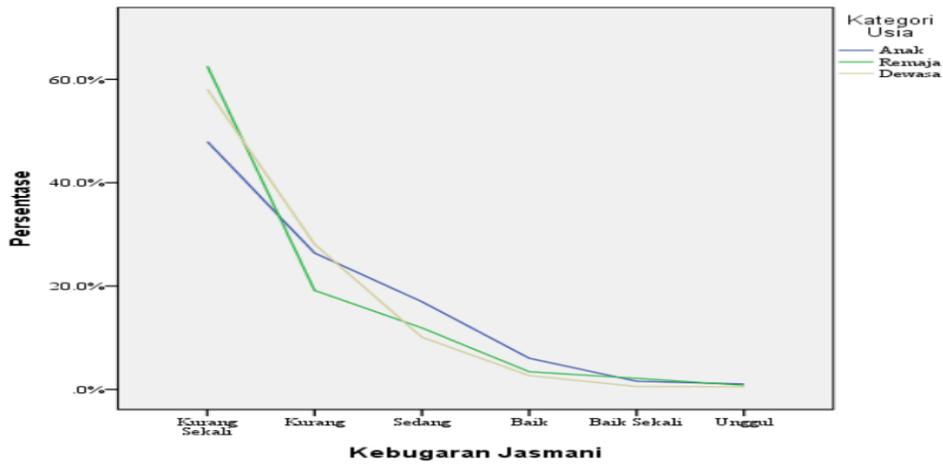
$$\frac{25,714-20,1}{52,1-20,1} = 0,175 \times 100 \% = 17,5\%$$

Tingkat Kebugaran Jasmani Tingkat Nasional diperoleh dari rata-rata indeks tingkat kebugaran pada 34 provinsi. Tingkat Kebugaran Jasmani Tahun 2023 diperoleh 17,9% dari target 28% sehingga persentase capaian indikator adalah 63,93%. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan yaitu perubahan gaya hidup dan pola bermain anak dan pemuda Indonesia dari area lapangan ke layar, semestinya kebutuhan gerak bagi anak dan pemuda Indonesia tidak terbatas waktu dan tempat, *lifelong physical activity* bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Selain itu, angka partisipasi berhubungan dengan kebugaran jasmani sehingga kurangnya partisipasi masyarakat berusia 10 tahun keatas dalam berolahraga tiga kali seminggu berdampak pada tingkat kebugaran jasmani menurun.



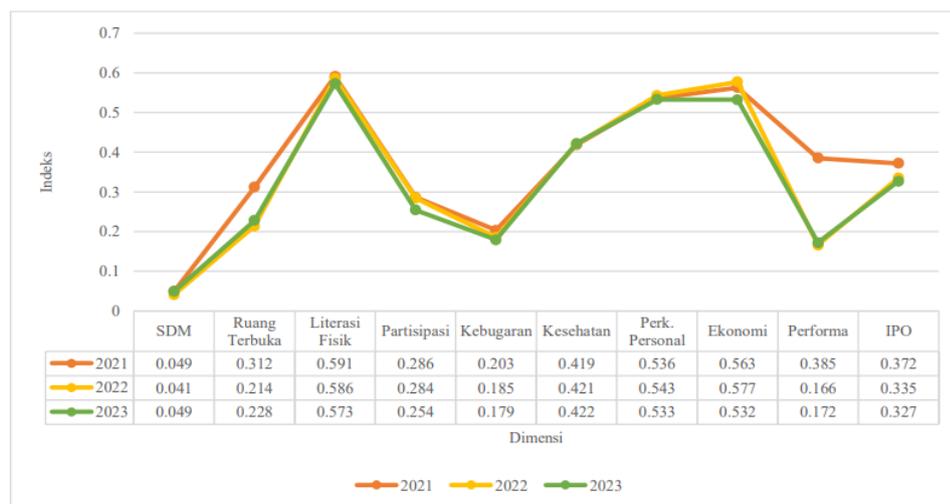
Grafik 3.13 Perbandingan Kebugaran Jasmani Anak Usia 10-15 Tahun dengan Remaja Usia 16-30 Tahun

Pengukuran kebugaran jasmani yang dilakukan terhadap 1.578 anak usia 10-15 tahun yang tersebar di 34 Provinsi tahun 2023 menemukan fakta bahwa tingkat kebugaran jasmani anak Indonesia sungguh memprihatinkan. Mereka yang memiliki kebugaran jasmani masuk kategori baik atau lebih hanya 6,79%. Sementara itu, anak-anak yang memiliki kebugaran jasmani kategori kurang dan kurang sekali sebanyak 77,12%. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada remaja usia 16-30 tahun. Pengukuran yang dilakukan terhadap 3.820 remaja usia 16-30 tahun yang tersebar di 34 Provinsi tahun 2023 menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kebugaran jasmani kategori baik/lebih sebesar 5,04%. Sementara itu, remaja yang memiliki kebugaran jasmani kategori kurang dan kurang sekali sebesar 83,55%.



Grafik 3.14 Kategori Kebugaran Jasmani Berdasarkan Usia

Tantangan dalam meningkatkan tingkat kebugaran jasmani ialah tampaknya ada kemiripan pola terkait kondisi kebugaran jasmani antara kelompok usia anak, remaja, dan dewasa. Persentase terbesar ada pada kategori “kurang sekali” dan “kurang”, kemudian semakin mengecil persentasenya pada kategori “baik sekali” dan “unggul”. Secara umum, tingkat kebugaran jasmani kelompok anak lebih baik dibandingkan dengan kelompok remaja dan kelompok remaja lebih baik dibandingkan dengan kelompok dewasa. Fakta ini seiring dengan logika partisipasi, yakni tingkat partisipasi dalam berolahraga tertinggi ada pada usia anak, kemudian bergerak semakin turun ketika memasuki remaja akhir, dan berlanjut hingga usia tua. Kondisi yang demikian bersifat alamiah seiring dengan tugas perkembangan dan siklus kehidupan manusia sepanjang hayat.



Grafik 3.15 Perbandingan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2021-2023

Tingkat kebugaran jasmani masyarakat semakin menurun angkanya dari tahun 2021 di mana pada tahun 2021 adalah 0,203 dan pada tahun 2022 menurun ke

angka 0,185 dan pada tahun 2023 menurun ke 0,179. Seiring waktu, tren penurunan tersebut terus terjadi. Oleh karena itu perlu adanya strategi agar tidak terjadi penurunan secara berkelanjutan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan beberapa kegiatan dalam mendukung tingkat kebugaran jasmani masyarakat, antara lain:

1. Identifikasi Antropometri, Tes Kemampuan Fisik, dan Tes Kebugaran Pelajar Nusantara (TKPN). Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengambilan data lapangan peserta didik usia 9-13 tahun yang dilakukan oleh Guru PJOK yang telah mengikuti *Training of Trainer* Pemanduan Bakat dan TKPN dengan kriteria 1 Guru PJOK mengambil data Peserta Didik dengan mengikuti instrumen tes yang diberikan sesuai dengan prosedur pelaksanaan tes.



Gambar 3.14 Identifikasi Antropometrik, Tes Kemampuan Fisik, dan Tes Kebugaran Pelajar Nasional

Identifikasi antropometri dengan melakukan tes fisik dilakukan pada 8 indikator meliputi tinggi badan, berat badan, tinggi duduk, panjang tungkai, rentang lengan, panjang telapak kaki, panjang telapak tangan dan panjang jengkal. Pelaksanaan tes kemampuan fisik meliputi *vertical jump*, *ruler drop test*, *hand wall toss test*, *sprint 20 meter*, dan *pacer test*. Sedangkan Tes Kebugaran Pelajar Nusantara (TKPN), merupakan serangkaian tes yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran pelajar di Indonesia dari usia 9 tahun sampai 18 tahun. TKPN terdiri dari 5 item tes, yaitu:

- 1) Pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT), dengan mengukur tinggi badan dan berat badan
- 2) *V-Sit and Reach*
- 3) *Sit Up 60 detik*
- 4) *Squat Thrust 30 detik*
- 5) Tes PACER



Gambar 3.15 *Multistage Fitness Test* pada pelajar

Telah dilaksanakan tindak lanjut pengukuran kemampuan fisik tahun 2022 terdapat peserta didik yang memiliki antropometri ekstrim (melebihi standar yang ditetapkan) yang diminta untuk dilakukan tes pengukuran kembali yang dilaksanakan di bulan Mei s.d. September 2023. Kegiatan pengukuran ini dilaksanakan di Bandung, Bengkulu, Tangerang Selatan, Palembang, Makassar, Manado, Kendari, Gorontalo, Jayapura, Medan, Pekanbaru, Padang, Sorong, Semarang, Batam, Ambon, Mataram. Tes Kebugaran Pelajar Nusantara (TKPN) Tahun 2023 dilaksanakan di Yogyakarta, Mataram, Gorontalo, Bangka Belitung, Padang, Denpasar, Ambon, dan Kuningan Jawa Barat.



Gambar 3.16 Identifikasi Antropometrik, Tes Kemampuan Fisik, dan Tes Kebugaran Pelajar Nasional

Guru PJOK di seluruh kabupaten/Kota di Indonesia melakukan pengambilan Tes Antropometri, tes kemampuan fisik dan Tes Kebugaran Pelajar Nusantara (TKPN) mulai bulan Oktober sampai dengan November 2023 di *upload* di <https://siordik.kemenpora.go.id>. Jumlah peserta didik yang sudah dilakukan tes sebanyak 82.756 orang per Desember 2023.

Hasil dari kegiatan ini adalah didapatkan anak-anak yang secara anatomis memiliki ukuran tubuh atau antropometri yang memadai dan memenuhi

kriteria untuk mengarahkan potensi yang dimiliki anak tersebut untuk mengikuti cabang olahraga tertentu serta adanya *database* potret kebugaran peserta didik di Indonesia dan data antropometri peserta didik di Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan program pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.

2. Pelatihan dan Bimtek Senam Kebugaran Jasmani (SKJ). Kegiatan ini diikuti oleh Guru-guru PJOK pada Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Dosen pada Satuan Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu guru PJOK sebagai sarana dan media pembekalan ilmu keolahragaan yang merupakan pondasi untuk dapat menjadi pelatih cabang olahraga unggulan DBON, pelatih/instruktur Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), Guru PJOK juga diharapkan mampu untuk menjadi pelatih/instruktur Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dalam upaya untuk menggerakkan dan mengolahragakan peserta didik serta menggelorakan semangat berolahraga masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Bugar.

Melalui kegiatan Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani diharapkan guru PJOK memiliki kompetensi sebagai instruktur SKJ dimana kompetensi tersebut akan sangat mendukung program pemerintah dalam memaksimalkan sosialisasi SKJ sehingga dapat diterima menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya peserta didik di satuan-satuan pendidikan. Kegiatan dilaksanakan di Jakarta dan Tangerang Selatan berupa rapat persiapan pelatihan penjurian Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), *workshop* dan pelatihan penjurian Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), pembuatan Video SKJ versi lomba. Kegiatan *workshop* dan pelatihan penjurian Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) diikuti oleh 51 orang yang terdiri dari guru PJOK.

Strategi dalam meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan terobosan kebijakan dan program peningkatan kebugaran masyarakat yang lebih substansial, komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui intervensi keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Contoh kebijakan seperti "*President's Council on Physical Fitness*" di Amerika Serikat dapat dijadikan model.
2. Perlunya turunan implementasi tingkat nasional ke tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) secara sinergis dan berkelanjutan.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap lokus pengukuran kebugaran masyarakat agar terukur capaian progres kebugaran tiap tahunnya.

## 2.3 PERINGKAT PADA ASIAN GAMES

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DITINGKAT ASIA DAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2010	REALISASI 2014	REALISASI 2018	2023		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Peringkat pada Asian Games	15	17	4	12	13	91,67

Tabel 3.16 Capaian Indikator Peringkat pada Asian Games Tahun 2010, 2014, 2018, 2023

**19<sup>th</sup> Asian Games 2022 Hangzhou yang dilaksanakan di tahun 2023** merupakan *multi event* terbesar di benua Asia, pelaksanaan Asian Games kali ini yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 10 - 25 September tahun 2022 mengalami perubahan jadwal dikarenakan negara China mengalami peningkatan varian Covid terbaru sehingga diprediksi akan berisiko terhadap para atlet dari seluruh negara Asia jika tetap dilaksanakan pada tahun tersebut. 19<sup>th</sup> Asian Games Hangzhou merupakan Asian Games Ke-3 setelah Asian Games ke-11 di Beijing tahun 1990 dan Asian Games ke-16 di Guangzhou pada tahun 2010. Perubahan pelaksanaan *multi event* ini tentu berdampak pada sistem pelatihan periodisasi dan persiapan atlet dan berpengaruh terhadap anggaran pemerintah, yang mana dalam satu tahun terdapat 2 (dua) *multi event* besar yakni SEA Games ke-32 Phnom Penh Cambodia pada tanggal 12 - 23 Mei 2023 dan Asian Games ke-19 Hangzhou tanggal 23 September - 8 Oktober 2023.



Gambar 3.17 Pertandingan Zohri pada Asian Games 2022

19<sup>th</sup> Asian Games 2022 Hangzhou, China mempertandingkan 40 Cabang Olahraga/62 sub Disiplin Cabang Olahraga dengan 481 nomor pertandingan, diikuti oleh 46 negara anggota *Olympic Committee of Asia* berlangsung dari tanggal 23 September s.d. 8 Oktober 2023. Kontingen Indonesia berkekuatan 413 atlet (235 atlet putra dan 178 atlet putri), 135 *official* cabang olahraga dan 31 *Headquarters*

berpartisipasi pada 30 Cabang Olahraga/41 sub Disiplin Cabang Olahraga mengikuti 202 (42,00%) nomor pertandingan. Kontingen Indonesia menduduki ranking ke-13 klasemen akhir dengan raihan 7 Emas, 11 Perak dan 18 Perunggu. Klasemen Medali Akhir selengkapnya dapat dilihat berikut ini:

Peringkat	Negara	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	Tiongkok*	201	111	71	383
2	Jepang	52	67	69	188
3	Korea Selatan	42	59	89	190
4	India	28	38	41	107
5	Uzbekistan	22	18	31	71
6	Tionghoa Taipei	19	20	28	67
7	Iran	13	21	20	54
8	Thailand	12	14	32	58
9	Bahrain	12	3	5	20
10	Korea Utara	11	18	10	39
11	Kazakhstan	10	22	48	80
12	Hong Kong	8	16	29	53
13	Indonesia	7	11	18	36
14	Malaysia	6	8	18	32
15	Qatar	5	6	3	14

Tabel 3.17 Klasemen dan Perolehan Medali di Asian Games 2023 Hangzhou

Jika dilihat berdasarkan total perolehan medali dengan 36 medali yang diraih Indonesia pada 19<sup>th</sup> Asian Games 2022 Hangzhou maka Indonesia berada pada ranking ke 12 negara dengan total perolehan medali terbanyak. Pencapaian perolehan medali Cabang Olahraga Kontingen Indonesia pada 19<sup>th</sup> Asian Games 2022 Hangzhou China sebagai berikut:

**a. 6 Sub disiplin Cabang Olahraga berhasil meraih Medali Emas**

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali (Emas-Perak-Perunggu)
1	Shooting	2-0-3
2	Dragon Boat	1-4-1
3	Sport Climbing	1-2-2
4	Wushu	1-2-2
5	Cycling-BMX	1-0-1
6	Weightlifting	1-0-0
Total		7-8-9

Tabel 3.18 Cabang Olahraga berhasil meraih Medali Emas di Asian Games 2023 Hangzhou

**b. 7 Sub disiplin Cabang Olahraga berhasil meraih Medali**

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali (Emas-Perak-Perunggu)
1	Sepaktakraw	0-2-1
2	Skateboarding	0-1-0
3	Rowing	0-0-3
4	Archery	0-0-2
5	Karate	0-0-1
6	Tennis	0-0-1
7	Soft Tennis	0-0-1
Total		0-3-9

Tabel 3.19 Cabang Olahraga berhasil meraih Medali di Asian Games 2023 Hangzhou

Secara keseluruhan berdasarkan target yang dicanangkan meraih 8-12 Emas dan berada pada peringkat ke 12 ranking medali akhir pada 19<sup>th</sup> Asian Games 2022 Hangzhou, maka capaian 7 Emas (meleset 1 Emas) dan peringkat akhir ke 13 (meleset 1 peringkat). Berikut dasar cabang olahraga dan nomor pertandingan yang ditargetkan meraih medali Emas.

No	Cabang Olahraga-Nomor Pertandingan Target Emas	Pencapaian
1	Badminton-Men's Team	8 Besar
2	Badminton-Men's Double	8 Besar
3	Sport Climbing-Men's Speed	Perunggu
4	Sport Climbing-Men's Speed Relay	Perak
5	Sport Climbing-Women's Speed	Emas
6	Sepaktakraw-Men's Quadrant	Perak
7	Wushu-Men's Nanquan & Nangun Allround	Emas
8	Weightlifting-Men's 73 kg	Emas
9	Karate-Women's 55 kg	Final Bronze
10	Dragon Boat-Men's 1000 m	Emas
11	Dragon Boat-Women's 1000 m	Perak

Tabel 3.20 Cabang olahraga dan nomor pertandingan yang ditargetkan meraih medali Emas

Pada 19<sup>th</sup> Asian Games 2023 Indonesia kehilangan **19 Potensi Emas** karena sebanyak **17 Potensi Emas** karena tidak dipertandingkannya **3 Cabang Asian Games XVIII/2018 Jakarta-Palembang, Indonesia**; 1) Pencak Silat (14); 2)



Paragliding (2); dan 3) Jetski (1) dan kehilangan **2 Potensi Emas** karena tidak dipertandingkan Nomor Pertandingan *Cycling-MTB*.

Pemecahan Rekor pada 19<sup>th</sup> Asian Games 2022 Hangzhou oleh atlet Indonesia 1 Rekor Dunia, 1 rekor Asia dan 4 Rekor Asian Games dengan rincian sebagai berikut:

a. Rekor Dunia

Rahmat Erwin Abdullah (*Weightlifting-Men's 73 kg*) untuk jenis angkatan Clean & Jerk dengan angkatan 201 kg memecahkan rekor atas namanya sendiri dengan angkatan 200 kg pada World Weightlifting Championship 2022 di Bogota - Kolombia.

b. Rekor Asia

Rahmat Erwin Abdullah (*Weightlifting -Men's 73 kg*) untuk jenis angkatan Clean & Jerk dengan angkatan 201 kg memecahkan rekor atas namanya sendiri dengan angkatan 200 kg pada World Weightlifting Championship 2022 di Bogota - Kolombia.

c. Rekor Asian Games

1) Desak Made Rita Kusuma Dewi (*Sport Climbing-Women's Speed*) dua kali memecahkan rekor pertama pada saat babak kualifikasi dengan catatan waktu 6.600 detik memecahkan rekor lama atas nama Aries Susan B Rahayu (INA) catatan waktu 7.612 detik pada Asian Games 2018 Jakarta Palembang, kemudian pada babak semifinal kembali memecahkan rekor atas namanya sendiri menjadi 6.522 detik

2) Leonardo Veddriq (*Sport Climbing-Men's Speed*) dua kali memecahkan rekor pertama pada saat babak kualifikasi dengan catatan waktu 4.978 detik memecahkan rekor lama atas nama Reza Alipour Shenaz Andi Fard (IRI) catatan waktu 5.633 detik pada Asian Games 2018 Jakarta Palembang, kemudian kembali memecahkan rekor atas namanya sendiri pada babak final bronze dengan catatan waktu 4.955 detik.

3) Rahmat Erwin Abdullah (*Weightlifting-Men's 73 kg*) untuk jenis angkatan Clean & Jerk dengan angkatan 196 kg memecahkan rekor atas nama Weeraphon Wichuma (THA) dengan angkatan 195 kg pada 19<sup>th</sup> Asian Games 2022 Hangzhou China (rekor lama Asian Games , kemudian kembali memecahkan rekor atas namanya sendiri dengan angkatan 201 kg.

4) Rahmat Erwin Abdullah (*Weightlifting-Men's 73 kg*) dua kali memecah rekor dengan total angkatan 354 kg memecahkan rekor atas nama Weeraphon Wichuma (THA) total angkatan 351 kg pada 19<sup>th</sup> Asian Games 2022 Hangzhou China, kemudian kembali memecahkan rekor atas namanya sendiri dengan total angkatan 359 kg.



Gambar 3.18 Pembalap Sifa Amellya Nur Tambah Medali Emas Indonesia di Ajang Asian Games 2022 Hangzhou

Cabang Olahraga Indonesia berhasil mencetak sejarah baru meraih medali Emas pertama kali pada Asian Games sebagai berikut:

- 1) *Shooting* sejak pertama kali dipertandingkan pada Asian Games 1954 Manila, Philippines.
- 2) *Cycling-BMX* sejak pertama kali dipertandingkan pada Asian Games 2010 Guangzhou, China.



Grafik 3.16 Perbandingan capaian medali Indonesia pada Asian Games 2010 s.d Asian Games 2022

Berdasarkan perolehan medali Indonesia pada Asian Games 2010 s.d 2022, grafik *trendline* Indonesia menunjukkan tren positif bahkan unggul diantara negara pesaing Indonesia di Asia Tenggara, yakni mengalami peningkatan sebesar 17,57%.

Berikutnya negara Thailand *trendline* yang positif sebesar 10,57%, berturut berikutnya negara Malaysia (0,00003%), Filipina (8,27%), Singapura (1,22%) dan Vietnam (2,0%).

No	Indikator	AG 2022	AG 2018	AG 2014	+/-
1	Cabang Olahraga	40	40	36	
	Sub Disiplin Cabang Olahraga	62	61	50	
2	Nomor Pertandingan	481	462	439	
	a. Yang Diikuti	202 (42,00%)		119 (27,11%)	
	b. Meraih Medali	34 (16,83%)		18 (15,13%)	
3	Jumlah Atlet	413	935	187	
	a. Meraih Medali	94 (22,76%)		54 (28,87%)	
	b. Non Medali	337 (77,24%)		133 (71,13%)	
4	Medali (E-Prk-Prg)	7 (1,46%)-11-18	31 (6,67%)-24-43	4 (0,91%)-5-11	
5	Rangking	13	4	17	
6	Pemecahan Rekor				
	a. Dunia	1			
	b. Asia	1			
	c. Asian Games	4			

Tabel 3.21 Perbandingan capaian prestasi Indonesia berdasarkan cabang olahraga yang dipertandingkan, nomor pertandingan, jumlah atlet, medali dan ranking

Untuk menghadapi **Asian Games ke-19 Hangzhou 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023**, Kemenpora telah melaksanakan Pemusatan Latihan Nasional kepada sejumlah Induk Organisasi Cabang Olahraga. Cabang olahraga yang difasilitasi adalah cabang olahraga yang berpotensi mendapatkan medali emas, sehingga bantuan yang diberikan optimal untuk peningkatan prestasi olahraga nasional.

Fasilitasi untuk dukungan 19<sup>th</sup> Asian Games Hangzhou 2022 dilakukan dengan mekanisme bantuan kepada NOC Indonesia dalam rangka pengiriman kontingen Indonesia mengikuti 19<sup>th</sup> Asian Games Hangzhou 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Jumlah fasilitasi tersebut sebesar Rp 41.257.620.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).



Gambar 3.19 Pemberian Penghargaan pada Olahragawan dan Pelatih yang berprestasi pada ajang Asian Games Hangzhou 2022

Sebagai bentuk apresiasi kepada Olahragawan dan Pelatih yang sudah berprestasi pada 19<sup>th</sup> Asian Games Hangzhou 2022 Tahun 2023, sesuai Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih Olahraga Berprestasi Pada Penyelenggaraan *Asian Games XIX Hangzhou 2022 Tahun 2023*, maka Kemenpora telah memberikan penghargaan dalam bentuk bonus kepada para Olahragawan, Pelatih, Asisten Pelatih dan Tenaga Pendukung yang berprestasi dimaksud.

Capaian prestasi Kontingen Indonesia pada 19<sup>th</sup> Asian Games 2022 Hangzhou dengan meraih 7 Emas 11 Perak dan 18 Perunggu dan menduduki ranking ke 13 klasemen akhir medali secara keseluruhan merupakan hasil optimal dari proses pembinaan yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam persiapan Kontingen Indonesia menuju *multi event* olahraga di masa depan antara lain:

- a. Penerapan IPTEK Keolahragaan terkini secara efektif dan tepat guna sudah terbukti mampu mendongkrak pencapaian prestasi olahraga untuk bisa bersaing menghadapi tantangan dan tingginya tingkat persaingan memperoleh medali di tingkat Asia dan Dunia. Semua komponen pembinaan olahraga mulai dari Pembina, Pelatih dan Atlet harus bisa dan mau bekerjasama dengan tenaga keolahragaan *sports sciences* (lokal & asing) demi kemajuan prestasi olahraga di Indonesia. Bahkan Cina sebagai raksasa olahraga Asia masih memanfaatkan tenaga keolahragaan asing bekerjasama dengan pelatih lokal untuk mampu bersaing di Olimpiade.
- b. Program pembinaan olahraga yang *continue* dan sesuai dengan siklus

Olimpiade (4 tahunan), tidak bisa lagi mengandalkan pola pembinaan jangka pendek berbasis agenda *multi event* olahraga tahunan. Semua sistem harus mendukung pola pembinaan siklus Olimpiade (4 tahunan) ini, mulai dari masa kepengurusan induk organisasi olahraga (KONI Pusat, NOC Indonesia dan PB/PP cabang olahraga) sebaiknya berakhir saat tahun yang sama saat Olimpiade selesai diselenggarakan. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional waktunya disesuaikan dengan kalender Olimpiade (antara Juli - Agustus), saat ini dilaksanakan pada 8 - 20 September 2024 terlalu berdekatan dengan waktu penyelenggaraan Olimpiade 2024 dikhawatirkan KONI Daerah selaku Pembina atlet di daerah cenderung mendorong atlet prioritas tampil di PON dibandingkan Olimpiade. China bisa menjadi contoh dimana penyelenggaraan PON China dilakukan setelah Olimpiade (November-Desember), semua atlet terbaik China akan tampil karena PON China sebagai ajang seleksi atlet untuk dibina menuju Olimpiade berikutnya.

- c. Perhatian lebih kepada persiapan fisik, mental dan *recovery* atlet dalam menghadapi *multi event* olahraga yang memiliki tekanan lebih besar dibandingkan saat mengikuti *single event*, keterlibatan pelatih fisik dan psikolog olahraga sejak masa persiapan sampai saat pertandingan dirasakan semakin penting untuk mendampingi atlet dan pelatih. Karena peran kesiapan fisik menghadapi tingkat persaingan yang tinggi dan jadwal pertandingan yang ketat serta mengurangi resiko terjadinya cedera, aspek psikologis/mental bisa mencapai 90% untuk menentukan kesuksesan atlet saat pertandingan serta tidak lupa peran tim *recovery* untuk mempercepat pemulihan para atlet agar kondisi fisik tetap prima saat pertandingan.

## 2.4 PERINGKAT ASIAN PARA GAMES

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DITINGKAT ASIA DAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2010	REALISASI 2014	REALISASI 2018	2023		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Peringkat pada Asian Para Games	14	9	5	8	6	125

Tabel 3.22 Capaian Peringkat pada Asian Para Games Tahun 2010, 2014, 2018 dan 2023

**Asian Para Games IV Hangzhou 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023** merupakan pesta olahraga disabilitas terbesar di benua Asia, pelaksanaan Asian Para Games dilakukan pada tanggal 22-28 Oktober 2023, termasuk dengan pembukaan dan penutupan. Seharusnya Asian Para Games dilaksanakan pada tahun 2022, akan tetapi karena pandemi Covid-19 yang masih menimpa tuan rumah membuat kebijakan penundaan selama 1 (satu) tahun ke tahun 2023.

Perhelatan Asian Para Games IV Hangzhou adalah perhelatan kedua untuk China sebagai tuan rumah, pertama adalah Asian Para Games I Guangzhou 2010. Pengunduran pelaksanaan *multi-event* ini tentu berdampak pada sistem pelatihan periodisasi dan persiapan olahragawan dan berpengaruh terhadap anggaran pemerintah, yang mana dalam satu tahun terdapat 2 (dua) multi event besar yakni ASEAN Para Games XII Kamboja 2-9 Juni 2023 dan Asian Para Games IV Hangzhou 22-28 Oktober 2023.

Asian Para Games 2022 Hangzhou, China mempertandingkan 22 Cabang Olahraga dengan 501 nomor yang dipertandingkan, dan diikuti oleh 44 negara anggota Asian Paralympic Committee (APC). Kontingen Indonesia terdiri dari 130 atlet, 81 *official* cabang olahraga, 7 *athletes competition partner*, 27 *Headquarter*, 2 Dokter, 2 Fisioterapis, 4 *Masseur*, dan 9 Media, mengikuti 12 dari 22 Cabang Olahraga yang dipertandingkan.



Gambar 3.20 Kontingen Indonesia pada pembukaan Asian Para Games Hangzhou

Kontingen Indonesia menargetkan masuk 10 besar Asia dengan perolehan 19 Emas, 23 Perak, dan 25 Perunggu, kemudian realisasi di lapangan menunjukkan bahwa Kontingen Indonesia dapat *finish* di peringkat 6 dengan perolehan medali 29 Emas, 30 Perak, dan 36 Perunggu. Dari 130 atlet yang dikirim, terdapat 88 atlet yang mendapatkan medali, dan 42 atlet yang tidak mendapatkan medali, persentase atlet yang mendapatkan medali adalah 67,69%.

Kontingen Indonesia dapat mengantongi 95 medali dari 130 atlet yang dibawa ke Hangzhou, China. Setiap atlet yang dikirim Indonesia memiliki rasio 0,7 untuk mendapatkan medali. Hal ini merupakan rasio terbanyak ketiga setelah China dengan rasio 1,2, dan Uzbekistan dengan rasio 0,8. Kontingen Indonesia dapat dikatakan merupakan kontingen yang efisien dan efektif apabila dilihat dari rasio atlet per medali di bawah ini.

MEDALI KONTINGEN INDONESIA  
4th ASIAN PARA GAMES 2023 HANGZHOU

NO	CABOR	TARGET MEDALI			REALISASI MEDALI		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU	EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	PARA ATLETIK	4	5	4	5	7	4
2	PARA BULUTANGKIS	4	4	4	5	5	4
3	PARA TENIS MEJA	0	0	2	0	0	4
4	PARA RENANG	1	2	2	3	1	1
5	PARA ANGKAT BERAT	0	1	1	0	2	1
6	PARA MENEMBAK	0	2	2	0	0	0
7	PARA PANAHAN	0	1	1	0	0	2
8	PARA BALAP SEPEDA	2	2	2	3	4	4
9	BOCCIA	0	0	1	1	1	1
10	BLIND JUDO	0	0	2	1	0	2
11	PARA CATUR	5	3	2	10	7	8
12	LAWN BOWLS	3	3	2	1	3	5
		19	23	25	29	30	36

Tabel 3.23 Perolehan medali pada Asian Para Games IV Hangzhou Tahun 2023

Rank	NPC	Gold	Silver	Bronze	Total Medal	Athlete	Ratio Athlete/Medal
1	<a href="#">China (CHN)*</a>	214	167	140	521	439	1,2
2	<a href="#">Iran (IRI)</a>	44	46	41	131	210	0,6
3	<a href="#">Japan (JPN)</a>	42	49	59	150	259	0,6
4	<a href="#">South Korea (KOR)</a>	30	33	40	103	345	0,3
5	<a href="#">India (IND)</a>	29	31	51	111	300	0,4
6	<a href="#">Indonesia (INA)</a>	29	30	36	95	130	0,7
7	<a href="#">Thailand (THA)</a>	27	26	55	108	307	0,4
8	<a href="#">Uzbekistan (UZB)</a>	25	24	30	79	103	0,8

Tabel 3.24 Rasio Medali

Kontingen Indonesia menduduki ranking ke-6 klasemen akhir dengan raihan 29 Emas, 30 Perak, dan 36 Perunggu. Klasemen Medali Akhir selengkapnya dapat dilihat berikut ini:



Gambar 3.21 Medali dan klasemen pada Asian Para Games 2022

Pencapaian perolehan medali Kontingen Indonesia pada Asian Para Games IV Hangzhou, China sebagai berikut:

**a. 8 Sub Disiplin Cabang Olahraga berhasil meraih Medali Emas**

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali (Emas-Perak-Perunggu)
1	Atletik	5-7-4
2	Boccia	1-1-1
3	Bulutangkis	5-5-4
4	Balap Sepeda	3-4-4
5	Catur	10-7-8
6	Judo Tunanetra	1-0-2
7	Lawn Bowls	1-3-5
8	Renang	3-1-1
Total		29-28-29

Tabel 3.25 Cabang Olahraga berhasil meraih Medali Emas di Asian Para Games 2022

**b. 3 Sub Disiplin Cabang Olahraga berhasil meraih Medali**

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali (Emas-Perak-Perunggu)
1	Angkat Berat	0-2-1
2	Panahan	0-0-2
3	Tenis Meja	0-0-4
Total		0-2-7

Tabel 3.26 Cabang Olahraga berhasil meraih Medali di Asian Para Games 2022

Secara keseluruhan berdasarkan target awal yang dicanangkan yaitu meraih 19 Emas, 23 Perak, dan 25 Perunggu dan berada pada peringkat ke 10 ranking medali akhir pada Asian Para Games IV Hangzhou, China, kemudian realisasi target adalah 29 Emas (Surplus 10 Emas), 30 Perak (Surplus 7 Perak), dan 36 Perunggu (Surplus 11 Perunggu) dan peringkat akhir ke-6 (meningkat 4 peringkat). Namun sayangnya, cabang olahraga menembak gagal memenuhi ekspektasi target 2 perak dan 2 perunggu dengan pulang tanpa membawa medali satupun. Pemecahan Rekor pada Asian Para Games IV Hangzhou, China oleh olahragawan Indonesia berada pada 2 (dua) cabang olahraga yaitu Cabang Olahraga Atletik dan Cabang Olahraga Renang, dari atletik terdapat 4 olahragawan, sedangkan dari renang terdapat 2 olahragawan dengan 13 rekor terpecahkan. 2 Rekor Dunia, 3 Rekor Asia, dan 8 Rekor Asian Para Games dengan rincian sebagai berikut :

**a. Rekor Dunia**

- Karisma Evi Tiarani (T42 - Atletik) memecahkan 2 (dua) Rekor Dunia yaitu pada nomor *Women's 100m - T42* dengan catatan waktu 14.37 detik dan *Women's Long Jump T-42* dengan jarak 4.16 m.



Gambar 3.22 Karisma Evi Tiarani (T42 - Atletik) memecahkan 2 (dua) Rekor Dunia

b. Rekor Asia

- Karisma Evi Tiarani (T42 - Atletik) sekaligus memecahkan Rekor Asia pada nomor *Women's 100m - T42* dengan catatan waktu 14.37 detik dan *Women's Long Jump T-42* dengan jarak 4.16 m.
- Maulana Rifky Yavianda ( S12 - Renang) berhasil memecahkan Rekor Asian pada nomor *Men's 100m Backstroke* dengan catatan waktu 01.03.55 detik.

c. Rekor Asian Games

- Saptoyogo Purnomo (T37 - Atletik) berhasil memecahkan Rekor Asian Para Games pada nomor *Men's 100m - T37* dengan catatan waktu 11.35 detik.



Gambar 3.23 Saptoyogo Purnomo (T37 - Atletik) berhasil memecahkan Rekor Asian Para Games

- Saptoyogo Purnomo (T37 - Atletik) berhasil memecahkan Rekor Asian Para Games pada nomor *Men's 200m - T37* dengan catatan waktu 23.34 detik.
- Ni Made Arianti Putri (T12 - Atletik) berhasil memecahkan Rekor Asian Para Games pada nomor *Women's 100m - T12* dengan catatan waktu 12.52 detik.
- Karisma Evi Tiarani (T42 - Atletik) sekaligus memecahkan Rekor Asian Para Games pada nomor *Women's 100m - T42* dengan catatan waktu 14.37 detik dan *Women's Long Jump T-42* dengan jarak 4.16 m.
- Alfin Nomleni (T20 - Atletik) berhasil memecahkan Rekor Asian Para Games pada nomor *Men's 400m - T20* dengan catatan waktu 49.08.00 detik.
- Partin (T42 - Atletik) berhasil memecahkan Rekor Asian Para Games pada nomor *Men's 100m - T42* dengan catatan waktu 12.24 detik.

Perbandingan capaian prestasi Indonesia pada Asian Para Games IV Hangzhou Tahun 2023 dengan Asian Para Games III Jakarta Tahun 2018 dan Asian Para Games II Incheon Tahun 2014 sebagai berikut:

No	Event	Emas	Perak	Perunggu	Peringkat	Negara Peserta
1	Asian Para Games 2014	9	11	18	9	36
2	Asian Para Games 2018	37	47	51	5	43
3	Asian Para Games 2022	29	30	36	6	44

Tabel 3.27 Perbandingan capaian prestasi Indonesia pada Asian Para Games 2023, 2018, 2014

Untuk menghadapi Asian Para Games IV Hangzhou tahun 2023, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah melaksanakan Pemusatan Latihan Nasional kepada NPC Indonesia.

Fasilitasi untuk dukungan Asian Para Games IV Hangzhou Tahun 2023 dilakukan dengan mekanisme bantuan kepada NPC Indonesia dalam rangka pengiriman kontingen Indonesia mengikuti Asian Para Games IV Hangzhou Tahun 2023. Jumlah fasilitasi tersebut sebesar Rp 28.529.404.402,- (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Empat Ratus Dua Rupiah).



Gambar 3.24 Pengukuhan dan Pelepasan Kontingen Indonesia pada Asian Para Games 2022

Sebagai bentuk apresiasi kepada Olahragawan dan Pelatih yang sudah berprestasi pada Asian Para Games IV Hangzhou 2022 Tahun 2023, sesuai Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, dan Pelatih Olahraga Berprestasi Pada Penyelenggaraan *Asian Para Games IV Hangzhou 2022* yang dilaksanakan di tahun 2023, maka Kemenpora telah memberikan penghargaan dalam bentuk bonus kepada para Olahragawan, Pelatih, Asisten Pelatih dan Tenaga Pendukung yang berprestasi dimaksud.

Hambatan yang terjadi pada saat selama berlangsungnya pembinaan atlet sampai dengan pelaksanaan Asian Para Games IV Hangzhou 2022 Tahun 2023 berlangsung diantaranya:

1. Periodisasi Pemusatan Latihan Nasional masih berbasis *event* belum mempertimbangkan program jangka panjang. Pembinaan yang berkelanjutan akan membuat kondisi internal olahragawan menjadi lebih siap dan mungkin bisa mendapatkan prestasi yang lebih optimal.
2. Belum meratanya pembinaan atlet disabilitas di Tingkat Provinsi maupun pada Kab/Kota.
3. Terbatasnya informasi dan media dalam pemberitaan persiapan maupun perkembangan olahraga disabilitas di media umum.

Adapun upaya perbaikan ke depan pada Asian Para Games dalam rangka mempertahankan peningkatan mempertahankan prestasi di Asian Paragames 2026:

- Penerapan IPTEK Keolahragaan terkini secara efektif dan tepat guna sudah terbukti mampu mendorong pencapaian prestasi olahraga untuk bisa bersaing menghadapi tantangan dan tingginya tingkat persaingan memperoleh medali di tingkat Asia dan Dunia. Semua komponen pembinaan olahraga mulai dari Pembina, Pelatih dan Olahragawan harus bisa dan mau bekerjasama dengan tenaga keolahragaan *sports sciences* (lokal & asing) demi kemajuan prestasi olahraga di Indonesia.
- Program pembinaan olahraga yang *continue* dan sesuai dengan siklus Olimpiade (4 tahunan), tidak bisa lagi mengandalkan pola pembinaan jangka pendek berbasiskan agenda *multi event* olahraga tahunan.
- Perhatian lebih kepada persiapan fisik, mental dan *recovery* atlet dalam menghadapi *multi event* olahraga yang memiliki tekanan lebih besar dibandingkan saat mengikuti *single event*, keterlibatan pelatih fisik dan psikolog olahraga sejak masa persiapan sampai saat pertandingan dirasakan semakin penting untuk mendampingi atlet dan pelatih. Karena peran kesiapan fisik menghadapi tingkat persaingan yang tinggi dan jadwal pertandingan yang ketat serta mengurangi resiko terjadinya cedera, aspek psikologis/mental bisa mencapai 90% untuk menentukan kesuksesan atlet saat pertandingan serta tidak lupa peran tim *recovery* untuk mempercepat pemulihan para atlet agar kondisi fisik tetap prima saat pertandingan.

## 2.5 PERSENTASE ATLET JUNIOR YANG BERPRESTASI DI TINGKAT INTERNASIONAL

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DITINGKAT ASIA DAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Atlet Junior yang berprestasi di tingkat internasional	n/a	n/a	n/a	80	81	101

Tabel 3.28 Capaian Persentase Atlet Junior yang berprestasi di tingkat internasional

Atlet junior yang berprestasi di Tingkat Internasional didefinisikan sebagai olahragawan andalan yang berprestasi di tingkat internasional. Olahragawan Andalan Nasional merupakan olahragawan yang dibina pada level Nasional. Atlet junior yang berprestasi dapat menjadi olahragawan andalan nasional berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dihitung dengan cara membandingkan jumlah Olahragawan Andalan Nasional yang berprestasi di Multievent Internasional sebanyak 930 dengan Jumlah Olahragawan Andalan Nasional yang difasilitasi sejumlah 1.146 Orang tahun 2023. Rincian jumlah olahragawan andalan yang berprestasi sebagai berikut :

1. ASIAN Games Hangzhou 2023 sebanyak 93 Olahragawan.
2. ASIAN Paragames Hangzhou 2023 sebanyak 78 Olahragawan.
3. SEA Games Kamboja 2023 sebanyak 522 Olahragawan.
4. ASEAN Paragames Kamboja 2023 sebanyak 237 Olahragawan.

Dalam mendukung pencapaian indikator di atas Kemenpora telah melaksanakan Pemusatan Latihan Nasional kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan National *Paralympic Committee* (NPC). Cabang olahraga yang difasilitasi adalah cabang olahraga yang berpotensi mendapatkan medali emas, sehingga bantuan yang diberikan optimal untuk peningkatan prestasi olahraga nasional. Pola pembinaan olahraga prestasi di Indonesia dilaksanakan melalui pola pembinaan olahragawan jangka panjang (LTAD). LTAD sebagaimana dimaksud dalam PERMENPORA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang dilaksanakan sesuai tahap perkembangan Olahragawan yang terdiri atas: a.) mulai aktif (*active start*); b. fondasi (*Fundamentals*); c. belajar berlatih (*learn to train*); d. berlatih untuk latihan (*train to train*); e. berlatih untuk berkompetisi (*train to compete*); f. berlatih untuk juara (*train to win*); dan g. hidup aktif (*active for life*).



Gambar 3.25 Jenjang Ideal Pembinaan Atlet

Pelaksanaan LTAD memperhatikan usia biologis Olahragawan dan tingkat kematangan individu yang didukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan. Tahapan mulai aktif (*active start*) dilakukan melalui aktivitas dan permainan yang merangsang perkembangan koordinasi, keterampilan sosial, emosi, imajinasi, percaya diri, dan menghargai diri sendiri. Tahapan pondasi (*fundamentals*) dilakukan melalui aktivitas fisik yang menyenangkan untuk melatih keterampilan gerak dasar. Tahapan belajar berlatih (*learn to train*) dilakukan melalui aktivitas fisik untuk mengembangkan dan mengkonsolidasikan keterampilan teknis.

Atlet junior mulai latihan (*train to train*) dilakukan melalui spesialisasi satu cabang olahraga yang teridentifikasi sebagai bakat Olahragawan untuk dikembangkan lebih lanjut, pada tahap ini dimulai proses pembinaan olahraga prestasi atlet junior yang dipusatkan melalui sentra pembinaan olahraga prestasi pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) yaitu usia 12 (dua belas) sampai 16 (enam belas) tahun untuk Olahragawan laki-laki; dan 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) tahun untuk Olahragawan perempuan.

Tahap selanjutnya adalah berlatih untuk berkompetisi (*train to compete*) dilakukan melalui spesialisasi pada satu cabang olahraga untuk mengoptimalkan kemampuan atletik, teknik, taktik, fisik, mental, emosional, serta melaksanakan latihan intensif dengan tujuan mempersiapkan atlet untuk berkompetisi. *Train to Compete* juga masih dilakukan untuk pola pembinaan pada PPLP mengingat Atlet yang dibina pada PPLP adalah rentang usia SMA. Pada tahap *train to compete* ini juga diisi oleh pembinaan olahraga prestasi pada Sekolah Khusus Olahraga dan PPLM yang merupakan atlet junior.

Tahapan berlatih untuk menjadi juara (*train to win*) merupakan aktivitas fisik, teknik, taktik, mental, dan gaya hidup untuk memaksimalkan performa dan memenangkan kompetisi nasional dan internasional. Train to win merupakan tahap akhir dari sistem pembinaan olahraga prestasi dimana Atlet menjadi Elit Nasional/Olahragawan Andalan yang diharapkan berprestasi pada event internasional.

Hambatan yang terjadi di Tahun 2023 yaitu :

1. Pada Multi Event SEA Games Kamboja, Indonesia kehilangan potensi 39 Medali emas dikarenakan Cabang Olahraga unggulan Indonesia tidak dipertandingkan di SEA Games Kamboja 2023, diantaranya dari Cabor Panahan, *Canoeing*, *Rowing*, Menembak, Bowling, dan Catur.
2. Pada *multi event* Asian Games Hangzhou pengaturan jadwal kompetisi nasional dan induk organisasi cabang olahraga perlu menyesuaikan dengan kompetisi *multi event* internasional. Di cabang olahraga bulutangkis, tim Indonesia menurunkan *full team* pada kejuaraan Hongkong Open dua minggu sebelum Asian Games dilaksanakan, hal ini mengakibatkan kondisi atlet bulutangkis tidak dalam kondisi *peak performance* pada saat Asian Games. Di cabang olahraga tenis atlet atas nama Aldila Sutjiadi masih bertanding menjelang Asian Games, juga kompetisi liga sepakbola Indonesia berlangsung saat Asian Games dilaksanakan dan beberapa babak Kualifikasi PON Cabor yang berdekatan dengan pelaksanaan Asian Games.
3. Pada *multi event* ASEAN Para Games Kamboja dan Asian Para Games Hangzhou pada umumnya terdapat kendala yaitu mempersiapkan atlet lini ke-2 untuk menanggulangi cedera pada saat mendekati *multi event* dan faktor psikologis masih belum mendapatkan perhatian pada saat pertandingan, karena bisa menjadi faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan atlet.

Adapun upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan prestasi internasional dari para atlet andalan yang di bina di masa yang akan datang diantaranya:

1. Kualitas dan Kuantitas Calon Atlet Berbakat, Pentingnya literasi fisik/keterampilan gerak multilateral pada saat mengikuti pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar sebagai pondasi, sehingga dapat menjadi kunci keberhasilan mencapai prestasi ketika dikembangkan lebih lanjut bagi anak-anak yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga tertentu. Proses ini tidak boleh terlambat dilakukan karena disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, ketika terlambat maka prestasi optimal dari bakat yang dimiliki anak di bidang olahraga akan lebih sulit untuk dicapai.
2. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Keolahragaan, Ketersediaan Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Pelatih Fisik, Dokter Spesialis Olahraga, Psikolog

- Olahraga, Analisis Pertandingan, Fisiologi Olahraga, Biomekanika, Nutrisi Olahraga, Fisioterapis dan Masseur Olahraga) yang berkualitas (sertifikat nasional/internasional) dengan jumlah yang proporsional dengan jumlah atlet yang dibina sehingga dapat menjamin terlaksananya proses latihan atlet yang berkualitas sehingga mampu melahirkan prestasi.
3. Sistem Kompetisi Berjenjang, Berkelanjutan dan Berkualitas, Pelaksanaan kompetisi secara berjenjang disesuaikan dengan kelompok usia dan dilaksanakan secara rutin dan kontinu mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional hingga internasional. Jadwal pelaksanaan kompetisinya diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling bertabrakan, demikian juga frekuensinya serta disesuaikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing cabang olahraga, dengan memperhatikan proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental dan emosional.
  4. Pemanfaatan *Sport Science* dan Ketersediaan Sistem Informasi Olahraga, Perkembangan *Sport Science* yang semakin cepat dan canggih serta kompleks, sehingga menjadi keharusan jika ingin berhasil bersaing meraih prestasi olahraga di tingkat internasional. Serta didukung ketersediaan informasi dan *big data analytics* keolahragaan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan arah dan kebijakan pengembangan olahraga di masa depan.
  5. Prasarana dan Sarana Olahraga sesuai Standar Internasional dan Nasional, Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga standar internasional yang jumlah memadai mutlak diperlukan ketika ingin meraih prestasi olahraga di tingkat internasional, terutama bagi cabang olahraga di mana kualitas peralatan dan perlengkapan pertandingan yang digunakan sangat menentukan keberhasilan meraih prestasi.

## 2.6 TINGKAT PRESTASI OLAHRAGA INDONESIA PADA LEVEL INTERNASIONAL

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DITINGKAT ASIA DAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	n/a	84,13	85,64	80	81,92	102

Tabel 3.29 Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional

Perbaikan pembinaan olahraga di antaranya melalui penguatan pembinaan atlet elite jangka panjang melalui penyelenggaraan training center, mendorong penyusunan regulasi desain olahraga di daerah, penyelenggaraan event olahraga internasional, mendorong penataan dan pengembangan wadah serta peningkatan kualitas pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan di daerah serta memfokuskan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Indonesia berperan aktif dalam *multi event* internasional yang bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antar bangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga. *Multi event* internasional yang Indonesia aktif ikuti antara lain Olimpiade dan Paralimpiade untuk tingkat dunia, Asian Games dan Asian Paragames untuk tingkat Asia dan SEA Games dan ASEAN Paragames untuk tingkat Asean.

Tingkat prestasi olahraga Indonesia pada level Internasional diperoleh berdasarkan hasil perhitungan pada perolehan medali dan peringkat Indonesia pada ajang Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, SEA Games dan Asean Paragames.

Rata-rata dihitung dari jumlah % peringkat dibagi 6 event. Sementara itu % peringkat diperoleh dari :

$$\text{Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia} = \frac{\text{Total Negara} - \text{Peringkat} + 1}{\text{Total Negara}}$$

Event	Medali Emas	Total Medali Emas	Peringkat	Total Negara	% Perolehan Medali Emas	% Peringkat
Olimpiade (2020)	1	339	55	206	0,29	73,79
Paralimpiade (2020)	2	539	43	163	0,37	74,23
Asian Games (2023)	7	482	13	45	1,45	73,33
Asian Paragames (2023)	29	502	6	43	5,78	88,37
SEA Games (2023)	87	584	3	11	14,90	81,82
Asean Paragames (2023)	159	475	1	11	33,47	100,00
Rata-Rata						81,92

Tabel 3.30 Rata-rata Persentase peringkat di 6 event

Sesuai dengan PP 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Pemerintah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional mulai tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan. Untuk itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Asisten Deputi Olahragawan Andalan memfasilitasi pengiriman Kontingen Indonesia pada *multi event* tingkat internasional pada tahun 2023. Pada tahun 2023, terdapat 4 *multi event* yaitu Asian Games Hangzhou, Asian Para Games Hangzhou, SEA Games Kamboja dan ASEAN Para Games Kamboja.

Merujuk Pasal 9 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional bahwa Fasilitas dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada *multi event* internasional meliputi biaya pendaftaran, *test* doping, akomodasi, konsumsi, transportasi dan uang saku selama mengikuti *multi event* dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan penyelenggara *multi event* internasional.

Perbandingan Tingkat Prestasi dan Target Indonesia dalam 3 Tahun Terakhir sebagai berikut :

TAHUN	TARGET	PERINGKAT PRESTASI
2021	70%	84,13%
2022	75%	85,64%
2023	80%	81,92%

Tabel 3.31 Perbandingan Tingkat Prestasi dan Target Indonesia dalam 3 Tahun Terakhir

Pelaksanaan Asian Games dan Asean Para Games Hangzhou yang sedianya dilaksanakan pada tahun 2022 mengalami perubahan jadwal dikarenakan negara China mengalami peningkatan varian Covid terbaru sehingga diprediksi akan berisiko terhadap para atlet dari seluruh negara Asia jika tetap dilaksanakan pada tahun tersebut. Perubahan pelaksanaan *multi event* ini tentu berdampak pada sistem pelatihan periodisasi dan persiapan atlet, yang mana dalam satu tahun terdapat 4 (dua) *multi event* besar yakni SEA Games dan ASEAN Para Games Kamboja, Asian Games dan Asian Paragames Hangzhou.

Meraih prestasi olahraga di tingkat internasional merupakan suatu proses panjang, butuh waktu 8-10 tahun untuk mencetak atlet berprestasi di tingkat internasional. Sehingga dibutuhkan kesabaran, ketekunan, konsistensi, kerja keras dan sinergi semua pemangku kepentingan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan, yaitu :

#### 1. Komitmen Nasional

Komitmen nasional dapat dilihat dengan adanya Peningkatan Prestasi Olahraga di Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games dan Asian Para Games sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai dengan siklus 5 (lima) tahunan.

#### 2. Dukungan Anggaran & Sistem Penghargaan

Ketersediaan anggaran berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan dan pemanfaatan yang efektif, efisien, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan anggaran dapat bersumber dari APBN,

APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dukungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) BUMN dan Dunia Usaha, serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pentingnya sistem penghargaan dan pemberian rasa aman bagi pelaku olahraga adalah suatu faktor untuk menjamin bahwa proses pembinaan olahraga berjalan baik sehingga tujuan dari pembangunan olahraga di dalam Desain Besar dapat tercapai.

### 3. Kualitas dan Kuantitas Calon Atlet Berbakat

Pentingnya literasi fisik/keterampilan gerak multilateral pada saat mengikuti pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar sebagai pondasi, sehingga dapat menjadi kunci keberhasilan mencapai prestasi ketika dikembangkan lebih lanjut bagi anak-anak yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga tertentu. Proses ini tidak boleh terlambat dilakukan karena disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, ketika terlambat maka prestasi optimal dari bakat yang dimiliki anak di bidang olahraga akan lebih sulit untuk dicapai.

### 4. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Keolahragaan

Ketersediaan Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Pelatih Fisik, Dokter Spesialis Olahraga, Psikolog Olahraga, Analis Pertandingan, Fisiologi Olahraga, Biomekanika, Nutrisi Olahraga, Fisioterapis dan Masseur Olahraga) yang berkualitas (sertifikat nasional/internasional) dengan jumlah yang proporsional dengan jumlah atlet yang dibina sehingga dapat menjamin terlaksananya proses latihan atlet yang berkualitas sehingga mampu melahirkan prestasi.

### 5. Sistem Kompetisi Berjenjang, Berkelanjutan dan Berkualitas

Pelaksanaan kompetisi secara berjenjang disesuaikan dengan kelompok usia dan dilaksanakan secara rutin dan kontinu mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional hingga internasional. Jadwal pelaksanaan kompetisinya diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling bertabrakan, demikian juga frekuensinya serta disesuaikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing cabang olahraga, dengan memperhatikan proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental dan emosional.

### 6. Pemanfaatan *Sport Science* dan Ketersediaan Sistem Informasi Olahraga

Perkembangan *Sport Science* yang semakin cepat dan canggih serta kompleks, sehingga menjadi keharusan jika ingin berhasil bersaing meraih prestasi olahraga di tingkat internasional. Serta didukung ketersediaan informasi dan *big data analytics* keolahragaan sebagai dasar pengambilan

keputusan dalam menentukan arah dan kebijakan pengembangan olahraga di masa depan.

7. Prasarana dan Sarana Olahraga sesuai Standar Internasional dan Nasional  
Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga standar internasional yang jumlah memadai mutlak diperlukan ketika ingin meraih prestasi olahraga di tingkat internasional, terutama bagi cabang olahraga di mana kualitas peralatan dan perlengkapan pertandingan yang digunakan sangat menentukan keberhasilan meraih prestasi.

Olimpiade 2024 akan berlangsung di Paris, Prancis, pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Saat ini, Indonesia sudah mengamankan enam tiket yang berasal dari cabang olahraga Panahan, Senam, Panjat Tebing dan Menembak, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Cabang Olahraga
1.	Arif Dwi Pangestu	Panahan
2.	Diananda Choirunisa	Panahan
3.	Rifda Irfanaluthfi	Senam Artistic
4.	Desak Made Rita Kusuma Dewi	Panjat Tebing
5.	Rahmad Adi Mulyono	Panjat Tebing
6.	Fathur Gustafian	Menembak

Tabel 3.32 Enam Atlet lolos Olimpiade 2024, Paris dari 4 Cabang Olahraga

Cabang Olahraga dan atlet yang masih Berpotensi Lolos Kualifikasi Olimpiade 2024 Paris, Prancis dengan Dasar Pertimbangan :

a. Pencapaian Prestasi Mengikuti Asian Games 2022 Hangzhou, China

No	Cabang Olahraga	Pencapaian Prestasi Asian Games 2022	Potensi Lolos Olimpiade 2024
1	Angkat Besi	1-0-0	Peluang Lolos 2 putra dan 2 putri
2	Balap Sepeda	1-01	Peluang Lolos BMX (1 putra dan 1 putri), Track (2 putra) dan 1 putri <i>Road Race</i> (Masih Dalam Konfirmasi)
3	<i>Rowing</i>	0-0-3	Peluang Lolos 1 putra dan 2 putri
4	<i>SkateBoarding</i>	0-1-0	Peluang Lolos 1 putri/putra
5	Panahan	0-0-2	Peluang Lolos 3 putra dan 3 putri (Sudah lolos 1 putra dan 1 putri)
6	Menembak	2-0-3	(Sudah lolos 1 putra)
7	Tenis	0-0-1	Peluang Lolos 2 putri
8	Panjat Tebing	1-2-2	Peluang Lolos 2 putra Dan 2 putri (Sudah lolos 1 putra dan 1 putri)

Tabel 3.33 Pencapaian Prestasi Mengikuti Asian Games 2022 Hangzhou, China



b. Potensi Kelolosan Atlet Berdasarkan sistem Kualifikasi Olimpiade Paris, Prancis Tahun 2024

No	Cabang Olahraga	Pencapaian Prestasi Asian Games 2022	Potensi Lolos Olimpiade 2024
1	Bulutangkis	Quarterfinal	Peluang Lolos Single: 2 putra dan 1 putri; Double: 4 putra dan 2 putri; dan Mixed Double: 1 putra dan 1 putri
2	Canoe	Rank 4	Peluang Lolos 2 putri
3	Taekwondo	Quarterfinal	Peluang Lolos 1 putri (ada 3 atlet (1 putra dan 2 putri) yang sudah memenuhi persyaratan <i>Universality Places</i> )
4	Atletik	Rank 5	Peluang Lolos 1 putra (Zohri 100 m putra: 10.12 detik limit 10.00 detik)
5	Renang	Rank 6	Peluang Lolos 1 putra (Farel <i>personal best</i> : 100 m gaya punggung : 55.80 detik (limit B: 54.01 detik dan 200 m gaya punggung: 02.01.8 menit (limit B: 1:58.09 menit) Dwiki Raharjo Personal Best 100 m gaya dada 1:02.25 menit (limit B: 59.79 detik) Joe Aditya Personal Best 50 m gaya bebas: 23.41 detik (limit B: 22.07) 100 m gaya bebas: 50.73 detik (limit B: 48.58 detik) 100 m gaya kupu: 53.17 detik (limit B: 51.93 detik)
6	Judo	6 Besar	Peluang lolos 1 putri/putra berdasarkan <i>Rank Dunia Kuota Kontinental</i>
7	Triathlon	Rank 9	Peluang Lolos 1 putra (rank 202 dunia; Untuk Tripartite <i>rank</i> 180 dunia)
8	<i>Diving</i>	Rank 8	Peluang lolos 1 putri ( <i>World Championship</i> 2023 rank 27, rank 1-12 sudah lolos Olimpiade 2024) Masih ada kuota 12 pada <i>World Championship</i> 2024
9	Marathon	Rank 7	Peluang lolos 1 putra (progres waktu <i>World Championship</i> 2023: 2:04.41 Asian Games 2022 1:59.06 Pelatnas Mandiri) Masih ada Kuota 13 <i>World Championship</i> 2024 Prediksi waktu untuk lolos 1:54.03
10	Beach Volleyball	Quarterfinal	Peluang lolos 2 putra, Sudah lolos Kualifikasi <i>sub zone</i> Asia Tenggara sehingga berhak ikut Kualifikasi Asia putra dan putri

Tabel 3.34 Potensi Kelolosan Atlet Berdasarkan sistem Kualifikasi Olimpiade Paris, Prancis Tahun 2024

c. Cabang Olahraga Tidak Partisipasi Asian Games 2022 Hangzhou lolos/Peluang lolos Olimpiade 2024 Paris, Prancis

No	Cabang Olahraga	Pencapaian Prestasi Asian Games 2022	Potensi Lolos Olimpiade 2024
1	Senam Artistik	Tidak Partisipasi	Sudah Lolos 1 putri
2	Surfing	Tidak Dipertandingkan	Peluang Lolos 1 putra

Tabel 3.35. Cabang Olahraga yang tidak berpartisipasi Asian Games 2022 Hangzhou lolos/Peluang lolos Olimpiade 2024 Paris, Prancis

Sedangkan Paralimpiade 2024 akan berlangsung di Paris, Perancis, pada 28 Agustus hingga 8 September. Saat ini, NPC Indonesia sudah mengamankan sembilan tiket yang berasal dari cabang olahraga Atletik, Sepeda, Menembak dan Panahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Atlet	Cabor
1	Saptoyogo Purnomo	Atletik
2	Kharisma Evi Tiarani	Atletik
3	Muh. Fadli Imammudin	Sepeda
4	Bolo Triyanto	Menembak
5	Hanik Puji Astuti	Menembak
6	Kholidin	Panahan
7	Setiawan	Panahan
8	Ken Swagumilang	Panahan
9	Teodora Audi	Panahan

Tabel 3.36 Sembilan Atlet lolos Paralimpiade 2024, Paris dari 4 Cabang Olahraga

DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga. DBON bertujuan: (a) meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat; (b) meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi Nasional; dan (c) memajukan perekonomian nasional berbasis Olahraga. DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. DBON mencakup olahraga rekreasi dan masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan industri olahraga



Gambar 3.26 14 Cabang Olahraga Prioritas dan 5 Cabang Olahraga Prioritas Paralympic dalam DBON

Dalam hal pembinaan Kemenpora telah melakukan pembibitan melalui pemanduan bakat dan identifikasi bakat, Pembinaan olahragawan muda melalui Sekolah Khusus Olahraga (SKO), Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas (SKODI), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN), dan Pengembangan olahragawan elit nasional melalui pemusatan latihan nasional dalam rangka menghadapi *muti event* internasional.

Proses pembinaan didukung juga oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sistem informasi dan *big data analytics* olahraga nasional sebagai dasar kebijakan dan menjaring talenta atlet,
- b. Pengembangan dan penyusunan kurikulum khusus atlet, dan
- c. Fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan olahraga nasional dan internasional secara berjenjang berdasarkan kelompok usia.

Berkaitan dengan Sarana dan Prasarana olahraga prestasi dilaksanakan pembangunan *Cibubur Youth Elite Sport Center* untuk pembinaan dan pengembangan Olahragawan Elite Junior Nasional dan Pembangunan *Paralimpic Training Center Karanganyar* untuk pembinaan dan pengembangan Para Olahragawan Elite Nasional yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

Selanjutnya menyusun rencana pembangunan prasarana dan sarana jangka panjang dengan memperhatikan pemetaan potensi cabang olahraga unggulan daerah, melakukan pemetaan potensi cabang olahraga masing-masing daerah sehingga pemerataan dan standarisasi prasarana dan sarana olahraga dimaksud menyesuaikan potensi unggulan daerah, dan fasilitasi *sport science* sarana olahraga pada pusat-pusat pembinaan olahraga di pusat maupun daerah.

Dalam hal tenaga keolahragaan bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga olahraga baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan *sport science*, pengembangan sistem pendidikan dan sertifikasi SDM *sport science*, dan memfasilitasi pelatihan wasit/juri dan pelatih serta SDM Olahraga Pendidikan bersertifikat nasional dan internasional.

Belum sepenuhnya target - target DBON masuk dalam kegiatan pada RKP 2022-2024 sehingga dukungan anggaran pada masing-masing K/L/D dalam pelaksanaan DBON belum optimal (terutama SLOMPN, dan SKO Cibubur). Perlunya dukungan LPDP untuk mendukung keberlanjutan SLOMPN, Kurangnya tingkat partisipasi dan kebugaran masyarakat, sehingga perlu optimalisasi peran Kab/Kota untuk menggerakkan olahraga masyarakat, Belum adanya *Youth Sport Center* termasuk untuk disabilitas, Perlunya penyatuan O2SN dan POPNAS, dan belum terbentuknya ekosistem industri olahraga masih bersifat parsial. Belum optimalnya dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pusat (Pokja K/L), Perlu adanya Peraturan mengenai Kurikulum Khusus Olahragawan pada lembaga pendidikan.

Dalam rangka peningkatan prestasi Indonesia di tingkat Asia maka hal yang dapat dilakukan adalah memprioritaskan cabang olahraga peraih medali Asian Games berdasarkan *number of event*, mengikuti *event-event* yang menjadi babak kualifikasi, selain itu sesuai dengan paradigma dalam Desain Besar Olahraga Nasional perlu ditetapkan bahwa Olimpiade sebagai target tertinggi sehingga ajang regional ditempatkan sebagai sasaran antara, sehingga kontingen yang berpartisipasi pada ajang regional yang berpeluang mendapatkan medali dengan seleksi dan pembinaan yang berkualitas.

Dalam rangka pencapaian prestasi olimpiade sesuai dengan target yang ada dalam Desain Besar Olahraga Nasional, maka diperlukan percepatan strategi diantaranya:

1. Memprioritaskan pembinaan cabang olahraga peraih medali pada event internasional seperti *Olympic Games* tahun 2020 berdasarkan nomor pertandingan;
2. Mengikuti berbagai event dan melakukan training camp dalam dan luar negeri untuk membentuk lingkungan yang *excellence*;
3. Implementasi *sport science culture*;
4. Memprioritaskan pembinaan cabang olahraga peraih medali kejuaraan dunia junior (tahun 2019-2022) berdasarkan *number of event* yang memiliki peluang medali pada *Olympic Games* tahun 2024;
5. Bantuan anggaran khusus atlet; dan
6. Melakukan *lobby* agar cabor dan nomor potensial medali emas Indonesia bisa dipertandingkan pada *Olympic Games* 2024.

### 3. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG KESEKRETARIATAN

#### 3.1 INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN STRATEGIS : TERWUJUDNYA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG BERKINERJA, BERSIH, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN MELAYANI

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
INDEKS REFORMASI BIROKRASI	67,55	69,77	69,80	73,1	69,80	95,48

Tabel 3.37 Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Kemenpora

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintah efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks ini diperoleh dari hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan setiap tahun kepada seluruh Kementerian/Lembaga.

Formulasi Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi:

$$\sum \sum \text{Capaian RB General} + \text{RB Tematik Kemenpora}$$

Komponen dan Kriteria Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada Tabel 3.38 dan 3.39 dibawah ini:

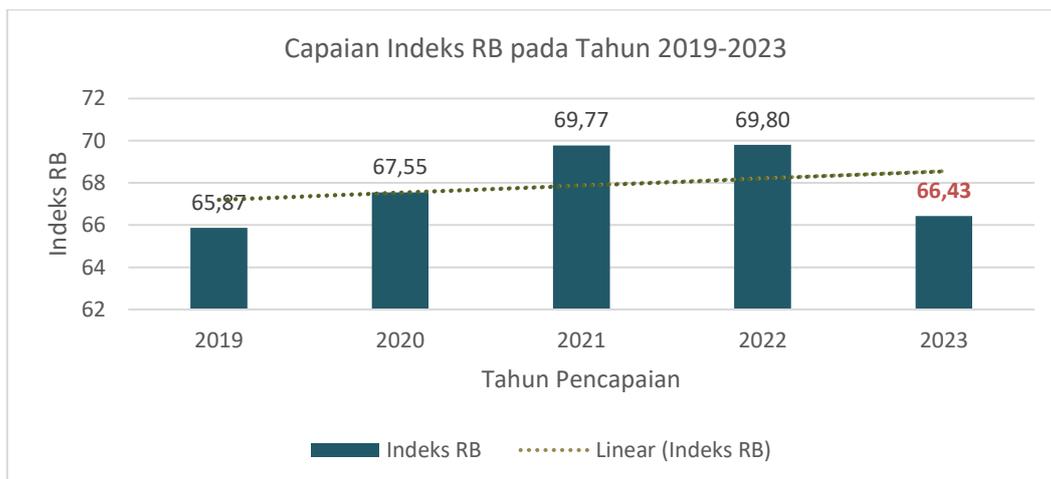
KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT
<b>RB GENERAL</b>	<b>100</b>
Capaian Strategi Pelaksanaan RB General	10
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40
Capaian Sasaran Strategi	50
<b>RB TEMATIK</b>	<b>10</b>
Capaian RB Tematik	10
<b>Total Bobot Max. RB General &amp; Tematik</b>	<b>110</b>

Tabel 3.38 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

KATEGORI	BOBOT	PREDIKAT
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	> 70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Tabel 3.39 Kriteria Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan program prioritas pertama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yaitu **“Perbaikan tata Kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik”**. Selain itu juga ditunjukkan dengan Indeks RB Kemenpora yang memiliki grafik meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.17 Capaian Indeks RB Kemenpora Tahun 2019-2023

Merujuk pada grafik di atas, capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019-2022 meningkat cukup signifikan. Namun, capaian Tahun 2023 masih dalam proses peninjauan ulang oleh Kemenpan-RB terhadap penilaian dari beberapa instansi meso yang masih perlu disesuaikan. Capaian Indeks RB Kemenpora Tahun 2023 berdasarkan <https://portalrb.menpan.go.id/> sementara ini sebesar 66,43 dari target 73,1 dan rata-rata RB Nasional adalah 75,65. Hal ini dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan RB Nasional yaitu pada dokumen perencanaan Road Map RB 2020-2024 dan Evaluasi RB sehingga secara teknis, komponen dan penilaiannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Rincian capaian Reformasi Birokrasi

Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 dan 2023 yang sangat tampak perbedaannya berdasarkan komponen penilaian, dapat dilihat pada Tabel 3.40 dan 3.41 berikut:

NO	KOMPONEN PENILAIAN 2022	BOBOT	NILAI 2022
A	<b>Komponen Pengungkit</b>		
I	<b>Pemenuhan</b> 1) Manajemen Perubahan 2) Penataan Deregulasi Kebijakan 3) Penataan dan Penguatan Organisasi	20,00	16,61
	- Penataan Tatalaksana - Penataan Sistem Manajemen SDM - Penguatan Akuntabilitas - Penguatan Pengawasan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
II	<b>Hasil Antara Area Perubahan</b> - Kualitas Pengelolaan Aset - ASN Profesional - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Kualitas Pengelolaan Anggaran - Kualitas Pelayanan Publik - Kapabilitas APIP - Maturitas SPIP - Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik - Kualitas Pengelolaan Kearsipan - Reformasi Hukum	10,00	6,11
III	<b>Reform</b> - Manajemen Perubahan - Penataan Deregulasi Kebijakan - Penataan dan Penguatan Organisasi - Penataan Tatalaksana - Penataan Sistem Manajemen SDM - Penguatan Akuntabilitas - Penguatan Pengawasan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	30,00	15,95
	<b>Sub Total Komponen Pengungkit Kementerian</b>	<b>60,00</b>	<b>38,67</b>
B	<b>Komponen Hasil</b>		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,69
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,52
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,88
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,04
	<b>Sub Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>31,13</b>
	<b>Total Indeks Reformasi Birokrasi 2022</b>	<b>100,00</b>	<b>69,80</b>

Tabel 3.40 Rincian Capaian Indeks RB Tahun 2022 Kemenpora

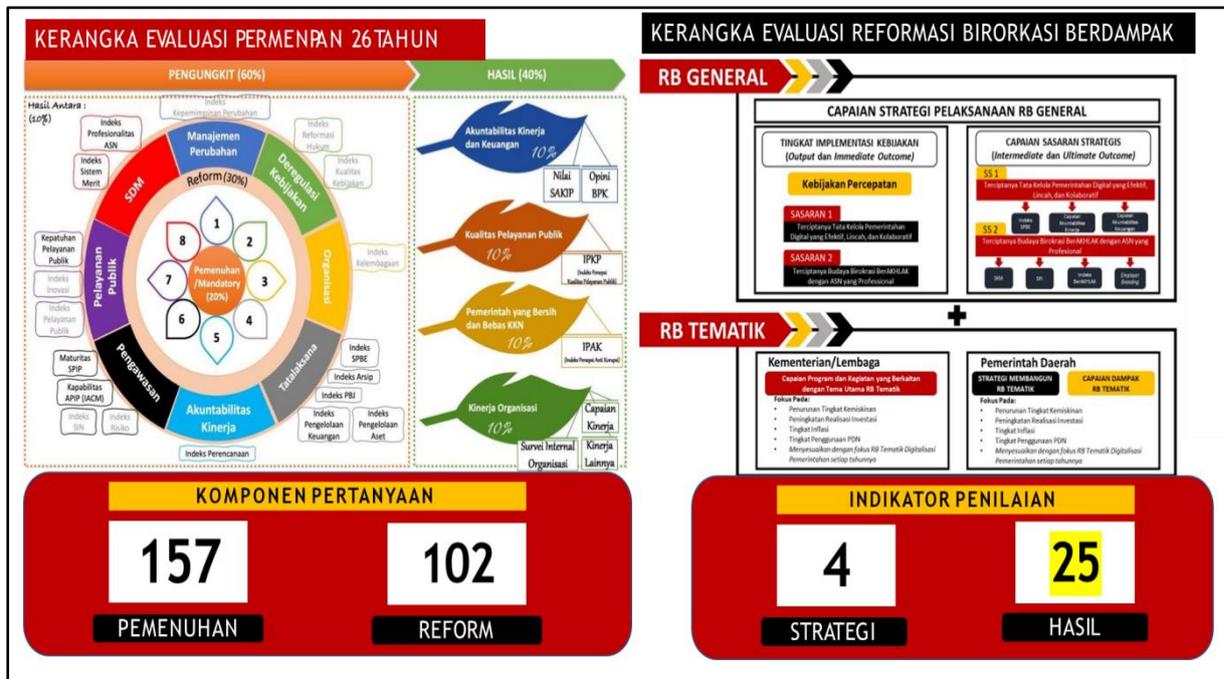


NO.	INDIKATOR KINERJA	BOBOT	SKOR	SKOR INDEX	%
<b>INDEKS RB KEMENPORA 2023</b>		<b>110</b>	<b>1413,38</b>	<b>66,43</b>	<b>60,39%</b>
<b>RB GENERAL</b>		<b>100</b>	<b>1341,38</b>	<b>63,59</b>	<b>63%</b>
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	3	3	100%
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	85,56	5,99	85,57%
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	1,37	0,03	2%
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	0,80	0,32	16%
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,108	2,49	62%
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,5	0,5	17%
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	67,73	2,71	68%
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	90,23	1,8	90%
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4	20%
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	94,15	1,88	94%
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	87,67	1,75	88%
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	2,65	1,32	66%
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	2	0,6	40%
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	66,33	0,99	66%
15	Indeks Reformasi Hukum	1,5	67,82	1,02	68%
16	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	2,13	0,64	43%
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	19,63	0,39	20%
18	Indeks Sistem Merit	4	293,5	2,86	72%
19	Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,77	1,13	75%
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	55,55	0,83	55%
21	Indeks SPBE	9	3,35	6,03	67%
22	Capaian Prioritas Nasional	2	93,39	1,87	94%
23	Capaian IKU	8	85,71	4,65	58,12%
24	Opini BPK	5	5	5	100%
25	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	57,2	2,29	57%
26	Indeks BerAkhlik	4	1,95	0,08	2%
27	Survei Penilaian Integritas	10	66	6,6	66%
28	Survei Kepuasan Masyarakat	8	80,28	6,42	80%
<b>RB TEMATIK</b>		<b>4</b>	<b>72</b>	<b>2,84</b>	<b>71%</b>
1	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,8	0,8	0,8	100%
	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,2	0,4	0,4	33%
	Total Bobot Pengentasan Kemiskinan	<b>2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>60%</b>
2	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi	0,8	0,8	0,8	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA	BOBOT	SKOR	SKOR INDEX	%
	Pembangunan)				
	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,2	70	0,84	70%
	Total Bobot Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	70,8	1,64	82%

Tabel 3.41 Rincian Capaian Indeks RB Tahun 2023 Kemenpora

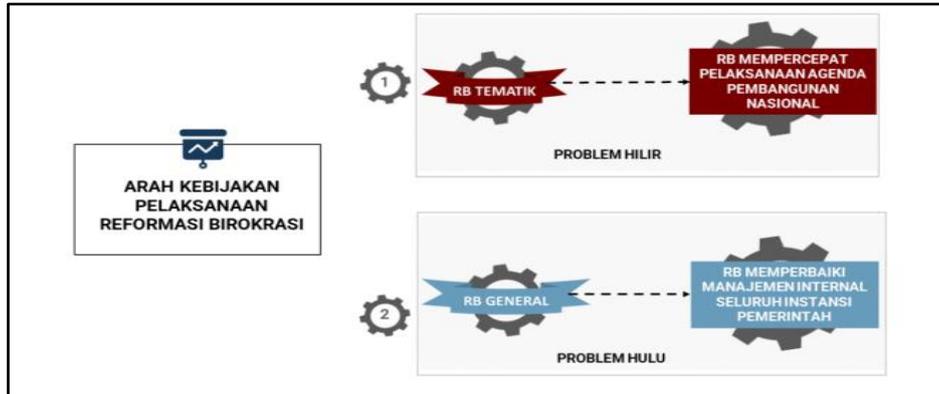
Pada tahun 2023 terdapat perubahan arah kebijakan reformasi birokrasi Nasional, yang semula berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024 menjadi Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024. Perubahan Kerangka Reformasi Birokrasi tertera pada gambar berikut:



Gambar 3.27 Perubahan Kerangka Reformasi Birokrasi

Untuk itu, Kemenpora perlu menyesuaikan perubahan kebijakan dimaksud dengan menerbitkan pedoman baru yang sebelumnya berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2021 tentang Road Map RB Kemenpora Tahun 2020-2024 menjadi Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 129 Tahun 2023 tentang Road Map RB Kemenpora Tahun 2020-2024. Perubahan ini bertujuan untuk menajamkan hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden RI. Perubahan ini meliputi substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak,

fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi. Arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:



Gambar 3.28 Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

- 1) **RB General** yang merupakan problem hulu, guna memperbaiki manajemen internal instansi pemerintah; dan
- 2) **RB Tematik** ialah problem hilir dimana RB mempercepat pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional.

RB General Kemenpora menerapkan seluruh kegiatan utama secara *mandatory*. Namun demikian, terdapat prioritas kegiatan utama RB General yang dijabarkan dalam bentuk rencana aksi tahunan dari indikator kegiatan utama. Tim RB General Kemenpora dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.29 Tim RB General Kemenpora

Indikator RB General yang diampu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain:

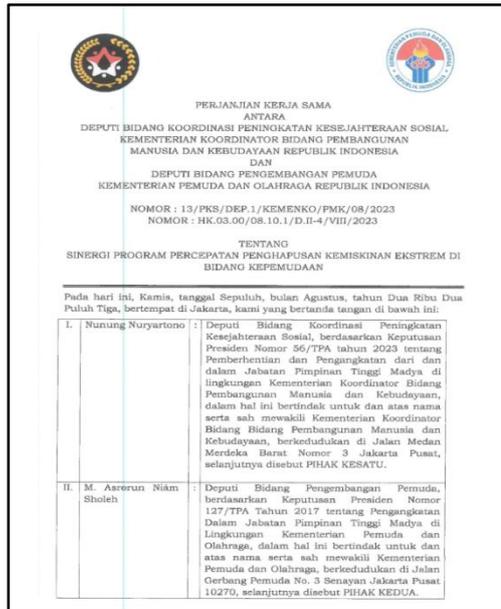


Gambar 3.30 Indikator RB General Kemenpora

Selanjutnya, Kemenpora menetapkan 2 (dua) tema dalam penerapan RB Tematik yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat yang meliputi:

### 1) Penurunan Angka Kemiskinan

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan mengidentifikasi data pemuda yang tergolong miskin ekstrem untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan kepemudaan sesuai dengan program prioritas Presiden. Terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kemenpora dan Kemenko-PMK tentang Sinergi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Bidang Kepemudaan.



Gambar 3.31 PKS bersama Kemenko-PMK

Gambar 3.32 Data Sebaran Daerah P3KE

Berdasarkan data P3KE, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda dan Kewirausahaan Pemuda melakukan seleksi, selanjutnya memfasilitasi pemuda miskin ekstrem dengan beberapa program, antara lain:

a. Youth Edulife Skill (YES)

Youth Edulife Skill (YES) merupakan program yang dirancang untuk membantu pemuda mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan dalam dunia kerja maupun keseharian. Program ini berpartisipasi dalam penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Manfaat program YES antara lain: 1) Meningkatkan keterampilan hidup, baik dari segi sosial maupun akademik Pemuda 2) Meningkatkan kemandirian serta peluang karir pemuda; 3) Mengembangkan kepercayaan diri dan emosional (psikologis) pemuda; 4) Memperluas jaringan sosial pemuda.

Pendidikan dan Pelatihan Program YES Tahun 2023 antara lain Manajemen *Event*, *Digital Marketing*, Literasi Keuangan, Teknologi Informasi, Desain Grafis, Visualisasi Multimedia Budaya, dan Industri Manufaktur yang berkolaborasi dengan banyak stakeholder, beberapa diantaranya Kemnaker, Kemenparekraf, Kemenko-PUKM, Kementan, BUMN, Bank Universitas, Pelaku Usaha, dan sebagainya.



Gambar 3.33 Dokumentasi Pelatihan Program YES

#### b. Penumbuhan Minat Berwirausaha

Penumbuhan kewirausahaan pemuda adalah salah satu strategi dalam mendorong pertumbuhan transaksi ekonomi karena saat ini jumlah wirausahawan Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain, maka perlu program yang berkelanjutan dalam penciptaan lapangan dan kesempatan kerja melalui berbagai cara salah satunya adalah kewirausahaan pemuda. Tujuan Program Kewirausahaan Pemuda antara lain: (1) Turut mendukung peningkatan kesejahteraan pemuda miskin ekstrem; (2) Meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi Tematik dalam mendukung kebijakan P3KE yang dikoordinasikan oleh Kemenko-PMK

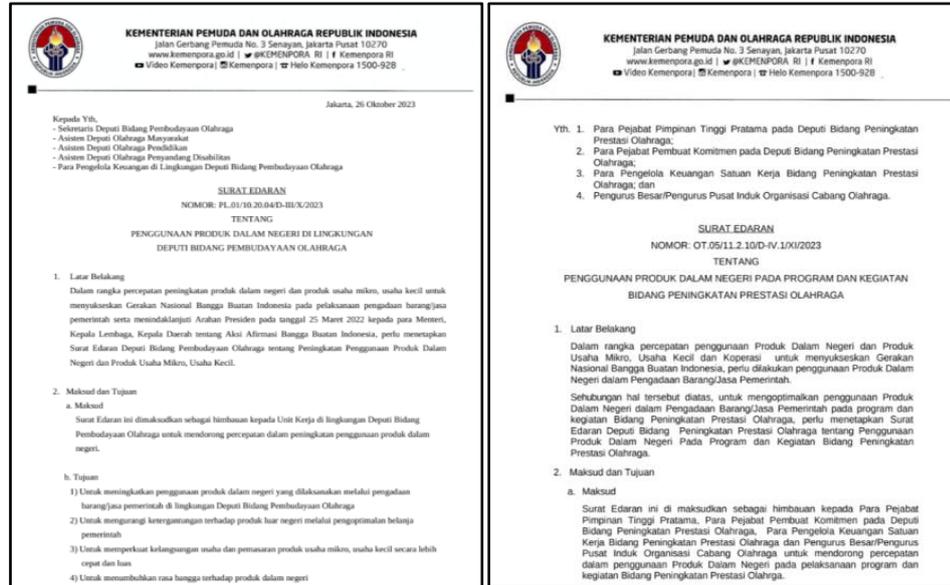


Gambar 3.34 Dokumentasi Pelatihan Penumbuhan Minat Kewirausahaan

## 2) Penggunaan Produk Dalam Negeri

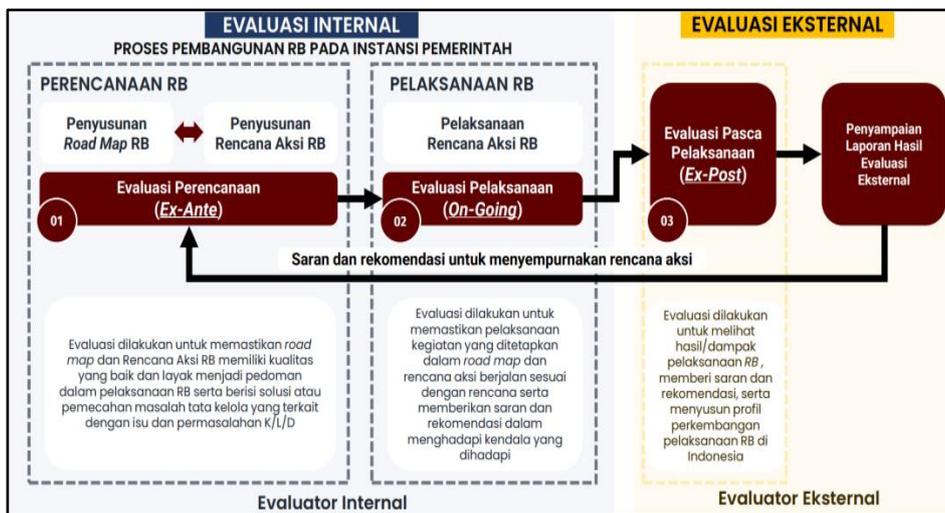
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kemenpora mendukung penggunaan produk dalam negeri melalui event Keolahragaan Nasional maupun Internasional.

Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan apparel pada berbagai event Keolahragaan, Rencana Umum Pengadaan dengan pengalokasian produk dalam negeri, serta kebijakan dalam pengadaan sarana prasarana untuk fasilitasi event Keolahragaan dalam Surat Edaran terkait Penggunaan Produk dalam Negeri pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.



Gambar 3.35 Surat Edaran Himbuan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sebagaimana diterbitkannya PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan berdasarkan Road Map RB Nasional, perubahan pada tahun ini tidak hanya arah kebijakan saja, namun juga pada evaluasi reformasi birokrasi, sehingga proses evaluasi maupun pembobotan menjadi sangat berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berpengaruh besar terhadap penilaian reformasi birokrasi Kemenpora.



Gambar 3.36 Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal dan Internal

Evaluasi Reformasi Birokrasi terbagi menjadi 2 (dua), antara lain:

### 1. Evaluasi Internal

Tahapan ini merupakan proses pembangunan RB instansi pemerintah yang terdiri atas **Evaluasi Perencanaan RB (*Ex-Ante*)** dan **Evaluasi Pelaksanaan RB (*On-Going*)**. Evaluasi dilakukan untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan organisasi. Dalam hal ini, dilakukan oleh Tim Evaluator Internal instansi.

### 2. Evaluasi Eksternal

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat hasil/dampak pelaksanaan RB, memberi saran dan rekomendasi, serta menyusun profil perkembangan pelaksanaan RB di Indonesia. Evaluasi Eksternal berupa Evaluasi Pasca Pelaksanaan RB (*Ex-Post*) oleh Tim Evaluator Eksternal dalam hal ini *stakeholders* terkait, antara lain: BPS, Kemenkumham, LAN, Kemenko-PMK, BKN, Kemenpan, dan sebagainya, dengan output Laporan Hasil Evaluasi Eksternal.



Gambar 3.37 Instansi Meso selaku Tim Evaluator RB Eksternal

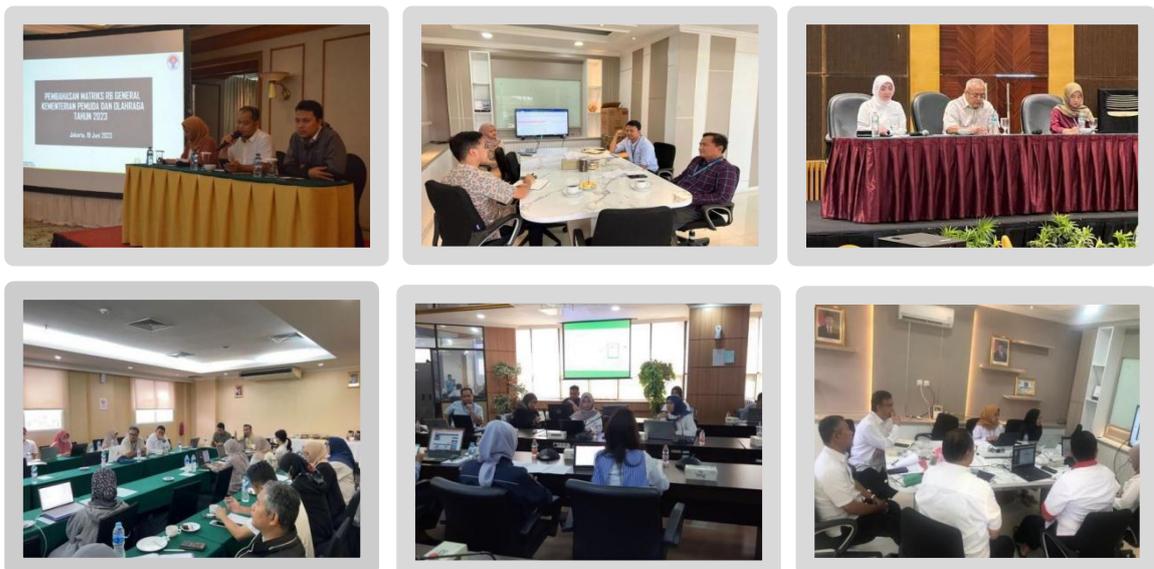
Berdasarkan hasil evaluasi internal, Kemenpora telah melakukan penajaman Road Map RB 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024. Kemenpora telah menetapkan target baik sampai dengan tahun 2024. Terdapat beberapa catatan evaluasi capaian yang perlu dipertahankan dan capaian yang masih perlu adanya peningkatan (*area of improvement*). Dalam upaya penyesuaian kebijakan tersebut melalui komitmen pimpinan yang tinggi, tim RB yang solid, serta rekomendasi perbaikan tim evaluator yang ditindaklanjuti dengan baik, Kemenpora optimis dapat meningkatkan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 mengalami kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan arah kebijakan pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi menyebabkan adanya penyesuaian lebih lanjut terhadap kebijakan Kemenpora, sehingga

- pelaksanaan RB di Kemenpora tidak sesuai timeline yang telah ditetapkan. Kemenpora membutuhkan proses transisi yang cukup lama terhadap penyesuaian tersebut, baik dari sisi Tim RB maupun dokumen RB Kemenpora;
2. Penetapan indikator pada RB General maupun Tematik membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan perlu berkoordinasi intens dengan Kemenpan RB, Tim RB dan unit terkait;
  3. Adanya rolling pegawai di Kemenpora sehingga individu pada Tim RB pindah dari unit kerja semula. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan RB karna konsep kerja RB saat ini adalah sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
  4. Pemahaman atas perubahan arah kebijakan belum optimal, sehingga Tim RB perlu memperdalam materi pada Permenpan-RB Nomor 3 dan 9 Tahun 2023.

Selanjutnya, sebagai bentuk upaya peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan berbagai kegiatan pendukung, antara lain: (1) Bedah Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; (2) Penetapan Indikator dan Target RB General dan Tematik Kemenpora; (3) Pembentukan Tim RB General dan Tematik Kemenpora 2023; (4) Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik Kemenpora; (5) Koordinasi bersama Kemenpan RB dan instansi Pembina indikator terkait; (6) Koordinasi Pelaksanaan rencana aksi Tim RB secara rutin; (7) Pemantauan dan Evaluasi RB secara berkala; (8) Evaluasi Internal RB General dan Tematik Kemenpora; (9) Penginputan data pada Portal RB; (10) Telaah dan evaluasi Tim RB 2023; (11) Pembentukan Tim RB General dan Tematik Kemenpora 2024; (12) Drafting Rencana Aksi RB General dan Tematik Kemenpora 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi Internal Kemenpora.



Gambar 3.38 Dokumentasi Pelaksanaan RB General dan Tematik Kemenpora

Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mencapai target Reformasi Birokrasi Tahun 2024, antara lain:

1. Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi berdasarkan Hasil Evaluasi RB Kemenpora Tahun 2023;
2. Menyusun Rencana Aksi RB Kemenpora Tahun 2024 berdasarkan catatan dan rekomendasi berdasarkan Hasil Evaluasi RB Kemenpora Tahun 2023;
3. Memperhatikan komponen indikator dengan capaian rendah, sehingga dapat ditingkatkan pada tahun selanjutnya;
4. Koordinasi intens antara tim RB dan instansi meso sehingga hal-hal yang belum ditindaklanjuti dapat disegerakan dan dapat terpantau dengan baik.

### 3.2 OPINI BPK

SASARAN STRATEGIS : TERWUJUDNYA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG BERKINERJA, BERSIH, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN MELAYANI						
INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100

Tabel 3.42 Capaian Indikator Opini BPK Kemenpora Tahun 2023

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Terdapat 4 (empat) Jenis Opini BPK, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  
Menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasi arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  
Menyatakan bahwa laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasi arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah setelah pemeriksa mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup memadai, dan pemeriksa menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasive.

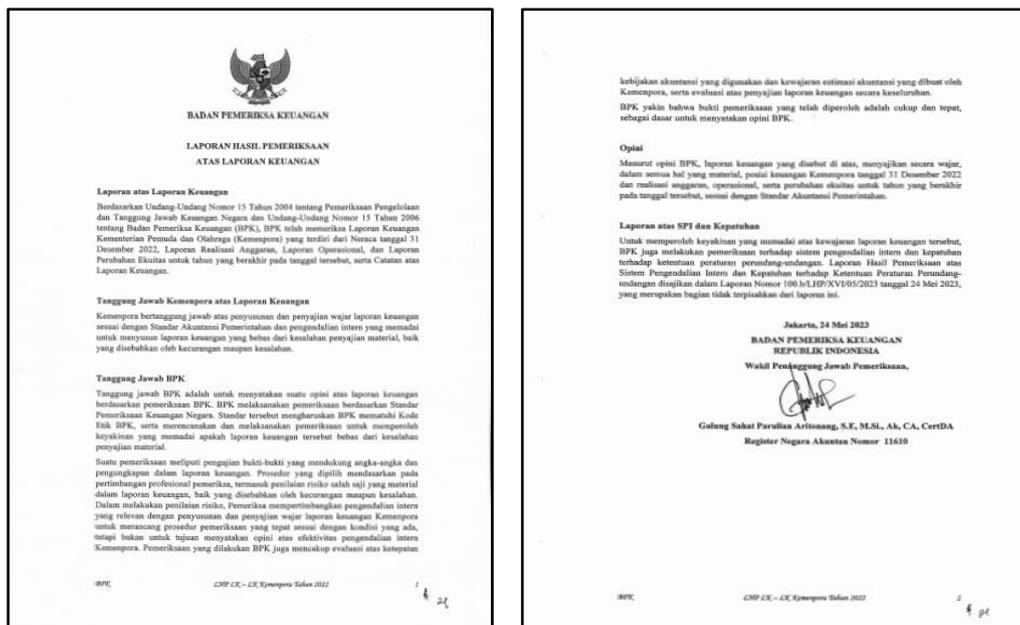
#### 4. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Disclaimer

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).

Opini BPK didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Kementerian Pemuda dan Olahraga pada bulan Januari 2024 sedang menyusun Laporan Keuangan TA 2023 yang selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Keuangan. Laporan tersebut bersifat *Unaudited*. Sedangkan BPK RI untuk tahun anggaran 2023 melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2022 Kemenpora yang selanjutnya menjadi laporan dengan status *audited*. Kemudian BPK RI akan memberikan Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga.



Gambar 3.39 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenpora

Hasil penilaian atau pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 adalah opini WTP merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 100.a/LHP/XVI/05/2023. Saat ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga belum menerima hasil atas opini Laporan Keuangan Tahun 2023 dari BPK RI. Hal ini terjadi karena proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenpora masih berlangsung. Estimasi atas hasil Pemeriksaan BPK RI akan diperoleh pada bulan Juni 2024.

Perolehan predikat WTP ini merupakan perolehan 4 (empat) kali berturut-turut yang diperoleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Perbandingan capaian Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenpora selama 5 (lima) Tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun Anggaran	Hasil Opini BPK RI	Keterangan
LK 2018	WDP	Laporan Kemenpora TA 2018 Nomor 119 C/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 Opini atas LK Kemenpora TA 2018 <b>Wajar Dalam Pengecualian</b>
LK 2019	WTP DPP	Laporan Kemenpora TA 2019 Nomor 65A/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 Opini atas LK Kemenpora TA 2019 <b>Wajar, dalam semua hal yang material dengan penekanan satu hal.</b>
LK 2020	WTP	Laporan Kemenpora TA 2020 Nomor 85A/HP/XVI/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 Opini atas LK Kemenpora TA 2020 <b>Wajar, dalam semua hal yang material.</b>
LK 2021	WTP	Laporan Kemenpora TA 2021 Nomor 58A/LHP/XVI/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 Opini atas LK Kemenpora TA 2021 <b>Wajar, dalam semua hal yang material.</b>
LK 2022	WTP	Laporan Kemenpora TA 2022 Nomor 100.a/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 Opini atas LK Kemenpora TA 2022 <b>Wajar, dalam semua hal yang material.</b>

Tabel 3.43 Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenpora dalam 5 tahun terakhir

Dalam rangka mempertahankan opini BPK RI, terdapat 2 indikator penting yaitu:

### 1. Peningkatan Pengawasan Internal yang akuntabel dan transparan

Dalam rangka meningkatkan mutu atas pengawasan program dan kegiatan pada tahun 2023 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan pengawasan atas program dan kegiatan melalui pengawasan yang bersifat rutin yaitu:

1. Reviu Laporan Keuangan Kemenpora;
2. Reviu Laporan Kinerja Kemenpora;
3. Reviu RKA-KL;
4. Reviu PNBK;
5. Evaluasi Lakip Eselon I dan II;
6. Reviu Buka Blokir atas DIPA Kemenpora TA 2023;
7. Reviu Perencanaan Program dan Kegiatan TA 2023;
8. Reviu atas Revisi Anggaran Satuan Kerja yang memerlukan telaah Inspektorat.

Disamping melakukan pengawasan yang bersifat rutin, Kemenpora juga melakukan pengawasan atas program dan kegiatan yang menjadi prioritas pimpinan melalui pendampingan, reviu, dan monitoring kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Hari Olahraga Nasional dan Hari Sumpah Pemuda TA 2023;
2. Pengawasan pelaksanaan kegiatan *Sea Games 2023* Kamboja;
3. Pengawasan penyelenggaraan *FIBA World Cup 2023*;
4. Pengawasan penyelenggaraan *FIFA U-17 World Cup 2023*;
5. Pengawasan pelaksanaan kegiatan *Asian Games 2022* Hangzhou dan *Asian Para Games 2022* Hangzhou.

Selain pengawasan hal-hal di atas, Kemenpora telah melakukan upaya tindak lanjut atas temuan pengawasan oleh BPK RI khususnya temuan pada Laporan Keuangan Kemenpora TA 2022. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2023 Kemenpora telah melakukan perbaikan atas tata kelola khususnya pada hal-hal yang menjadi kewajiban Kemenpora atas ketaatan pelaporan dalam rangka dukungan transparansi publik dan peningkatan SPIP:

1. Kerjasama dengan Satgassus Pencegahan Korupsi Polri dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
2. Sosialisasi dan penilaian *baseline* atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi. Dari target Maturitas SPIP Terintegrasi



Kemenpora dengan target indeks level 3 TA 2023, Kemenpora memperoleh capaian penilaian SPIP Terintegrasi pada indeks 3,108 untuk TA 2023.

3. Sosialisasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Sosialisasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
5. Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

## **2. Peningkatan mutu laporan keuangan (peningkatan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran).**

- a. Peningkatan Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 222/PMK.05/15 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA, dan pada ayat (2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah seluruh Laporan Keuangan ditelaah secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Kementerian Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara berjenjang dan berkala yang dilaporkan/disampaikan ke Kementerian Keuangan. Berikut adalah laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di tahun 2023: 1) Laporan *Unaudited* (Tahun Anggaran 2022); 2) Laporan *Audited* (Tahun Anggaran 2022); 3) Laporan Semester I (tahun anggaran berjalan); 4) Laporan Triwulan III (tahun anggaran berjalan); dan 5) Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN

- b. Peningkatan Mutu Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara. Pada tahun anggaran 2023 IKPA

memiliki 8 indikator yang terfokus pada 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Capaian IKPA Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 adalah 88,03 dengan kategori Cukup. Meskipun masih dalam kategori Cukup namun secara nilai mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 87,62. Namun demikian, perlu terus dilakukan perbaikan dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan agar pada tahun berikutnya mendapatkan nilai yang lebih baik. Beberapa program/kegiatan yang mendukung peningkatan IKPA di Kemenpora antara lain: 1) Sosialisasi mekanisme pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; 2) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBN Satuan Kerja Kemenpora; dan 3) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran.

Dalam rangka meningkatkan mutu atas pengawasan dan pelaporan keuangan terdapat kendala/faktor penghambat dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut yaitu:

1. Penatausahaan aset dan persediaan yang belum optimal
2. Pengelolaan Bantuan Pemerintah yang belum optimal
3. Masih terdapat pengungkapan yang belum memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
4. Indikator penyerapan anggaran masih menjadi fokus utama bagi Satker dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran sehingga implementasi nilai indikator lainnya kurang menjadi perhatian yang menyebabkan nilai masing-masing indikator tidak maksimal.
5. Dokumen hasil tindak lanjut yang disampaikan oleh satuan kerja, belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.

Berdasarkan uraian atas, upaya Kemenpora dalam peningkatan mutu atas pengawasan dan pelaporan keuangan tahun 2023 serta upaya perbaikan atas tata kelola dan aturan yang telah dilakukan oleh Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga menargetkan bahwa **estimasi atas Opini Laporan Keuangan Kemenpora Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian**. Adapun Strategi perbaikan yang akan dilakukan untuk mempertahankan Opini BPK, diantaranya:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran di Kemenpora secara berkala, dan berkelanjutan dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan

anggaran dilaksanakan secara akuntabel sesuai dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku.

2. Meningkatkan kualitas pengendalian intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan pendampingan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di Kemenpora.
4. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA.
5. Menindaklanjuti rekomendasi yang belum sesuai dan yang belum ditindaklanjuti atas temuan BPK RI dan melakukan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

### 3.3 INDEKS PELAYANAN PUBLIK

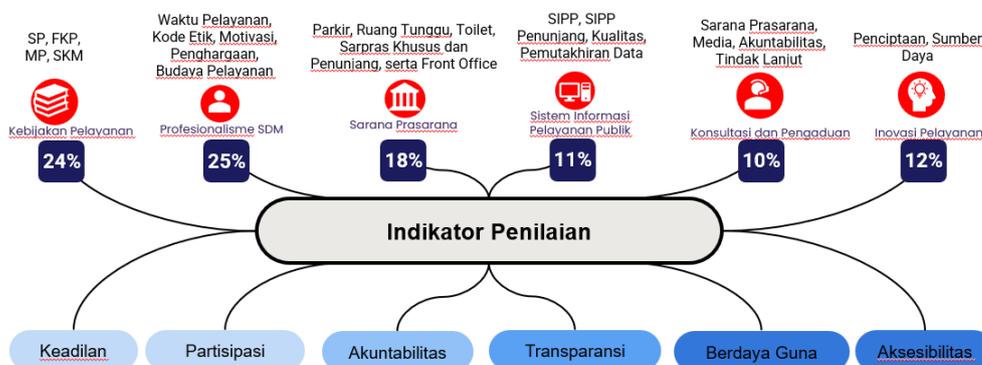
SASARAN STRATEGIS : TERWUJUDNYA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG BERKINERJA, BERSIH, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN MELAYANI

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
INDEKS PELAYANAN PUBLIK	3,83	3,76	3,85	4,26	3,77	88,49

Tabel 3.44 Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Kemenpora

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek Kebijakan Pelayanan, aspek Profesionalisme SDM, aspek Sarana Prasarana, aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, aspek Konsultasi dan Pengaduan, dan aspek Inovasi.

#### Aspek dan Prinsip Instrumen IPP



Gambar 3.40 Instrumen dan Komponen Indikator Penilaian Indeks Pelayanan Publik

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik bentuk pelayanan publik menjadi 3 kategori yakni dalam penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif.

Untuk penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan penilaian melalui *desk evaluation*, pengisian kuesioner atau formulir, serta observasi dan pembuatan berita acara oleh tim evaluator internal yang terinput di <https://evaluasi.menpan.go.id>. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara, diantaranya:

1. Formulir F-01 diisi oleh unit pelayanan publik,
2. Formulir F-02 diisi oleh evaluator,
3. Formulir F-03 diisi oleh pengguna layanan.

Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir F01 (terdiri dari 6 aspek dan 37 indikator; formulir F02 terdiri dari 6 Aspek dan 37 indikator; dan formulir F03 terdiri dari 5 aspek dan 22 indikator dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan pengumpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori sebagai berikut:

RENTANG NILAI	KATEGORI	MAKNA
0 - 1,00	F	Prioritas Pembinaan
1,01 - 1,50	E	
1,51 - 2,00	D	
2,01 - 2,50	C-	Cukup (DC)
2,51 - 3,00	C	Cukup
3,01 - 3,50	B-	Baik (DC)
3,51 - 4,00	B	Baik
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 3.45 Nilai dan Kategori Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data capaian (*baseline*) Indeks Pelayanan Publik Kemenpora selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dianalisis bahwa terdapat interval perubahan nilai Indeks Pelayanan Publik yang disebabkan adanya perubahan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 membagi bentuk pelayanan publik menjadi 3 (tiga) kategori yakni dalam penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan perolehan Indeks Pelayanan Publik pada tahun ini.

Unit pelayanan publik yang diusulkan dan dievaluasi Tahun 2022 hanya satu unit saja yakni Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON) yang merupakan unit pelayanan teknis pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda. Sedangkan Tahun 2023, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tersebut, unit pelayanan publik yang diusulkan dan dievaluasi menjadi 3 (tiga) unit yakni Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang mewakili unsur pelayanan bentuk administratif, Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda (Asdep PKP) yang mewakili unsur pelayanan bentuk jasa dan Asisten Deputy Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga yang mewakili unsur pelayanan dalam bentuk barang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
51	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	3,66	B	Asisten Deputy Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga	3,82	B	Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda	3,84	B	3,77	B

Tabel 3.46 Hasil capaian PEKPPP Kemenpora sesuai Kepmenpan-RB Nomor 795 Tahun 2023

Pergantian unit pelayanan publik yang diusulkan bertujuan untuk mendorong setiap unit pelayanan publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kualitas pelayanan publik yang setara dan prima. Namun, dikarenakan banyaknya komponen indikator penilaian membuat unit lokus yang diusulkan perdana pada tahun 2023 mengalami kesulitan dalam mempersiapkan bukti dukung untuk proses penilaian, sehingga belum mampu mencapai target yang diharapkan.

Untuk mengoptimalkan kinerja Pelayanan Publik dan target capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023, maka dibentuk Tim Fasilitator yang ditetapkan

dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 6.22.1 Tahun 2023. Tim Fasilitator bertugas untuk memberikan dukungan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya Unit Lokus Evaluasi (ULE). Beberapa upaya yang telah dilakukan Tim Fasilitator dalam mengakselerasi Pelayanan Publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain:

1. Telah dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan Standar Pelayanan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Telah disediakan sarana disabilitas seperti lahan parkir dan alat bantu disabilitas;
3. Telah disediakan sarana bagi pengguna layanan seperti revitalisasi perpustakaan dan revitalisasi sarana bermain anak.

Dalam berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Pelayanan Publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat pula beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Pergantian unit pelayanan publik yang diusulkan sehingga beberapa unit lokus mengalami kesulitan dalam mempersiapkan bukti dukung untuk proses penilaian, sehingga belum mampu mencapai nilai indeks yang diharapkan;
2. Kurang aktif dan cepatnya personil unit lokus dalam memenuhi eviden yang dibutuhkan karena bersamaan dengan kesibukan tugas harian.



Gambar 3.41 Rapat Evaluasi Pelaksanaan PEKPPP Indeks Pelayanan Publik Kemenpora Tahun 2023

Analisis dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga di tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perlu disusun dan ditetapkan kebijakan Pelayanan Publik melalui penetapan dan penerapan dokumen Standar Pelayanan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan dalam Standar Pelayanan yang disusun serta meningkatkan publikasi hasil Survei

- Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui sosial media dalam bentuk yang menarik;
2. Perlu dilakukan kegiatan pemberian motivasi kerja pegawai melalui: kesempatan mengikuti program beasiswa, program konseling, dan mekanisme lainnya, serta pembudayaan pelayanan (5S) agar dapat diterapkan oleh seluruh pegawai di unit lokus evaluasi secara konsisten;
  3. Perlu penambahan sarana pendukung *front office* berupa register tamu dan *display* informasi tentang layanan serta menambahkan sarana prasarana bagi kelompok rentan berupa toilet khusus, loket khusus, *guiding block*, alat bantu tuna netra/tuna rungu, dan fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).
  4. Inovasi yang telah ada perlu dilakukan evaluasi kebermanfaatannya dan rencana pengembangan kedepannya sehingga dapat diikutsertakan dalam kompetisi.

Tindak lanjut tersebut merupakan kesimpulan dari 3 (tiga) berita acara yang disusun evaluator internal PEKPPP untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi unit lokus evaluasi yang akan diusulkan pada periode berikutnya. Harapan kedepannya, semakin tinggi nilai indeks pelayanan publik yang tercapai maka semakin tinggi pula kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat selaku pengguna layanan di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### 4. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA LAINNYA

**Penghargaan Nilai Keterbukaan Informasi Publik  
oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)**

**Nilai 95,80 (INFORMATIF)**

Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat sebagai badan publik dengan kualifikasi “informatif” dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 kategori Kementerian dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada kategori Kementerian, Kemenpora mendapatkan peringkat kelima dengan perolehan nilai 95,80. Kementerian Pemuda dan Olahraga berhasil mendapatkan peringkat ke-5 dengan nilai 95,80 (informatif) yang artinya Kemenpora mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif peringkat ke-5 dari seluruh Kementerian/lembaga yang dinilai.



Gambar 3.42. Sesmenpora menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dari Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia

Hasil penilaian yang didapatkan Kemenpora mengungguli beberapa Kementerian kategori kelompok ketiga diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (peringkat 7), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (peringkat 9), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (peringkat 20). Nilai tersebut sekaligus melebihi target yang telah ditetapkan pada PK tahun 2023 sebesar 90. Adapun capaian penilaian keterbukaan informasi publik Kemenpora mulai dari tahun 2020 tertuang pada tabel berikut:

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2020	54.23	Kurang Informatif
2	2021	75.94	Cukup Informatif
3	2022	80.76	Menuju Informatif
4	2023	95.80	Informatif

Tabel 3.47. Capaian KIP Kemenpora

Sebagai badan publik, Kemenpora telah mengikuti monitoring dan evaluasi tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Pelaksanaan penilaian untuk Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat dengan berbagai aspek penilaian sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Parameter	Nilai	Bobot
1	Kualitas Informasi	Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala	20	60
		Informasi dikecualikan		
		Daftar Informasi Publik		
2	Pelayanan Informasi	Prosedur	20	
		Substansi		
		Pelaporan/ <i>Complain handle</i>		
3	Jenis Informasi	Tersedia Setiap Saat	20	
		Informasi Terbuka Lainnya		
4	Sarana dan Prasarana	Elektronik	10	40
		Non Elektronik		
5	Komitmen Organisasi	Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur	15	
		Pelaksanaan tugas Atasan PPID		
		Pelaksanaan tugas PPID Utama		
		Anggaran PPID / Keterbukaan Informasi		
		Kepatuhan menjalankan keputusan KIP		
6	Digitalisasi	Aplikasi-aplikasi teknologi informasi berkaitan keterbukaan informasi	15	
		Penyediaan <i>platform</i> dalam <i>Play Store</i>		
		Aktivitas media social		

Tabel 3.48. Aspek Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

### **Kegiatan Pendukung Nilai Keterbukaan Informasi Publik**

- a. Pengembangan sarana dan prasarana layanan informasi  
Kementerian Pemuda dan Olahraga membenahi sarana prasarana pendukung layanan informasi publik diantaranya adalah ruang khusus PPID untuk menerima masyarakat yang melakukan permohonan informasi secara langsung.



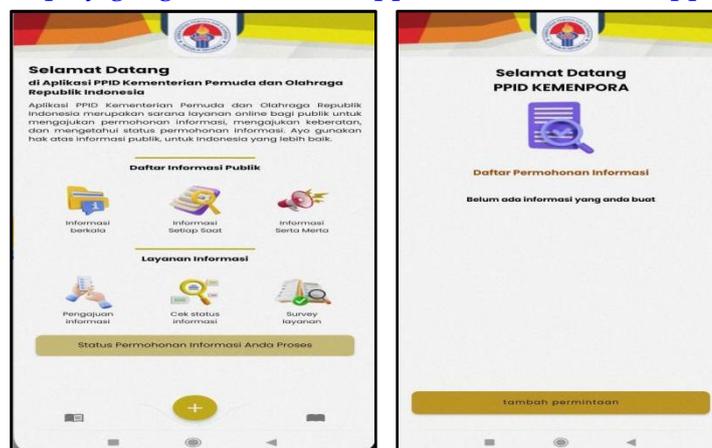
Gambar 3.43. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

- b. Pengembangan *website* atau laman khusus PPID  
Pengembangan laman khusus layanan informasi ([www.ppid.kemempora.go.id](http://www.ppid.kemempora.go.id)) yang berfungsi sebagai media desiminasi informasi sekaligus sebagai layanan permohonan informasi secara daring.



Gambar 3.44. Website PPID Kemenpora

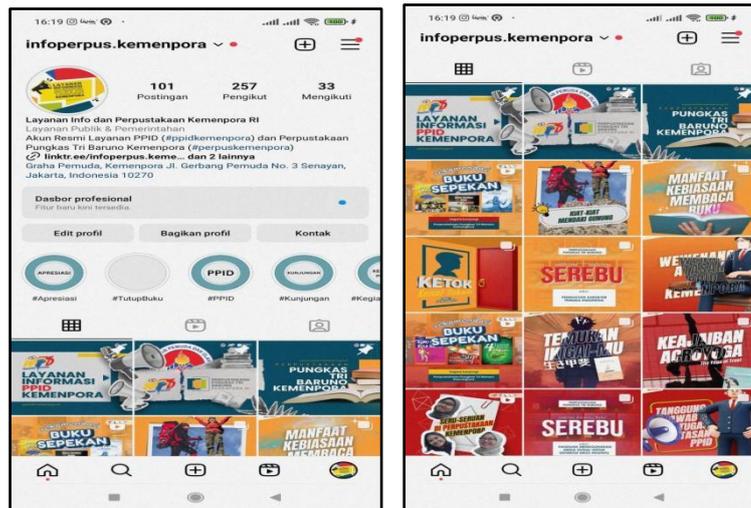
- c. Pembangunan Aplikasi PPID Kemenpora berbasis Android  
Pembangunan aplikasi PPID Kemenpora berbasis Android ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendapatkan layanan informasi yang mudah dan cepat. Aplikasi dapat diunduh melalui google playstore Android Pada tautan <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.k.ppidkemenpora>.



Gambar 3.45. Aplikasi PPID Kemenpora berbasis Android

d. Pengembangan *media social* instagram khusus Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan.

Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan Bidang Kehumasan Biro Humas dan Umum selaku unit pelaksana bidang layanan informasi publik (PPID) Kemenpora memiliki Media sosial Instagram khusus layanan informasi dengan *username* @infoperpus.kemenpora atau dengan laman [www.instagram.com/infoperpus.kemenpora](http://www.instagram.com/infoperpus.kemenpora). Berikut adalah tangkapan layar instagram PPID Kemenpora yang dikelola oleh Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan.



Gambar 3.46. Aplikasi PPID Kemenpora berbasis Android

e. Menyelenggarakan Forum Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu kegiatan pendukung dalam mewujudkan Kemenpora sebagai lembaga yang terbuka adalah dengan mengundang Komisi Informasi Pusat dan *stakeholders* yang terlibat dalam forum keterbukaan informasi publik di Kemenpora.



Gambar 3.47. Dokumentasi Forum Keterbukaan Informasi Publik

### **Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik**

- a. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) di Kemenpora masih manual.  
Ketersediaan DIP menjadi syarat wajib dalam penilaian keterbukaan informasi publik, sepanjang tahun 2023 hambatan terkait penyediaan DIP dari berbagai unit kerja yang ada di Kemenpora masih dilakukan secara manual. Hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam ketersediaan informasi.
- b. Pemahaman Internal terkait Keterbukaan Informasi Publik  
Kurangnya pemahaman keterbukaan informasi publik bagi seluruh pegawai Kemenpora. Sehingga butuh upaya lanjut untuk mendapatkan dokumen maupun informasi yang dibutuhkan.

**Penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2023  
oleh Kementerian Keuangan**

**Peringkat II Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN)**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia meraih penghargaan Peringkat II Kelompok 2 Kategori Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Surat Undangan Kementerian Keuangan Nomor UND-5/MK.6/2023 hal undangan Acara Anugerah Reksa Bandha tahun 2023 tanggal 21 November 2023. Anugerah Reksa Bandha merupakan penghargaan yang diberikan kepada stakeholder Kementerian Keuangan yang berprestasi di bidang pengelolaan aset dan lelang. Kementerian Keuangan selaku pengelola Barang Milik Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan negara dan mendokumentasikan asset negara secara baik dan benar dalam rangka akuntabilitas kepada rakyat, dalam proses pengelolaannya dibantu oleh Kementerian/Lembaga dan *stakeholders* di Bidang pengelolaan Barang Milik Negara.



Gambar 3.48 Sesmenpora bersama Kepala Biro Humas dan Umum serta Tim BMN menerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2023

Pada tahun 2023 Penghargaan Anugerah Reksa Bandha terdiri dari 5 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BMN dan 4 kategori di bidang lelang, antara lain:

- a. Penghargaan di Bidang Pengelolaan Aset
  1. Kategori Utilisasi BMN
  2. Kategori Kualitas Pelaporan BMN
  3. Kategori Sertifikasi BMN
  4. Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)
  5. Penghargaan khusus terkait kontribusi dalam pengamanan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan juga peran aktif dalam membantu penyelesaian perkara terkait BMN
- b. Penghargaan di Bidang Lelang
  1. Kategori Pemohon Lelang Eksekusi
  2. Kategori Pemohon Lelang Lelang Noneksekusi Wajib
  3. Kategori Balai Lelang dengan Capaian Terbaik
  4. Kategori Lelang Balai dengan Kinerja Terbaik

Kegiatan Pendukung Sertifikasi BMN Kemenpora salah satunya dengan melaksanakan koordinasi dengan pengelola barang (DJKN) dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam hal ini kantor pertanahan Kabupaten Bogor dan kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, serta melakukan proses penggantian nama yang tercantum dalam sertifikat tanah dari semula atas nama Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga.

Dalam melaksanakan program tersebut dilapangan terdapat kendala-kendala yang dihadapi antara lain proses pengurusan sertifikasi memerlukan waktu yang relatif panjang sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak dan juga selain itu terbatasnya dukungan anggaran yang diberikan untuk menindaklanjuti proses demi prosesnya. Rekomendasi kedepan agar aturan dalam memproses dokumen seperti hal tersebut agar dibuat seringkak mungkin sehingga kegiatan seperti hal tersebut dapat selesai dengan waktu singkat, selain itu juga komitmen dan dukungan pimpinan baik moril maupun materil sangat dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi dan percepatan penyelesaian kegiatan.

### Akreditasi Perpustakaan Pungkas Tri Baruno Kemenpora oleh Perpustakaan Nasional

#### Akreditasi B



Gambar 3.49. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan Pungkas Tri Baruno Kemenpora

Akreditasi Perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh Lembaga yang menyatakan bahwa suatu lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 18 November 2022, Perpustakaan Pungkas Tri Baruno telah mengajukan surat permohonan akreditasi kepada Perpustakaan Nasional RI. Sebagai tindak lanjut atas permohonan akreditasi, Perpustakaan Nasional melakukan visitasi pada Perpustakaan Pungkas Tri Baruno dengan menggunakan metode penilaian 6 komponen. Adapun komponen yang menjadi objek penilaian yaitu:

1. Komponen koleksi perpustakaan
2. Sarana dan prasarana perpustakaan
3. Pelayanan perpustakaan
4. Tenaga perpustakaan
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, dan
6. Komponen penguat lainnya

Dari hasil penilaian tim akreditasi, menetapkan Perpustakaan Pungkas Tri Baruno memenuhi kesesuaian terhadap standar nasional perpustakaan dengan predikat **akreditasi "B"**.



Gambar 3.50. Penandatanganan BAST Penyerahan Sertifikat Akreditasi Perpustakaan Pungkas Tri Baruno oleh Perpustakaan Nasional

### **Kegiatan Pendukung Akreditasi Perpustakaan**

#### a. Layanan Sirkulasi

Layanan Sirkulasi adalah layanan yang khusus disediakan untuk melayani pemustaka dalam pemesanan, peminjaman, dan pengembalian buku perpustakaan. Perpustakaan Pungkas Tri Baruno memiliki layanan sirkulasi sistem terbuka, dimana layanan ini memberi kebebasan sepenuhnya kepada pemustaka untuk dapat masuk dan memilih sendiri bahan pustaka yang diinginkan dari rak. Namun yang dapat melakukan transaksi layanan sirkulasi hanya karyawan Kementerian Pemuda dan Olahraga sedangkan untuk pemustaka umum hanya dapat membaca buku di tempat.

#### b. Revitalisasi Perpustakaan Pungkas Tri Baruno

Revitalisasi ruang perpustakaan merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar menciptakan ruang perpustakaan yang lebih nyaman. Sebelumnya, ruang perpustakaan Pungkas Tri Baruno hanya seluas 50 m<sup>2</sup> dengan interior yang terkesan kuno dan tidak menarik bagi

pemustaka. Pasca dilakukan revitalisasi ruang perpustakaan yang dimulai pada bulan Maret sampai April, luas ruang Perpustakaan Pungkas Tri Baruno menjadi 150,2 m<sup>2</sup> dengan interior yang lebih menarik, penataan ruang yang lebih optimal sehingga menjadi ruang yang multifungsi bagi pemustaka. Kini Perpustakaan Pungkas Tri Baruno memiliki tampilan ruang yang kreatif. Hal ini bertujuan agar menambah daya tarik bagi para pemustaka.



Gambar 3.51. Dokumentasi Perpustakaan Pungkas Tri Baruno Kemenpora setelah dilakukan revitalisasi.

c. Media Sosial Perpustakaan Pungkas Tri Baruno

Sebagai sarana komunikasi dan promosi, Perpustakaan Pungkas Tri Baruno menyediakan media sosial berupa instagram. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk mempromosikan sekaligus menyebarkan informasi berkaitan dengan Perpustakaan Pungkas Tri Baruno. Sosial media Perpustakaan Pungkas Tri Baruno memberikan informasi berupa video grafis dan infografis yang berisi mengenai resensi koleksi buku, biografi tokoh, konten kreatif yang berkaitan dengan dunia literasi. Berikut adalah contoh tampilan konten publikasi di media sosial instagram Perpustakaan Pungkas Tri Baruno.



Gambar 3.52. Sosial Media Perpustakaan Kemenpora

#### d. Bedah Buku

Pada tanggal 7 November 2023, Perpustakaan Pungkas Tri Baruno melaksanakan kegiatan bedah buku “Mengetahui Demokrasi dan Politik untuk Pemula”. Kegiatan tersebut langsung diisi oleh penulis buku tersebut yaitu Mauliza Donna. Beliau adalah penulis sekaligus peneliti dari BRIN. Kegiatan bedah buku tersebut mendapatkan antusias dari para peserta dan juga mendapat respon yang baik, bukan hanya bagi peserta yang hadir secara luring tetapi juga dari peserta daring.



Gambar 3.53. Dokumentasi Kegiatan Bedah Buku 1

#### e. Bincang Literasi

Perpustakaan Pungkas Tri Baruno menggelar kegiatan Bincang Literasi di ruang layanan sirkulasi. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 23 November 2023, dengan tema “Menulis Manusia”. Narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Yugha Erlangga, beliau merupakan seorang penulis. Kegiatan bincang literasi dihadiri oleh peserta baik secara daring maupun luring dan mendapatkan antusias serta respon positif dari peserta.



Gambar 3.54. Dokumentasi Kegiatan Bedah Buku 2

Hambatan-hambatan yang dihadapi:

- 1) Kesadaran internal

Perkembangan perpustakaan tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak termasuk internal Kemenpora. Misalnya dalam hal kunjungan pegawai, tingkat sirkulasi peminjaman buku, dan penyampaian bukti karya cetak dan karya rekam kelembagaan. Beberapa hal tersebut merupakan indikator yang dinilai dalam akreditasi perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional;

## 2) Koleksi Buku dan Bahan Literasi

Sebagai Perpustakaan khusus, Perpustakaan Pungkas Tri Bruno Kemenpora seharusnya memiliki kekhususan dalam hal koleksi buku dan bahaan bacaan yaitu khusus pada bidang olahraga dan kepemudaan. Artinya, koleksi buku terkait bidang tersebut harus lebih banyak dibandingkan buku kategori umum. Selain itu, keterbaruan koleksi buku juga menjadi hambatan dalam pengembangan perpustakaan.

## 3) Program Kegiatan Pendukung

Perpustakaan Pungkas Tri Baruno kurang memiliki program-program penunjang selain pelayanan baca dan pinjam buku.

### Catatan Rekomendasi:

- a. Perlu persamaan persepsi dari seluruh *stakeholder* untuk pengembangan dan peningkatan budaya literasi khususnya pemenuhan kebutuhan perpustakaan.
- b. Perlu adanya pengadaan koleksi buku baru secara konsisten terkhusus koleksi yang berkaitan dengan pemuda dan olahraga sesuai dengan fungsi dari Perpustakaan Pungkas Tri Baruno.
- c. Perlu adanya kegiatan literasi secara berkesinambungan sebagaimana fungsi dari Perpustakaan yaitu pusat pengembangan literasi khususnya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

### **Penghargaan Pelayanan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat**

### **Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas Kemenpora**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, menjadi salah satu dari 4 lembaga publik yang meraih penghargaan kategori Lembaga Publik yang Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut menjadi wujud komitmen Kemenpora dalam mewujudkan visi lembaga yang akuntabel dan terbuka untuk semua kalangan masyarakat.



Gambar 3.55. Sekretaris Kemenpora RI Gunawan Suswanto menerima penghargaan terkait Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas Komisi Informasi (KI) Pusat.

### **Kegiatan Pendukung Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas**

#### a. Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang layanan Disabilitas

Dalam rangka menjamin kesetaraan hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik, termasuk penyandang disabilitas, Kemenpora menyediakan sarana dan prasarana yang khusus yang ramah pada penyandang disabilitas. Adapun beberapa fasilitas yang disediakan oleh Kemenpora ialah sebagai berikut:

##### 1) Parkir dan Jalur Khusus Disabilitas



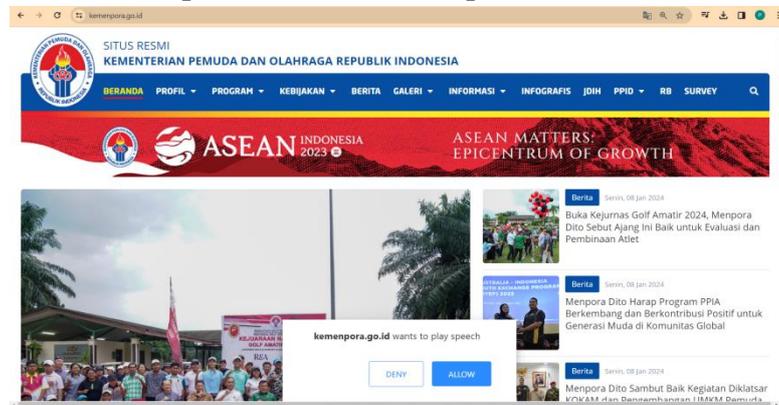
Gambar 3.56. Parkir khusus disabilitas di area parkir Kemenpora

##### 2) Kursi Roda



Gambar 3.57. Petugas informasi sedang melayani permohonan informasi dari masyarakat penyandang disabilitas

3) *Widget* ramah disabilitas pada *website* Kemenpora dan PPID Kemenpora



Gambar 3.58. *Responsive Voice* pada *website* kemenpora.go.id

4) *Widget Accessibility* pada *website* ppid.kemenpora.go.id



Gambar 3.59. *Widget Accessibility* pada *website* ppid.kemenpora.go.id

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi tahun 2023 khususnya pada layanan informasi publik ramah disabilitas, tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kemenpora. Berdasarkan pada hasil yang telah dilaksanakan

dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik maupun identifikasi evaluasi internal, kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya fasilitas penunjang sarana dan prasarana khusus yang ramah pada penyandang disabilitas, seperti:

1. Juru Bahasa Isyarat yang memiliki kemampuan menjurubahasakan bahasa isyarat secara langsung, tepat, dan akurat; dan
2. Formulir Permohonan Informasi belum berbasis *braille*.

Sebagai solusi dari hambatan diatas, berikut disampaikan beberapa rencana tindak lanjut Kemenpora, antara lain:

- (a) Penyediaan Juru Bahasa Isyarat yang telah mengenyam pendidikan juru bahasa Isyarat dari organisasi Tuli/tunarungu dan diakui oleh komunitas tuli/tunarungu setempat; dan
- (b) Penyediaan Formulir Permohonan Informasi berbasis *braille*.

#### D. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Hasil evaluasi Kementerian PAN RB terhadap implementasi AKIP Kementerian Pemuda tahun 2022, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

#### MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
1	Reviu terhadap keselarasan dokumen perencanaan, kemudian meningkatkan kualitas dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator kinerja yang digunakan lebih berorientasi hasil serta memenuhi kriteria SMART dan cukup baik level pusat maupun unit kerja	Telah dilakukan evaluasi bersama berdasarkan catatan rekomendasi dari BPKP dan KemenPAN RB, dan berupaya meningkatkan kualitas dokumen pada tahun ini
2	Mereview dan menyempurnakan proses penganggaran dan untuk memastikan anggaran hanya bisa disetujui dan dipergunakan jika perencanaan dan indikator kinerja sudah memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup	Telah dilakukan review terhadap penyusunan anggaran sesuai dengan perencanaan dan indikator kinerja
3	Mereview dan menyempurnakan pohon kinerja/ <i>logical framework</i> agar dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan mengacu pada Permenpan RB No 89 tentang Penjenjangan Kinerja, dan	Adanya pembaharuan pohon kinerja Kemenpora melalui Renstra

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
	memanfaatkannya sebagai dasar untuk mereview dan menyempurnakan organisasi serta PK dan SKP yang ada	
4	Menyempurnakan IKU pada unit kerja dengan menambahkan formulasi perhitungan dan sumber data yang akan digunakan dalam menghitung indikator kinerja serta penanggung jawab indicator tersebut	Adanya pembaharuan IKU, Manual IKU unit kerja Kemenpora dengan dokumen terlampir
5	Mereview dan menyempurnakan pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja berkala sebagai dasar perbaikan reward and punishment baik bagi individu maupun unit kerja	Melalui Pengisian Aplikasi E-Kinerja, Kemenpora dapat mengukur kinerja setiap unit kerja. Namun, untuk perbaikan reward and punishment bagi individu dapat dilihat pada aplikasi kepegawaian Kemenpora
6	Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai acuan untuk perbaikan perencanaan kinerja ke depan, terutama dalam penentuan target kinerja	Pada Laporan Kinerja Kemenpora maupun unit kerja telah mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya
7	Mereview dan menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendorong peningkatan kualitas evaluasi	Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal Kementerian masih dalam proses
8	Meningkatkan kualitas evaluasi internal AKIP dan evaluasi program dengan membuat rekomendasi yang cukup pada laporan hasil evaluasi internal untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP dan pengelolaan hasil program pada setiap unit kerja	Inspektorat Kemenpora telah melakukan evaluasi terhadap SAKIP pada setiap unit kerja serta memberikan rekomendasi perbaikan
9	Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam upaya penyempurnaan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan tidak terpisahkan sehingga nantinya akan berpengaruh pada penyempurnaan implementasi SAKIP di Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dalam hal ini, Kemenpora telah bersinergi dengan unit kerja terkait seperti Sisinfo, dan seluruh Sesdep di lingkungan Kemenpora. Kemenpora juga bersinergi dengan Bappenas dan DJA Kemenkeu agar terdapat keselarasan

Tabel 3.49 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Kemenpora



## E. AKUNTABILITAS ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pagu DIPA awal Kemenpora sebesar Rp. 2.530.093.157.000 namun terdapat penambahan dan pergeseran anggaran sehingga saat ini pagu Kemenpora menjadi Rp. 3.376.466.778.000 diantaranya penambahan Saldo Awal BLU untuk Pembayaran Tunggalan Operasional TA 2022 pada satker LPDUK, Bonus Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Berprestasi pada 12th ASEAN Para Games 2023 Kamboja dan Pengiriman Kontingen Indonesia pada *Multi Event* Tingkat Internasional Tahun 2023, Pembinaan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional Tahun (SLOMPN) Tahun 2023, Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan FIFA World Cup U-17.

Persentase realisasi anggaran Kemenpora Tahun 2023 sebesar 97,19% atau 3.281.434.076.297 dari total pagu 3.376.466.778.000, realisasi program keolahragaan sebesar 96,97% (2,06 T dari 2,67 T), pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda serapan anggaran sebesar 98,66% dan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda serapan anggaran sebesar 97,71% dan Sekretariat sebesar 98,46%. Meskipun terdapat indikasi penyerapan anggaran yang masih menumpuk di akhir tahun yakni pada bulan Desember terdapat 19,70% anggaran yang diserap namun serapan anggaran Kemenpora Tahun 2023 lebih baik jika dibandingkan dengan 3 tahun terakhir.

**Serapan anggaran berdasarkan program**

PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Keolahragaan	2.859.691.618.000	2.773.038.102.936	96,97%
Kepemudaan	161.238.000.000	158.345.842.604	98,21%
Dukungan Manajemen	355.537.160.000	350.050.130.757	98,46%
Total	3.376.466.778.000	3.281.434.076.297	97,19%

**Serapan anggaran berdasarkan jenis belanja**

AKUN BELANJA	PAGU	REALISASI	%
51 Belanja Pegawai	121.105.649.000	117.364.666.284	96,91%
52 Belanja Barang	3.236.849.138.000	3.144.462.787.096	97,15%
53 Belanja Modal	18.511.991.000	18.413.671.861	99,47%
Total	3.376.466.778.000	3.281.434.076.297	97,19%

**Serapan anggaran berdasarkan Satuan Kerja**

AKUN BELANJA	PAGU	REALISASI	%
DEPUTI 1	83.990.961.000	82.865.009.084	98,66%
DEPUTI 2	87.247.038.000	85.249.087.673	97,71%
SEKRETARIAT	335.537.160.000	330.374.231.275	98,46%

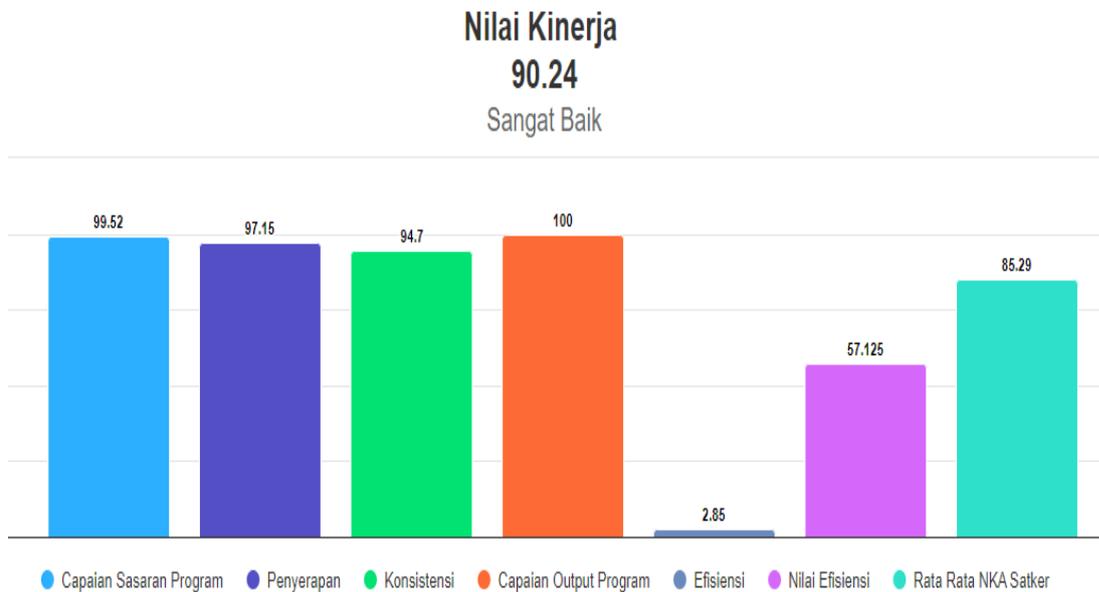
Tabel 3.50 Realisasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Program, Jenis Belanja dan Satuan Kerja

Bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus alat pengendalian bagi, bahwa anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja atau dapat diperoleh dari aplikasi e-Smart DJA Kementerian Keuangan yang disajikan pada grafik berikut:

Berdasarkan pada grafik di atas Tahun 2023 per tanggal 15 Januari 2023, tingkat efisiensi anggaran sebesar 2.85 yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang tingkat efisiensinya 1.82. Salah satu cara Kemenpora untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBN adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBN di lapangan, evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang sudah dianggarkan Dengan mengetahui kinerja

dan dampak program-program tersebut, Kemenpora dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.



Grafik 3.18 Nilai Kinerja Kemenpora TA 2023 Berdasarkan aplikasi e-SMART KEMENKEU

Langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2023 untuk perbaikan ke depan, antara lain dengan:

- 1) Melakukan Penyesuaian terhadap Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran, dengan meneliti dan melakukan reviu atas RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan pada Satker;
- 2) Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Anggaran, meliputi Penetapan Petunjuk operasional kegiatan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara;
- 3) Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran, dengan meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran serta memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
- 4) Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan.

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA RI

BAB IV  
PENUTUP



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Pemuda dan Olahraga berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 disusun sebagai wujud nyata akuntabilitas, transparansi, dan komitmen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya kepada publik dan untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran dan tujuan. Secara umum, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan segala sumber daya yang ada.

### **Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 antara lain:

1. Dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur, 4 (empat) IKU memperoleh capaian dengan kriteria “Sangat Baik” ( $\geq 100\%$ ); 4 (empat) IKU memperoleh capaian dengan kriteria “Baik” ( $90\% \leq x < 100\%$ ); 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria “Cukup” ( $80\% \leq x < 90\%$ ); dan 2 (dua) IKU memperoleh capaian dengan kriteria “Kurang” ( $< 80\%$ ).
2. Pada Tahun 2023, pagu anggaran Kemenpora adalah sebesar Rp3.376.466.778.000,- (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Sampai akhir tahun 2023, telah direalisasikan sebesar Rp 3.281.434.076.297 (tiga triliun dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 97,19% dari total pagu anggaran.

### **Permasalahan Dan Saran**

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja utama di atas dijumpai beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pada Bidang Kepemudaan, isu koordinasi lintas sektor dengan para stakeholder kepemudaan serta internalisasi terhadap ukuran pembangunan dirasa masih perlu dioptimalkan. Sedangkan di Bidang Keolahragaan lahirnya Desain Besar Olahraga Nasional menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pencapaian prestasi olahraga Nasional.

Adapun untuk pencapaian atas kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen. Langkah-langkah kedepan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi kemitraan lintas sektor kepemudaan dan keolahragaan.



2. Meningkatkan keselarasan perencanaan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan kinerja hingga pelaporan.
3. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara.
4. Membakukan formula pengukuran seluruh indikator yang ada agar dapat diuji relevansi antara angka indikator yang dihasilkan dengan sasaran kinerja yang diwujudkan.
5. Mempercepat terlaksananya Merit Sistem sebagai penerapan dari Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN seperti pola karir dan manajemen talenta.

Kementerian Pemuda dan Olahraga guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa berhasilnya capaian kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi, dan masyarakat Pemuda dan Olahraga (Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Kepemudaan, seluruh masyarakat pemuda dan olahraga).



# LAMPIRAN





## PERJANJIAN KINERJA MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, SH  
Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja sasaran strategis yang sesuai perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Jakarta, April 2023

**Menteri Pemuda dan Olahraga  
Republik Indonesia,**

  
Ario Bimo Nandito Ariotedjo, SH

  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing	1.1 Indeks Pembangunan Pemuda	56,65
		1.2 Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan Kepemudaan	78
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat Asia dan Dunia	2.1 Persentase penduduk Usia 10 tahun keatas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	37%
		2.2 Persentase tingkat kebugaran jasmani Masyarakat	28%
		2.3 Peringkat pada Asian Games	12
		2.4 Peringkat pada Asian Para Games	8
		2.5 Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat Internasional	80%
		2.6 Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	80%
3	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani.	3.1 Indeks RB	73,1
		3.2 Opini BPK	WTP
		3.3 Indeks Pelayanan Publik	4,26

Program	Anggaran
1. Program Keolahragaan	Rp. 2.668.870.142.000
2. Program Kepemudaan	Rp. 161.238.000.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp. 355.525.215.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.185.633.357.000</b>

Jakarta, April 2023

**Menteri Pemuda dan Olahraga  
Republik Indonesia,**

  
Ario Bimo Nandito Ariotedjo, SH



# MANUAL INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

## 1.1 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

NO	KETERANGAN	:	URAIAN																				
1	Sasaran Strategis (SS)	:	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing.																				
2	Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Pembangunan Pemuda																				
3	Deskripsi IKU	:	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan suatu ukuran secara keseluruhan, lintas wilayah dan lintas sektor tentang kemajuan pembangunan kepemudaan sebagai instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan pemuda yang dapat dibandingkan antar waktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak yang telah disepakati bersama di antara para pemangku kepentingan dan menjadi pengaruh dan rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program pemuda yang berbasis data serta mengukur dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. IPP memiliki 5 domain dan 15 indikator, diantaranya 1) domain pendidikan : rata-rata lama sekolah, APK SM+, APK PT, 2) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan : Angka kesakitan pemuda, pemuda korban kejahatan, pemuda merokok, remaja perempuan sedang hamil 3) domain lapangan dan kesempatan kerja : pemuda wirausaha/ white collar, TPT, 4) domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda : partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, partisipasi pemuda mengikuti organisasi, pemuda yang memberikan saran dalam rapat, dan 5) domain gender dan diskriminasi : perkawinan usia anak, pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan pt, pemuda perempuan bekerja di sektor formal																				
4	Formulasi Perhitungan	:	$\text{skor indikator}_j = \frac{\text{Nilai indikator } y_j - \text{batas minimum}_j}{\text{batas maksimum}_j - \text{batas minimum}_j}$ $\text{skor indikator}_j = 1 - \frac{\text{Nilai indikator } y_j - \text{batas minimum}_j}{\text{batas maksimum}_j - \text{batas minimum}_j}$ $\text{Indeks domain}_j = \frac{\text{skor indikator}_1 + \text{skor indikator}_2 + \dots + \text{skor indikator}_n}{n} \times 10$ $\text{IPP} = \frac{\text{indeks domain 1} + \dots + \text{indeks domain 5}}{5}$																				
5	Satuan Pengukuran	:	Indeks (0 - 100)																				
6	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas/Mutu																				
7	Tingkat Validitas IKU	:	Lag Outcome																				
8	Unit/PJ IKU	:	Deputi 1 dan Deputi 2																				
9	Sumber Data	:	BPS *Publikasi BPS terkait dengan Statistik Pemuda Indonesia tahun berjalan sekitar Januari-Maret T+1 sehingga perhitungan IPP baru dapat dilaksanakan di tahun T+1 *Capaian Indeks Pembangunan Pemuda tahun berjalan didasarkan pada hasil perhitungan IPP T-1 yang dibahas bersama antara Kemenpora, BPS dan Bappenas																				
10	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data																				
11	Jenis Perhitungan Data	:	Rata-rata																				
12	Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk																				
13	Polarisasi	:	Maximize																				
14	Periode Pelaporan	:	Tahunan																				
15	Target	:	2021 : 54,59      2022 : 55,61      2023 : 56,65      2024 : 57,67																				
16	Rincian Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q1 = n/a</td> <td>Q1 = n/a</td> <td>Q1 = n/a</td> <td>Q1 = n/a</td> </tr> <tr> <td>Q2 = n/a</td> <td>Q2 = n/a</td> <td>Q2 = n/a</td> <td>Q2 = n/a</td> </tr> <tr> <td>Q3 = n/a</td> <td>Q3 = n/a</td> <td>Q3 = n/a</td> <td>Q3 = n/a</td> </tr> <tr> <td>Q4 = 54,59</td> <td>Q4 = 55,61</td> <td>Q4 = 56,65</td> <td>Q4 = 57,67</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	Q1 = n/a	Q1 = n/a	Q1 = n/a	Q1 = n/a	Q2 = n/a	Q2 = n/a	Q2 = n/a	Q2 = n/a	Q3 = n/a	Q3 = n/a	Q3 = n/a	Q3 = n/a	Q4 = 54,59	Q4 = 55,61	Q4 = 56,65	Q4 = 57,67
2021	2022	2023	2024																				
Q1 = n/a	Q1 = n/a	Q1 = n/a	Q1 = n/a																				
Q2 = n/a	Q2 = n/a	Q2 = n/a	Q2 = n/a																				
Q3 = n/a	Q3 = n/a	Q3 = n/a	Q3 = n/a																				
Q4 = 54,59	Q4 = 55,61	Q4 = 56,65	Q4 = 57,67																				



## 1.2 TINGKAT KUALITAS PELAKSANAAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR PELAYANAN KEPEMUDAAN

NO	KETERANGAN	:	URAIAN			
1	Sasaran Strategis (SS)	:	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing			
2	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan			
3	Deskripsi IKU	:	Menggambarkan kualitas terhadap pelaksanaan koordinasi lintas sektor yang diselenggarakan oleh Kemenpora sebagai <i>leading</i> sektor dalam rangka penyelenggaraan layanan kepemudaan yang diukur berdasarkan komponen : 1) Subtansi : kebijakan, program dan manfaat 2) Teknis : persiapan, fasilitas dan pelaksanaan 3) tindak lanjut : evaluasi dan tindak lanjut			
4	Formulasi Perhitungan	:	Data diperoleh dari hasil penghitungan pada tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi dan tingkat kepuasan stakeholder terhadap kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan pemberdayaan dan pengembangan pemuda Dengan menggunakan instrument yang dikumpulkan berdasarkan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan koordinasi dengan skala ukur 1-5 yang dirata-ratakan dan dikonversi dengan rentang interval sebagai berikut :  20 - 35 : Sangat tidak baik 36.1 - 52 : tidak baik 52.1 - 68 : cukup baik 68.1 - 84 : baik 84.1 - 100 : sangat baik			
5	Satuan Pengukuran	:	Persentase (20-100%)			
6	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kuantitas/Output			
7	Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
8	Unit/PJ IKU	:	Deputi 2			
9	Sumber Data	:	Kemenpora			
10	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
11	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
12	Metode Cascading	:	Adopsi Langsung			
13	Polarisasi	:	Maximize			
14	Periode Pelaporan	:	Semester			
15	Target	:	2021: N/A	2022: 75%	2023 : 78%	2024 : 81%
16	Rincian Target	:	2021 Q1 = n/a s.d Q2 = n/a s.d Q3 = n/a s.d Q4 = N/A	2022 Q1 = n/a s.d Q2 = 75% s.d Q3 = 75% s.d Q4 = 75%	2023 Q1 = n/a s.d Q2 = 78% s.d Q3 = 78% s.d Q4 = 78%	2024 Q1 = n/a s.d Q2 = 81% s.d Q3 = 81% s.d Q4 = 81%



## 2.1 PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN YANG BEROLAHRAGA DALAM SEMINGGU TERAKHIR

NO	KETERANGAN	:	URAIAN			
1	Sasaran Strategis (SS)	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia			
2	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penduduk Usia 10 tahun keatas yang berolahraga dalam seminggu terakhir			
3	Deskripsi IKU	:	Persentase penduduk 10 tahun yang berolahraga dihitung dari tingkat partisipasi dan kontribusi masyarakat yang berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga selama seminggu terakhir. Data diambil dari perhitungan dimensi partisipasi pada Sport Development Index masyarakat yang berusia 10 tahun ke atas yang melakukan aktivitas olahraga minimal tiga kali per minggu yang kemudian dihitung menggunakan metode sampling.			
4	Formulasi Perhitungan	:	$\% \text{ Masyarakat Berolahraga} = \frac{\text{Jumlah aktivitas 3x lebih dalam satu minggu}}{\text{Jumlah Masyarakat } \geq 10 \text{ Tahun}} \times 100$			
5	Satuan Pengukuran	:	Persentase (0-100)			
6	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas/Mutu			
7	Tingkat Validitas IKU	:	Lag output			
8	Unit/PJ IKU	:	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga			
9	Sumber Data	:	Pengambilan data sampling SDI di tingkat desa dan kelurahan yang tersebar di 34 provinsi			
10	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
11	Jenis Perhitungan Data	:	Adopsi Langsung			
12	Metode Cascading	:	Posisi Akhir			
13	Polarisasi	:	Maximize			
14	Periode Pelaporan	:	Tahunan			
15	Target	:	2021 : 35,40	2022 : 36,39	2023 : 37	2024 : 40
16	Rincian Target	:	Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 : 35,40	Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 : 36,39	Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 : 37	Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 : 40



## 2.2 PERSENTASE TINGKAT KEBUGARAN JASMANI MASYARAKAT

NO	KETERANGAN	URAIAN																				
1	Sasaran Strategis (SS)	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia																				
2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Persentase Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat																				
3	Sasaran Program (SP)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga																				
4	Indikator Kinerja	Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia																				
5	Deskripsi IK	Kebugaran didefinisikan sebagai kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Tingkat kebugaran jasmani nasional diambil dari salah satu dimensi dalam <i>Sport Development Index</i> (SDI) yaitu kebugaran. Indikator pada dimensi kebugaran SDI adalah angka kebugaran yang ditunjukkan dengan VO2max, yakni berupa derajat kapasitas konsumsi aerobik maksimum. Subdimensi dari kebugaran adalah daya tahan kardiovaskuler. Instrumen pengambilan data subdimensi tersebut adalah tes lapangan ( <i>Multistage Fitness Test</i> atau <i>Beep Test</i> ) dimana responden melakukan lari bolak-balik 20 m terus menerus dan individu harus mencapai garis 20m sebelum berbunyi beep berikutnya.																				
6	Formulasi Perhitungan	$\text{Persentase Kebugaran} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}} \times 100\%$ <p>Nilai Aktual: Skor nyata yang diperoleh berdasarkan patokan yang telah ditetapkan (rata-rata hasil pengukuran tes MFT pada 34 provinsi)</p> <p>Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Panduan Pengumpulan Data <i>Sport Development Index</i> (SDI) 2021 yang dilakukan di 34 Provinsi dengan total responden 12.000 orang (2023);</li> <li>Aplikasi SiSDI.</li> </ol>																				
7	Satuan Pengukuran	Nilai (0-100)																				
8	Jenis Aspek Target pada SKP	Kualitas/Mutu																				
9	Tingkat Validitas IKU	<i>Lag Outcome</i>																				
10	Unit/PJ IKU	Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat																				
11	Sumber Data	Pengambilan data sampling SDI di tingkat desa dan kelurahan yang tersebar di 34 provinsi																				
12	Status Data	Hasil Perhitungan Raw Data																				
13	Jenis Perhitungan Data	Buat Baru																				
14	Metode Cascading	Posisi Akhir																				
15	Polarisasi	Maximize																				
16	Periode Pelaporan	Tahunan																				
17	Target	2021: 23,5%      2022: 26%      2023 : 28%      2024 : 30%																				
18	Rincian Target	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q1 : n/a</td> <td>Q1 : n/a</td> <td>Q1 : n/a</td> <td>Q1 : n/a</td> </tr> <tr> <td>Q2 : n/a</td> <td>Q2 : n/a</td> <td>Q2 : n/a</td> <td>Q2 : n/a</td> </tr> <tr> <td>Q3 : n/a</td> <td>Q3 : n/a</td> <td>Q3 : n/a</td> <td>Q3 : n/a</td> </tr> <tr> <td>Q4 : 23,5%</td> <td>Q4 : 26%</td> <td>Q4 : 28%</td> <td>Q4 : 30%</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	Q1 : n/a	Q1 : n/a	Q1 : n/a	Q1 : n/a	Q2 : n/a	Q2 : n/a	Q2 : n/a	Q2 : n/a	Q3 : n/a	Q3 : n/a	Q3 : n/a	Q3 : n/a	Q4 : 23,5%	Q4 : 26%	Q4 : 28%	Q4 : 30%
2021	2022	2023	2024																			
Q1 : n/a	Q1 : n/a	Q1 : n/a	Q1 : n/a																			
Q2 : n/a	Q2 : n/a	Q2 : n/a	Q2 : n/a																			
Q3 : n/a	Q3 : n/a	Q3 : n/a	Q3 : n/a																			
Q4 : 23,5%	Q4 : 26%	Q4 : 28%	Q4 : 30%																			



## 2.3 PERINGKAT PADA ASIAN GAMES

NO	KETERANGAN	:	URAIAN			
1	Sasaran Strategis (SS)	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia			
2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	:	Peringkat pada Asian Games			
3	Sasaran Program (SP)	:	Meningkatnya Prestasi Olahraga tingkat Internasional			
4	Indikator Kinerja	:	Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia ditingkat Internasional			
5	Deskripsi IK	:	Urutan/peringkat Indonesia pada event Olahraga Internasional Asian Games			
6	Satuan Pengukuran	:	Peringkat			
8	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas/Mutu			
9	Tingkat Validitas IKU	:	<i>Lag Output</i>			
10	Unit/PJ IKU	:	Asisten Deputi Andalan Olahraga			
11	Sumber Data	:	Kemenpora 2022			
12	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
13	Jenis Perhitungan Data	:	Adopsi Langsung			
14	Metode Cascading	:	Posisi Akhir			
15	Polarisasi	:	Maximize			
16	Periode Pelaporan	:	Tahunan			
17	Target	:	2021: n/a	2022: n/a	2023 : 12	2024 : n/a
18	Rincian Target	:	2021 Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 : n/a	2022 Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 : n/a	2023 Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 : 12	2024 Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 :



## 2.4 PERINGKAT PADA ASIAN PARA GAMES

NO	KETERANGAN	:	URAIAN			
1	Sasaran Strategis (SS)	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia			
2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	:	Peringkat pada Asian Paragames			
3	Sasaran Program (SP)	:	Meningkatnya Prestasi Olahraga tingkat Internasional			
4	Indikator Kinerja	:	Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia ditingkat Internasional			
5	Deskripsi IK	:	Urutan/peringkat Indonesia pada event Olahraga Internasional Asian Paragames			
6	Satuan Pengukuran	:	Peringkat			
8	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas/Mutu			
9	Tingkat Validitas IKU	:	<i>Lag Output</i>			
10	Unit/PJ IKU	:	Asisten Deputi Andalan Olahraga			
11	Sumber Data	:	Kemenpora 2022			
12	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
13	Jenis Perhitungan Data	:	Adopsi Langsung			
14	Metode Cascading	:	Posisi Akhir			
15	Polarisasi	:	Maximize			
16	Periode Pelaporan	:	Tahunan			
17	Target	:	2021: n/a	2022: 1	2023 : 8	2024 : n/a
18	Rincian Target	:	2021 Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 : n/a	2022 Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 : 1	2023 Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 : 8	2024 Q1 : n/a Q2 : n/a Q3 : n/a Q4 :



## 2.5 PERSENTASE ATLET JUNIOR YANG BERPRESTASI DI TINGKAT INTERNASIONAL

NO	KETERANGAN	:	URAIAN			
1	Sasaran Strategis (SS)	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia			
2	Indikator Kinerja	:	Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat internasional			
3	Deskripsi IKU	:	Data diperoleh berdasarkan hasil perhitungan jumlah atlet yang berprestasi (memperoleh medali) di ajang internasional dibandingkan dengan seluruh atlet yang dibina Kemenpora yang mengikuti event Internasional			
4	Formulasi Perhitungan	:	Atlet yang memperoleh prestasi di tingkat internasional berbanding dengan total atlet yang dibina Kemenpora yang mengikuti event internasional x100%			
5	Satuan Pengukuran	:	Persentase (0-100)			
6	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kuantitas/Output			
7	Tingkat Validitas IKU	:	Lag output			
8	Unit/PJ IKU	:	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga			
9	Sumber Data	:	Asdep Olahragawan Andalan			
10	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
11	Jenis Perhitungan Data	:	Adopsi Langsung			
12	Metode Cascading	:	Posisi Akhir			
13	Polarisasi	:	Maximize			
14	Periode Pelaporan	:	Tahunan			
15	Target	:	2021: 75%	2022: 78%	2023 : 80%	2024 : 82%
16	Rincian Target	:	2021 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 75%	2022 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 78%	2023 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 80%	2024 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 82%



## 2.6 TINGKAT PRESTASI OLAHRAGA INDONESIA PADA LEVEL INTERNASIONAL

NO	KETERANGAN	:	URAIAN			
1	Sasaran Strategis (SS)	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia			
2	Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional			
3	Deskripsi IKU	:	Data diperoleh berdasarkan hasil perhitungan pada peringkat Indonesia pada ajang Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, Sea Games dan Asean Paragames di tahun berjalan			
4	Formulasi Perhitungan	:	Predikat tingkat prestasi diperoleh dari total skor yang diperoleh dari:  % tingkat prestasi = $\frac{(\text{total negara peserta} - \text{peringkat} + 1)}{\text{total negara} \times 100}$			
5	Satuan Pengukuran	:	Persentase (0-100)			
6	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas/Mutu			
7	Tingkat Validitas IKU	:	Lag outcome			
8	Unit/PJ IKU	:	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga			
9	Sumber Data	:	Asdep Olahragawan Andalan			
10	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
11	Jenis Perhitungan Data	:	Adopsi Langsung			
12	Metode Cascading	:	Posisi Akhir			
13	Polarisasi	:	Maximize			
14	Periode Pelaporan	:	Tahunan			
15	Target	:	2021: 70%	2022: 75%	2023 : 80%	2024 : 82%
16	Rincian Target	:	2021 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 70%	2022 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 75%	2023 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 80%	2024 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 82%

### 3.1 INDEKS REFORMASI BIROKRASI

NO	KETERANGAN	URAIAN																				
1	Sasaran Strategis (SS)	: Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani.																				
2	Indikator Kinerja	: Indeks Reformasi Birokrasi																				
3	Deskripsi IKU	: <p>Indeks RB berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks RB diperoleh melalui evaluasi atas pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan</li> <li>Evaluasi RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.</li> </ol> <p>Terdapat 7 kategori penilaian (0-100) yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>AA (&gt;100) = Sangat Memuaskan;</li> <li>A (&gt;80-100) = Memuaskan;</li> <li>A- = Memuaskan dengan Catatan;</li> <li>BB (&gt;70-80) = Sangat Baik;</li> <li>B (&gt;60-70) = Baik;</li> <li>CC (&gt;50-60) = Cukup;</li> <li>C (&gt;30-50) = Kurang;</li> <li>D (0-30) = Sangat Kurang.</li> </ol>																				
4	Formulasi Perhitungan	: $\text{Indeks RB} = \left( \sum PP_{ij} + \sum PU_{ik} \right) + \left( \sum R_i \right)$ <p>Ket :  <math>\sum PP_{ij}</math> = Jumlah nilai indikator proses terboboti ke-i pada area perubahan ke-j di tingkat Pusat  <math>\sum PU_{ik}</math> = Jumlah nilai indikator proses terboboti ke-i pada area perubahan ke-j di unit kerja ke-k  <math>\sum R_i</math> = Jumlah Indikator hasil terboboti ke-i</p>																				
5	Satuan Pengukuran	: Indeks (0 - 100)																				
6	Jenis Aspek Target pada SKP	: Kualitas/Mutu																				
7	Tingkat Validitas IKU	: Lag Outcome																				
8	Unit/PJ IKU	: Sekretariat																				
9	Sumber Data	: <p>Kemenpan RB</p> <p>*Hasil Evaluasi RB Kemenpora tahun berjalan baru disampaikan Kemenpan RB Maret Tahun T+1</p> <p>*Capaian Indeks RB tahun berjalan didasarkan pada hasil Pelaksanaan RB Tahun T-1</p>																				
10	Status Data	: Hasil Perhitungan Raw Data																				
11	Jenis Perhitungan Data	: Nilai Posisi Akhir																				
12	Metode Cascading	: Lingkup Dipersempit																				
13	Polarisasi	: Maximize																				
14	Periode Pelaporan	: Tahunan																				
15	Target	: <table border="1"> <tr> <td>2021: 71,1</td> <td>2022: 72,1</td> <td>2023 : 73,1</td> <td>2024 : 75,1</td> </tr> </table>	2021: 71,1	2022: 72,1	2023 : 73,1	2024 : 75,1																
2021: 71,1	2022: 72,1	2023 : 73,1	2024 : 75,1																			
16	Rincian Target	: <table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Q1 = n/a</td> <td>Q1 = n/a</td> <td>Q1 = n/a</td> <td>Q1 = n/a</td> </tr> <tr> <td>Q2 = n/a</td> <td>Q2 = n/a</td> <td>Q2 = n/a</td> <td>Q2 = n/a</td> </tr> <tr> <td>Q3 = n/a</td> <td>Q3 = n/a</td> <td>Q3 = n/a</td> <td>Q3 = n/a</td> </tr> <tr> <td>Q4 = 71,1</td> <td>Q4 = 72,1</td> <td>Q4 = 73,1</td> <td>Q4 = 75,1</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	Q1 = n/a	Q1 = n/a	Q1 = n/a	Q1 = n/a	Q2 = n/a	Q2 = n/a	Q2 = n/a	Q2 = n/a	Q3 = n/a	Q3 = n/a	Q3 = n/a	Q3 = n/a	Q4 = 71,1	Q4 = 72,1	Q4 = 73,1	Q4 = 75,1
2021	2022	2023	2024																			
Q1 = n/a	Q1 = n/a	Q1 = n/a	Q1 = n/a																			
Q2 = n/a	Q2 = n/a	Q2 = n/a	Q2 = n/a																			
Q3 = n/a	Q3 = n/a	Q3 = n/a	Q3 = n/a																			
Q4 = 71,1	Q4 = 72,1	Q4 = 73,1	Q4 = 75,1																			



## 3.2 OPINI BPK

N O	KETERANGAN	:	URAIAN			
1	Sasaran Strategis (SS)	:	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani.			
2	Indikator Kinerja Utama	:	Opini BPK			
3	Deskripsi Iku	:	Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan Profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Lima jenis opini yang diberikan oleh BPK antara lain: WTP, WTP DPP, WDP, TIDAK WAJAR, dan TMP			
4	Formulasi Perhitungan	:	Opini BPK = Kesesuaian SAP + KP + Kepatuhan Peraturan + Efektivitas SPI Keterangan : Kesesuaian SAP : Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan KP : Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan Peraturan : Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas SPI : Efektivitas sistem pengendalian intern			
5	Satuan Pengukuran	:	Kategori			
6	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas/Mutu			
7	Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
8	Unit/PJ IKU	:	Sekretariat			
9	Sumber Data	:	BPK *Hasil Audit Laporan Keuangan Kemenpora tahun berjalan baru disampaikan BPK pada bulan Juli T+1  *Capaian Opini BPK tahun berjalan didasarkan pada hasil Audit Laporan Keuangan Kemenpora Tahun T-1			
10	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
11	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
12	Metode Cascading	:	Komponen Pembetek			
13	Polarisasi	:	Maximize			
14	Periode Pelaporan	:	Tahunan			
15	Target	:	2021 : WTP	2022 : WTP	2023 : WTP	2024 : WTP
16	Rincian Target	:	2021 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = WTP Q4 = WTP	2022 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = WTP Q4 = WTP	2023 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = WTP Q4 = WTP	2024 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = WTP Q4 = WTP



## 3.3 INDEKS PELAYANAN PUBLIK

NO	KETERANGAN	:	URAIAN			
1	Sasaran Strategis (SS)	:	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani.			
2	Indikator Kinerja	:	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga			
3	Deskripsi Iku	:	Indeks kualitas pelayanan merupakan indeks yang menilai persepsi kepuasan pemangku kepentingan/pengguna layanan. Indeks Kualitas Pelayanan menggunakan skala 1 s.d. 5. Aspek pada indeks pelayanan publik diantaranya : (1) Kebijakan Pelayanan (2) Profesionalisme SDM (3) Sarana Prasarana (4) SIPP (5) Konsultasi dan Pengaduan (6) Inovasi			
4	Formulasi Perhitungan	:	$Indeks\ Pelayanan\ Publik = \sum \bar{x}_i$ $\sum \bar{x}_i$ = jumlah rata-rata skor pada aspek pelayanan publik ke-i			
5	Satuan Pengukuran	:	Indeks (1,00 - 5,00)			
6	Jenis Aspek Target pada SKP	:	Kualitas/Mutu			
7	Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
8	Unit/PJ IKU	:	Sekretariat			
9	Sumber Data	:	Kemenpan RB  *Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Kemenpora tahun berjalan baru disampaikan Kemenpan RB Maret Tahun T+1  *Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun berjalan didasarkan pada hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun T-1			
10	Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
11	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
12	Metode Cascading	:	Lingkup di persempit			
13	Polarisasi	:	Maximize			
14	Periode Pelaporan	:	Tahunan			
15	Target	:	2021: 3,51	2022: 4,01	2023 : 4,26	2024 : 4,51
16	Rincian Target	:	2021 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 3,51	2022 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 4,01	2023 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 4,26	2024 Q1 = n/a Q2 = n/a Q3 = n/a Q4 = 4,51



# OLAHRAGA JAYA



**Kementerian Pemuda dan Olahraga  
Republik Indonesia**

Jl. Gerbang Pemuda no.3  
Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang  
Senayan-Jakarta Pusat 10270  
☎ 1500-928.

1 [www.kemenpora.go.id](http://www.kemenpora.go.id)

Q Kemenpora D@Kemenpora\_RI EM Kemenpora RI